

Edisi 6
DESEMBER 2021

MAJALAH

KASUARI INOVASI[®]



PERJUANGAN DAN DOA PENAKLUK COVID-19

ORGENES WONGGOR
BERAKIT di PEGUNUNGAN Arfak, BERENANG di Legislatif

**TANTANGAN NAKES DAN
PENANGANAN COVID-19
DI PAPUA BARAT**

ILMUWAN MUDA PAPUA
25 MAHASISWA TERIMA Hibah PENELITIAN

Anggrek Biru
PENEMUAN ANGGREK ENDEMIK
di RAJA AMPAT

ISSN : 2686-4827

**Tarian Penjaga Hutan
Papua (Geisler Upuya)**
DOK. BALITBANGDA PB





Anggrek biru. DOK. YANUAR ISHAQ (FFI)

Salam sejahtera bagi kita semua

Assalamualaikum Wr, Wb

Salam jumpa kembali para pembaca setia Majalah Kasuari Inovasi di penghujung Tahun 2021.

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya Majalah Kasuari Edisi Keenam dapat dirampungkan.

Kami segenap redaksi Majalah Kasuari sangat senang pada kesempatan ini kembali dapat menyajikan informasi-informasi seputar aktivitas pembangunan di Provinsi Papua Barat terutama yang terkait dengan aktivitas kelitbangan dan inovasi daerah di tengah-tengah pandemi covid-19.

Sebagai salah satu media publikasi dan diseminasi, Majalah Kasuari Inovasi merupakan majalah yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat setiap enam bulan. Dengan tujuan mendeskripsikan, mendokumentasikan dan mensosialisasikan aktivitas kelitbangan dan inovasi daerah serta aktivitas pembangunan di Papua Barat kepada publik.

Edisi Keenam menyajikan rangkuman informasi bulan Juni 2021 sampai Desember 2021 yang dikemas dalam tiga belas rubrik, meliputi profil tokoh, laporan khusus, opini, serba-serbi, galeri, kearifan lokal, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, advetorial, mitra pembangunan, panorama, promosi dan profil organisasi perangkat daerah. Dengan beberapa topik utama dari laporan khusus tentang Perjuangan dan Doa Penakluk Covid-19, Tantangan Nakes dan Penanganan Covid-19 di Papua Barat. Juga rubrik Kearifan Lokal tentang Hutan Adat Model Adaptif di Papua Barat, serta rubrik Iptek yang menampilkan Anggrek Biru, Penemuan Kembali Anggrek Langka dan Endemik Raja Ampat. Selain itu ada profil tokoh Ketua DPRD Papua Barat tahun 2020-2024 dan juga beberapa artikel menarik pada rubrik lainnya.

Harapan kami semoga sajian pada Edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surat Pembaca

Apresiasi luar biasa kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda Provinsi Papua Barat atas karya-karya yang luar biasa, khususnya penerbitan Majalah Kasuari Inovasi. Saya adalah pembaca yang mengikuti setiap edisi yang dipublikasi melalui link website yang dibagikan di akun Facebook Balitbangda Provinsi Papua Barat. Majalah ini sangat bermanfaat karena memberikan informasi secara umum terkait kepemimpinan Gubernur Papua Barat dan Kelitbangan serta Inovasi di Provinsi Papua Barat. Semoga majalah ini tetap eksis serta dalam memberikan informasi kepada pembaca.

(Devi, Masyarakat)

Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya bagi pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya Balitbangda yang telah berinisiatif serta mendukung maupun mempromosikan keunggulan-keunggulan daerah dari berbagai kajian ilmiah yang dituangkan dalam Majalah antara lain artikel atau berita yang mengandung kajian-kajian ilmiah. Tentunya kami para pembaca dan juga masyarakat merasakan adanya dampak secara informatif maupun secara edukatif yang membuat pembaca ingin untuk lebih banyak mengulas lagi informasi-informasi pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat. Harapannya kedepan lebih banyak lagi foto serta ilustrasi yang semakin menarik dan informatif.

(Bayu Arfian, ESDM Provinsi Papua Barat)

Apresiasi yang tinggi kepada Balitbangda Provinsi Papua Barat yang telah menginisiasi terbitnya Majalah Kasuari Inovasi sebagai media publikasi dan diseminasi berbagai kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah. Informasi yang disajikan pada Majalah Kasuari Inovasi sangat membantu para pembaca dalam mengikuti capaian-capaian dan perkembangan terkini aktivitas pembangunan, penelitian, dan inovasi daerah di berbagai sektor strategis yang dikerjakan oleh pemerintah daerah bersama mitra pembangunan. Artikel-artikel semi populer yang disajikan dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang menarik sehingga mempermudah transfer informasi kepada pembaca yang memiliki latar belakang yang beragam baik dari kalangan pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, maupun masyarakat umum. Harapannya Majalah Kasuari Inovasi dapat semakin berkembang, diterbitkan terus secara berkala, dan menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Tanah Papua.

(Julia Kalmirah, WRI Indonesia)

Penerbit

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Pembina

Gubernur Papua Barat
Wakil Gubernur Papua Barat
Sekretaris Daerah Papua Barat

Pengarah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS

Penanggungjawab

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Ir. Abdul Haviedz Fatamasyah, M.Si

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Haerul Arifin, S.Hut, M.Si

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah
Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut

Pemimpin Redaksi

Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbang
Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc

Peliputan

Lince Baransano, S.Si
Alberth Yomo, S.Hut
Arisa F.T Mori Muzendi, SP

Fotografer

Yohanis Octovianus, ST

Tim Data

Jhonal Thio, S.Pi
Rein Hallatu
Ferdinandus Hurulean, SP
Christoffel S.I Maweikere, S.Si., M.Si

Editor

Yance de Fretes, Ph.D
Dr. Keliopas Krey, S.Pd., M.Si
Dr. Onasius P. Matani, S.Hut., M.Sc
Dr. Anthoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc
Jimmy F. Wanma, S.Hut., M.App.Sc
Muhammad Farid, S.Hut., M.Sc

Layout

Christoffel S.I Maweikere, S.Si, M.Si

Alamat Redaksi

Balitbangda: Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi,
Gd Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2 dan 3, Arfai
Manokwari.
Website:
<http://balitbangda.papubaratprov.go.id>
Email : redaksi@kasuariinovasi.com
Kerjasama Balitbangda Provinsi Papua Barat
dengan Yayasan EcoNusa

ISSN-p: 2686-4827

PROFIL TOKOH

Orgenes Wonggor Berakit di Pegunungan
Arfak, Berenang ke Legislatif —6

LAPORAN KHUSUS

Perjuangan dan Doa
Penakluk Covid-19 —9

Tantangan Nakes dan Penanganan
Covid-19 di Papua Barat —12

OPINI

Vaksinasi, Inovasi dan Capaian di Provinsi
Papua Barat —16

SERBA-SERBI

Perkuat Pengelolaan Konten Digital
Warga Dengan Mata Pena Litbang —18

Pembekalan Program Interfaith
Rainforest Initiative Indonesia Chapter
Papua Barat —20

SMA TKN - Langkah Visioner Gubernur
Papua Barat —23

Awal Yang Baik Untuk Masa Depan Inovasi
Provinsi Papua Barat —27

Menghirup Aroma Mangrove Dari
Jembatan Kormun —29

Papua Barat Terima Penghargaan
Peringkat Ketiga Peduli Konsumen Se-
Indonesia —31

Mencari Jalan Keluar Untuk Permata
Hijau Teluk Wondama —32

Konferensi Internasional dan Rakornas
KOBH Hasilkan Lima Rekomendasi —36

Balitbangda Dorong Percepatan Regulasi
Mooring System —38

Kaukus Mendesak Transfer DAU
Memperhitungkan Luas Tutupan
Hutan —40

Mitra Pembangunan di Papua Barat Miliki
Web Koordinasi Bersama —43

Dirjen PPDT dan Bupati Mansel Tinjau
Lokasi Pembangunan Gedung Inovasi
Kakao Ransiki —47

Inovasi Komoditas Lokal dari Bumkam
Tengahkahwang Fakfak —48

Papua Barat Akan Jadi Tuan Rumah
Kegiatan Internasional Untuk Perempuan
dan Pemuda —51

Kebijakan Gubernur Papua Barat Masuk
Dalam Lima Kemenangan Dunia Bidang
Lingkungan —54

Rantai Pasok Pangan Papua Barat
Mendapat Perhatian Internasional —56

Tiga Staf Balitbangda Papua Barat
Hasilkan Tiga Inovasi di Penghujung
Tahun 2021 —58

Petak Ukur Permanen, Pemberi Sinyal
Kondisi Hutan Gunung Meja —62

GALERI —66

KEARIFAN LOKAL

Hutan Adat Model Adaptif
Di Papua Barat —70

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga
(Livelihood) Berbasis Kearifan Lokal
untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat
Kawasan Mangrove di Kabupaten Fakfak,
Papua Barat —73

Peningkatan Kapasitas Masyarakat di
Wilayah Pesisir Mangrove Kampung
Kambala dan Yarona —75

Potensi Keanekaragaman Hayati
Kampung Ubadari Dalam Penyusunan
Dokumen Pengelolaan Hutan Desa —78

IPTEK

Anggrek Biru, Penemuan Kembali
Anggrek Langka dan Endemik Raja
Ampat —82

ADVERTORIAL —84

MITRA PEMBANGUNAN

Mendorong Peran Pemuda Melalui
Program Ilmuwan Muda Papua —86

Tulisan Semi Populer Maupun Ilmiah,
Bentuk Pertanggungjawaban Publik Yang
Tak Terpisahkan —88

PANORAMA —90

PROMOSI —92

PROFIL OPD

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat —94



Saya tidak punya target sebagai ketua, karena saya juga sadar diri, bahwa masih banyak senior-senior saya yang lebih baik dari saya, bahkan ada juga suara-suara yang kurang bagus juga untuk saya. Tapi ya saya pikir dalam dunia politik kita sudah harus siap mental, mau menang atau kalah.

Orgenes Wonggor

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat

ORGENES WONGGOR

Berakit di Pegunungan Arfak, Berenang ke Legislatif Papua Barat



Orgenes Wonggor saat berkunjung ke gedung DPR RI. DOK. DPRD PB

Setelah mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Ketua DPRD Papua Barat dengan ketua MPR RI. DOK. DPRD PB

Bersama Yayasan Perdu Manokwari, Orgenes memulai perjalanan hidupnya dengan kegiatan pendampingan masyarakat di Pegunungan Arfak. Pekerjaan itu memaksa dirinya untuk lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, dari satu kampung ke kampung lainnya, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga alam di sekitar dengan melakukan praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak.

Meski mendapat banyak tantangan di lapangan, ia tak putus asa. Karena menurutnya, cepat atau lambat masyarakat akan sadar bahwa apa yang disuarakan bersama rekan-rekannya di Perdu Manokwari akan terbukti, bahwa kehidupan masyarakat di Pegunungan Arfak sangat bergantung pada alam sekitarnya, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan, dengan cara tidak menjual tanahnya dan mengambil seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, proses ekosistem hutan terus berkelanjutan memberikan kehidupan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang, sebagaimana pernyataan Gubernur Papua Barat, agar tidak meninggalkan air mata bagi anak cucu, tapi harus meninggalkan mata air bagi mereka.

Orgenes pernah menolak ketika ditawarkan untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena ia menilai PNS adalah pekerjaan yang tidak ada tantangannya. Tidak cocok dengan kepribadiannya yang menyukai pekerjaan penuh tantangan. Karena itu ia mengurungkan niat menjadi PNS dan tetap memilih bekerja di dunia LSM. Selain itu ia juga terlibat aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi lainnya baik organisasi keagamaan maupun organisasi adat.

Orgenes Wonggor pertama kali terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota legislatif pada Tahun 2004 di Kabupaten

Peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, nampaknya cocok disematkan pada perjalanan hidup Orgenes Wonggor, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat. Setelah membanting tulang dalam program pendampingan masyarakat

di kampung-kampung di Pegunungan Arfak sebagai pekerja lembaga swadaya masyarakat, Orgenes Wonggor saat ini menikmati hasilnya. Ya, pekerjaan itu telah menjadi karpet merah yang mengantarkan dirinya duduk di kursi legislatif hingga saat ini.



Pelantikan Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2024. DOK. DPRD PB

Manokwari, lalu menjadi anggota legislatif di Kabupaten Pegunungan Arfak dan saat ini menjadi anggota legislatif di Provinsi Papua Barat. Orgenes bahkan didaulat sebagai Ketua DPRD Provinsi Papua Barat periode 2020 – 2024.

“Saya tidak punya target sebagai ketua, karena saya juga sadar diri, bahwa masih banyak senior-senior saya yang lebih baik dari saya, bahkan ada juga suara-suara yang kurang bagus juga untuk saya. Tapi ya saya pikir dalam dunia politik kita sudah harus siap mental, mau menang atau kalah,” tandas Orgenes.

Pada saat pemilihan ketua DPRD, Orgenes Wonggor berada pada urutan ke 10 atau urutan terakhir, dan tak disangka dirinya berhasil mengungguli kandidat lainnya dan terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.

Orgenes Wonggor mengakui jabatan yang diembannya memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang berat, karena itu dirinya tak bisa memikul beban itu sendiri, selain diperlukan kerjasama dari rekan-rekannya sesama anggota dewan dan para staf di gedung legislatif, ia juga selalu berdoa dan berharap pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Kalau Raja Daud bisa diberikan kepercayaan memimpin bangsa Israel, saya percaya, Tuhan juga ada untuk memberikan hikmat itu untuk saya,” ucapnya.

Berangkat dari pengalaman hidup saat bekerja di daerah pedalaman Pegunungan Arfak yang sangat susah akses transportasi, yang mana orang kampung harus berjalan kaki dari satu kampung ke kampung lainnya sampai berhari-hari, maka dirinya akan ikut mendorong dan mengawal program pemerintah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung-kampung.



Ketua DPRD Provinsi Papua Barat bersama keluarga. DOK. PRIBADI

Dirinya juga akan mendorong dan mengawal program Pemerintah bagi pendidikan, kesehatan, bantuan pengembangan pertanian dan program-program lainnya di kabupaten dan kota. Bila ada program pemerintah yang tidak sesuai, maka dirinya akan menegur.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di awal masa kepemimpinannya tantangan pertama yang dihadapi adalah Pandemi Covid 19, yang berakibat pada kinerja yang terhambat karena banyak pemotongan anggaran yang dialihkan untuk mengatasi pandemi ini. Tantangan kedua yang dihadapi terkait revisi undang-undang otonomi khusus, dimana banyak tanggapan masyarakat umum bahwa otsus ini gagal karena tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat.

“Ya hal ini tidak mudah, karena kami berada di masa penentuan apakah otsus lanjut atau tidak? Tetapi Puji Tuhan kami melaksanakan tugas kami dengan baik sehingga kami bisa saling membantu dan melengkapi Pansus sampai pada penetapan UU nomor 2 Tahun 2021, dan saat ini

sudah berjalan sampai pada tahap RPP dan menunggu penetapan,” jelas Orgenes Wonggor yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pegunungan Arfak ini.

Disinggung tentang dukungannya terhadap Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, Orgenes mengatakan, sebagai orang yang pernah berkecimpung lama di LSM lingkungan, tentu upaya perlindungan dan pelestarian sudah kerap kali dilakukan. Bentuk dukungan yang sama akan dilakukan melalui

kebijakan-kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap lingkungan, juga pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk kolaborasi ini dilakukan melalui tugas dan fungsi badan legislatif melalui saran, arahan sampai pada penetapan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai anak asli Arfak ada harapan dan kerinduan dari seorang Orgenes Wonggor khusus kepada masyarakatnya untuk kedepan dapat lebih bijaksana dalam melakukan tindakan-tindakan yang sejalan etika hidup beragama dan bermasyarakat. Segala bentuk aspirasi ataupun persoalan sosial baik internal masyarakat sendiri harus diselesaikan secara baik, tanpa harus melakukan pemalangan, pembunuhan atau tindakan kekerasan atau anarkis lainnya.

“Karena hari ini saya sebagai salah satu anak Arfak yang bisa ada pada posisi ini, juga senior-senior saya seperti Bapak Drs. Dominggus Mandacan, Bapak Nataniel Mandacan, Bapak Hermus Indou dan yang lainnya yang mempunyai posisi sebagai pemimpin yang mengayomi banyak masyarakat lainnya, sehingga kita harus saling mendukung, agar menjaga nama baik kita sebagai anak Arfak yang dipercayakan pada posisi tertentu,” tandasnya.

Penulis: Arissa Mori Muzendi
Editor: Alberth Yomo

Biodata:

- **Nama Lengkap :** Orgenes Wonggor
- **Tempat Tanggal Lahir :** Mbenti, 05 Agustus 1978
- **Asal Suku :** Hatam Moile
- **Nama Ayah :** Alm. Mber Wonggor
- **Nama Ibu :** Septina Muid
- **Nama Istri :** Yunita Ullo
- **Nama anak :** Anggela S Wonggor dan Dustin George Wonggor

Tingkatan Pendidikan	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Tahun Masuk	Tahun Lulus
SD	YPPGI Minyambouw	1988	1993
SMP	SMP Negeri 1 Warmare	1993	1996
SMA	SMK Negeri 1 Manokwari	1996	1999
S1	Universitas Negeri Cendrawasih Jayapura	1999	2003

Nama Organisasi	Jabatan	Periode/ Tahun
DPD Partai Golkar Kabupaten Pegunungan Arfak	Ketua 2014-2024	2014-2024



Anjuran pemerintah untuk melakukan swab antigen sebelum melakukan perjalanan dan kegiatan berkumpul demi menekan laju penyebaran virus covid-19. DOK. BALITBANGDA PB

Perjuangan dan Doa Penakluk Covid-19

Bagi sebagian warga Papua Barat, Covid-19 ibarat malaikat pencabut nyawa. Bila ada warga yang dinyatakan positif Covid, akan timbul rasa takut, panik, stres dan bahkan dikucilkan. Penyebaran *hoaks* yang berlebihan di media sosial juga turut mempengaruhi perasaan dan sikap masyarakat.. Padahal Covid-19 ini dapat disembuhkan asalkan penderita mau mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Tim liputan kolaboratif Mata Pena Litbang Papua Barat dan Majalah Kasuari Inovasi berkesempatan menemui sejumlah penyintas Covid-19 di Manokwari, agar mereka berbagi cerita bagaimana menjalani hidup keseharian saat dinyatakan positif Covid-19, dan upaya-upaya yang mereka dilakukan hingga dinyatakan sembuh.

Muhammad Farid, Econusa

“Saat itu saya putuskan untuk tidak melihat media sosial dan berita, karena membuat saya semakin stress,” ujar Muhammad Farid, penyintas Covid-19 yang ditemui tim liputan.

Dirinya mengaku makin stress lagi ketika, tiga teman yang bersamaan, menelepon menanyakan kabar. “ Pertama teman SMA yang sudah berpisah 20 tahun menelepon menanyakan kabar saya, setelah itu pelatih *softball* waktu SMA mengirim pesan menanyakan kabar, kemudian ada lagi teman kerja di kantor lama menanyakan kabar saya. Dalam hati saya berkecamuk, ini pertanda apa? “Apakah saya akan meninggal?,” tutur Farid yang saat itu dipercayakan sebagai Direktur Program Yayasan Econusa.

Namun dirinya berusaha tetap tenang, dengan cara bersyikir dan berdoa terus menerus, berharap agar dapat dikuatkan dan cepat dipulihkan. Farid menduga dirinya terpapar Covid-19 saat melakukan kegiatan di Sorong pada rentang waktu 13-27 Oktober 2020. Namun saat hendak berangkat ke Jakarta, dirinya melakukan *swab antigen* di Sorong, hasilnya dinyatakan negatif.

Tapi waktu yang sama, dirinya juga melakukan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction/Pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri atau virus*), yang hasilnya baru diketahui tiga hari kemudian. Tetapi aturan penerbangan waktu itu memungkinkan menggunakan hasil *swab antigen*, sehingga dia bisa terbang ke Jakarta.

“Saya baru rasa gejalanya itu setelah tiba di Jakarta. Saya telepon dokter di Sorong, dan dokter marah saya, kenapa belum tahu hasilnya, lalu berangkat ke Jakarta. Saya bilang, waktu itu aturannya memperbolehkan penggunaan hasil *swab antigen*, jadi bisa terbang,” jelas saya.

Kemudian dokter itu memintanya untuk melapor ke Satgas Covid-19 di Jakarta. “Tapi saya tidak pergi lapor. Dokter bilang, kalau tidak sanggup lapor, biar kami saja yang laporkan, nanti dijemput. Saya tunggu-tunggu, tapi tidak ada yang datang menjemput, jadi saya karantina mandiri saja,” tandas Farid.

Farid menjelaskan, gejala awal yang dirasakan selama tiga hari berturut-turut yaitu tulang belakangnya terasa sakit. Namun menurutnya itu karena kurang olahraga, jadi dirinya mulai melakukan *jogging* pada pagi hari. Ternyata sakit itu tidak kunjung sembuh. Hal itu membuat dirinya mulai curiga, apakah gejala kanker? Atau gejala Covid-19. Setelah *browsing* di media social, ternyata gejala yang dialaminya mirip dengan beberapa penderita Covid-19. Lalu ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan, dan benar dinyatakan positif Covid-19.

Gejala berikut yang dirasakan lagi setelah divonis positif Covid-19 adalah sakit kepala yang tidak tertahankan hingga rasa mau muntah dan buang air terus menerus selama tiga hari. “Tapi saya juga periksa saturasi oksigen. Hasilnya baik, diatas 95,” ujarnya. *(pada orang yang normal atau dalam kondisi sehat, angka batas minimal saturasi oksigen adalah 95 persen sehingga normalnya akan berada di kisaran angka 95-100 persen. Saat level saturasi oksigen manusia di bawah angka 95 persen maka harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan Covid-19 terdekat)*

Kemudian Farid menjalani karantina mandiri di kontrakkannya di Jakarta. Beberapa persiapan yang dilakukan selama menjalani karantina mandiri adalah menyiapkan dua baskom berisi air sabun di depan kamarnya. Satu baskom untuk piring kotor, satu lagi untuk pakaian. “Jadi direndam dulu satu hari, kemudian diambil ibu kos untuk cuci. Saat itu isi kamar saya sudah dilengkapi dengan susu dan vitamin oleh pihak kantor. Ada juga dokter saya yang

memantau perkembangan saya selama 24 jam,” ujarnya.

Farid juga mengatakan, ketika kena Covid-19, ia nyaris tidak mengenal waktu. Jam 1 atau jam 2 dini hari terasa seperti siang hari. Pada jam-jam itulah ia merasa segar seperti jam 10 pagi. “Makanan saya biasa saja, mungkin karena dibantu dengan konsumsi vitamin, jadi bisa terbantu. Suhu badan saat itu memang terasa hangat, tapi tidak ada kering dingin,” tandasnya.

Pada hari ke-tujuh menjalani karantina mandiri, ia merasa mulutnya kebas, namun masih bisa mengecap makanan, penciumannya juga normal. “Memang sudah mau mati rasa, tapi saya paksa makan terus. Makan buah yang asam-asam, terus coba makan yang manis-manis juga. Saya menjaga jangan sampai hilang rasa,” tuturnya.

Pada hari ke-10, Farid mengaku tubuhnya mulai terasa sehat dan tidak merasa keluhan lagi. “Saya pergi PCR, dan benar hasilnya negatif, artinya tubuh ini sudah bebas dari Covid-19,” ucap pria asal Majene, Sulawesi Selatan yang telah lama malang melintang sebagai peneliti keanekaragaman hayati di Tanah Papua. Yang benar... sebagai orang konservasi, bolehlah.

RINTO PANEMBANAN, ASN Provinsi Papua Barat

Kisah berbeda dialami oleh Rinto Panembonan, ASN di Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Papua Barat. Meskipun sudah melakukan vaksinasi dua kali, namun ia masih bisa terpapar Covid-19.

“Saya sudah ikut vaksin tahap pertama dan tahap keduanya tapi tetap terinfeksi Covid-19 juga,” tuturnya. Ia dinyatakan positif Covid-19 sebulan setelah vaksin kedua. Setelah dinyatakan positif Covid-19, ia menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

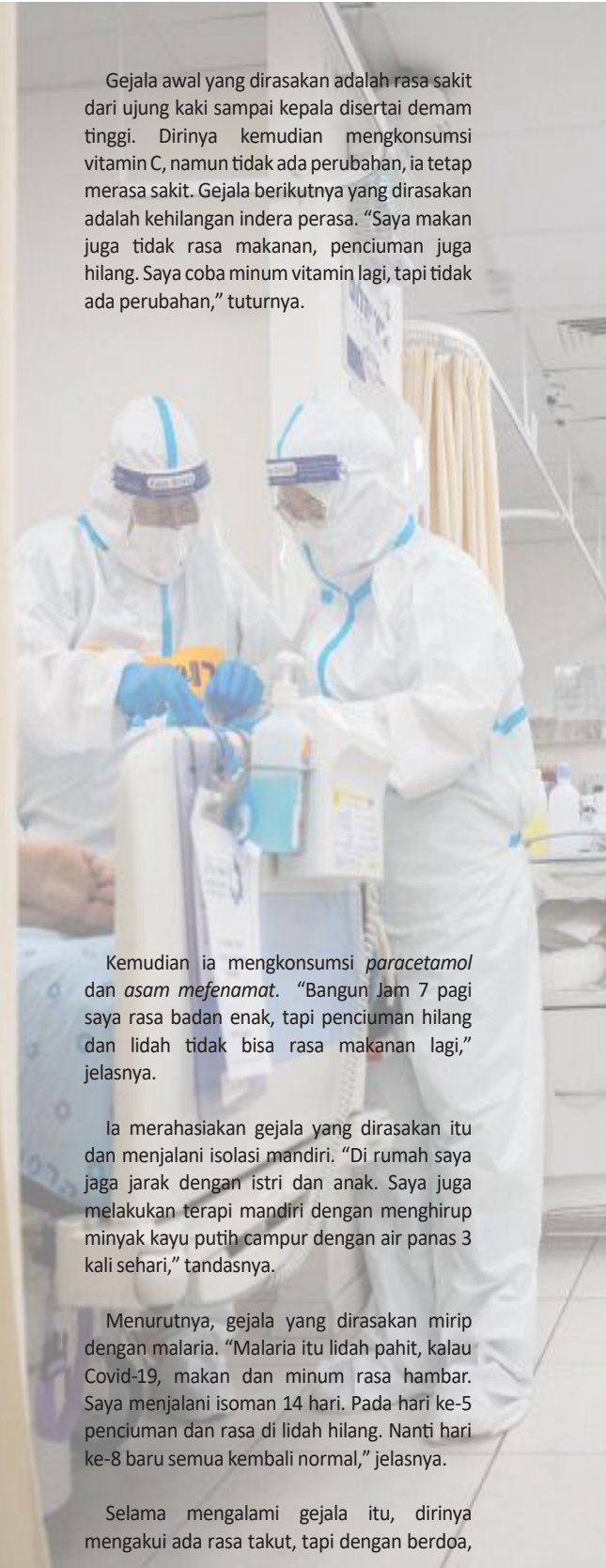
Gejala awal yang dirasakan adalah rasa sakit dari ujung kaki sampai kepala disertai demam tinggi. Dirinya kemudian mengkonsumsi vitamin C, namun tidak ada perubahan, ia tetap merasa sakit. Gejala berikutnya yang dirasakan adalah kehilangan indera perasa. “Saya makan juga tidak rasa makanan, penciuman juga hilang. Saya coba minum vitamin lagi, tapi tidak ada perubahan,” tuturnya.

Kemudian ia mengkonsumsi *paracetamol* dan *asam mefenamat*. “Bangun Jam 7 pagi saya rasa badan enak, tapi penciuman hilang dan lidah tidak bisa rasa makanan lagi,” jelasnya.

Ia merahasiakan gejala yang dirasakan itu dan menjalani isolasi mandiri. “Di rumah saya jaga jarak dengan istri dan anak. Saya juga melakukan terapi mandiri dengan menghirup minyak kayu putih campur dengan air panas 3 kali sehari,” tandasnya.

Menurutnya, gejala yang dirasakan mirip dengan malaria. “Malaria itu lidah pahit, kalau Covid-19, makan dan minum rasa hambar. Saya menjalani isoman 14 hari. Pada hari ke-5 penciuman dan rasa di lidah hilang. Nanti hari ke-8 baru semua kembali normal,” jelasnya.

Selama mengalami gejala itu, dirinya mengakui ada rasa takut, tapi dengan berdoa,



ia merasa kuat untuk menghadapi penyakit itu. “Awalnya saya takut dikucilkan. Tapi puji Tuhan saya merasa tidak dikucilkan oleh tetangga dan teman kantor,” ucapnya.

AMBAR UTARI,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unipa

Ambar Utari mengaku merasakan gejala Covid-19 pada Jumat 9 November 2020. Pada awalnya merasa pusing, kemudian rasa mengigil dan demam tinggi.

“Tapi waktu itu saya pikirnya hanya demam biasa, mungkin karena capek. Demamnya kurang lebih dua hari, itupun masih belum terpikirkan kalau ini gejala Covid-19,” jelasnya.

Beberapa hari kemudian, Ambar mengaku kehilangan indera perasa. “Kalau makan tidak ada rasanya, makanan jadi hambar begitu. Sampai malamnya tiba-tiba saya tidak bisa mencium aroma minyak kayu putih dan parfum. Akhirnya saya mulai berpikir “Apakah saya terpapar Covid-19?” tanyanya dalam hati.

Kemudian ia menceritakan gejala yang dialaminya itu ke orangtuanya. “Orangtua minta saya untuk isolasi mandiri di kamar dan tidak diperbolehkan keluar. Kemudian tante saya datang dan menyarankan untuk periksa di Rumah Sakit Provinsi,” jelasnya.

Ia kemudian melakukan dua kali tes di Rumah Sakit Provinsi. Pertama Rapid Test hasilnya non reaktif. “Tapi saya ragu de-

ngan hasil itu karena sudah merasakan gejala Covid-19 seperti hilangnya indra perasa dan penciuman, jadi saya sendiri yakin kalau ini pasti positif Covid-19.

Lalu dirinya kembali lagi ke Rumah Sakit Provinsi dan minta di *SWAB PCR*. Ternyata benar dirinya dinyatakan positif Covid-19. Lalu oleh pihak Rumah Sakit diberikan pilihan, apakah mau isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas karantina pemerintah.

“Saya bilang ke dokter kalau di rumah itu bapak punya riwayat penyakit asma. Akhirnya dokter menyarankan untuk isolasi di fasilitas karantina kabupaten. Jadi Sabtu 16 November itu saya mulai isolasi di fasilitas karantina sampai tanggal 3 Desember 2020,” jelasnya.

Ambar mengaku, ada perasaan takut dikucilkan dari keluarga dan tetangga pada awal dinyatakan Covid-19. Namun karena dukungan orang tua akhirnya ia bisa menjalaninya dengan pikiran yang sehat dan bisa sembuh.

“Jadi pesan saya buat semua teman-teman atau siapa saja jangan menyepelekan Covid-19, usahakan tetap pakai masker baik itu untuk perginya jauh atau dekat. Kita tidak pernah mengetahui Covid-19 itu bisa menular dari siapa saja,” tandasnya.

CHRISTY ADESTYA ANGKOTTA,
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Unipa

Christy divonis sebagai pasien Covid-19, pada 28 Juli 2021 setelah melalui tes PCR. Dirinya tidak percaya, karena merasa tubuhnya sehat dan tidak merasa gejala sakit.

Akibat vonis itu, keluarganya takut dan melarang dirinya tinggal di rumah. Alasannya demi menjaga kesehatan keluarga lainnya. Apalagi ibunya memiliki riwayat penyakit bawaan, dan adik-adiknya juga masih kecil, jadi sangat berpotensi menular pada keluarganya yang lain. Karena itu orangtuanya menyarankan untuk isolasi di tempat karantina yang disiapkan pemerintah.

“Saya kemudian menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, dan setelah itu dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19,” ucap Christy.

Christy berpesan agar orang yang dinyatakan positif Covid-19 agar tetap semangat dan tidak cepat putus asa. “Kita semua pasti bisa sembuh kalau kita punya semangat dan iman kepada Tuhan untuk sembuh, pasti kita bisa melewati Covid-19 ini dengan baik. Semoga pandemi Covid-19 segera berlalu menurut waktu Tuhan,” pesan Christy menutup wawancara ini.

Demikian cerita dari beberapa penyintas Covid-19 di Manokwari. Kiranya kisah mereka dapat menjadi cermin dan pemandu bagi warga lainnya. Bahwa Covid-19 ada di sekitar kita dan virus ini dapat dilawan hanya dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan Pemerintah. Bila ada yang terpapar, tetap harus kuat dan semangat menjalani prosedur karantina. Dengan pola hidup yang sehat disertai ketaatan terhadap protokol kesehatan Covid-19, niscaya kita akan menang melawan virus ini.*)

| Penulis : Alberth Yomo & Tim Mata Pena
Litbang 2021
| Editor : Yance de Fretes (CI)

Tantangan Nakes dan Penanganan Covid-19 di Papua Barat



Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si ketika menerima vaksin covid-19. DOK. DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada Tahun 2020 dan menyebabkan kematian massal di berbagai kota di dunia. Para pemimpin negara panik mencari solusi cepat dan tepat untuk menyelamatkan warganya, termasuk di Indonesia.

Tepatnya 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dua warga Indonesia pertama yang teridentifikasi positif Covid-19.

Dua warga berjenis kelamin perempuan asal Depok itu terpapar virus Covid-19 setelah kontak dengan pelatih senam asal Jepang yang lebih dulu terjangkit virus Covid-19 di Malaysia.

Ibarat gunung es, di luar temuan pertama ternyata telah menjangkit sejumlah orang Indonesia lainnya. Kemudian dikenal dengan istilah pasien kasus 1, kasus 2, kasus 3 hingga kasus 15 dan tidak terhitung lagi jumlah

orang yang terinfeksi dengan 1 wilayah jangkauan semakin meluas sampai ke Papua Barat.

Setelah 25 hari dari temuan pertama virus corona masuk Indonesia, Papua Barat mencatat kasus perdana Covid-19 pada 27 Maret 2020, ditemukan dua orang pasien Covid 19 di Kota Sorong. Pada 31 Mei 2020, Satgas Covid-19 Papua Barat mengumumkan, warga di Papua Barat yang



Wawancara Tim Mata Pena Litbang dengan Direktur RSUD Provinsi Papua Barat dr. Arnold Yap. DOK. BALITBANGDA PB

positif corona telah mencapai 168 orang. Kemudian pada 21 September 2020, secara akumulatif melonjak menjadi 1.516 kasus positif, namun 917 berhasil sembuh, tetapi ada 26 orang meninggal dunia.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari pembatasan akses penerbangan, akses pelayaran, akses pelayanan publik dan sebagainya. Namun, virus Covid-19 terus melambung tajam hingga di penghujung Tahun 2020.

Bagaimana penanganan Covid-19 di Papua Barat hingga Tahun 2021? Direktur RSUP Papua Barat, sekaligus juru bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, M. Epid mengatakan saat ini jumlah kasus di Papua Barat lebih dari 22.000 orang. Sekitar 10.000 pasien dirawat di rumah sakit pemerintah, baik provinsi dan kabupaten. Separuhnya lagi menjalani karantina mandiri.

“Khusus Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, hingga 17 April 2021 telah menangani

997 pasien Covid-19,” tutur Arnoldus.

Dijelaskan, terbatasnya jumlah pasien Covid-19 yang ditangani Pemerintah Daerah disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendukung. Misalnya terkait keterbatasan kebutuhan tabung oksigen. Sejauh ini hanya diperuntukan bagi pasien Covid-19 yang menunjukkan gejala sesak nafas. Sedangkan pasien Covid-19 tanpa gejala sesak nafas, hanya diberikan obat anti virus dan vitamin sesuai keluhan.

“Tempat pengisian oksigen juga hanya ada di dua tempat, sementara pelayanan kebutuhan oksigen untuk beberapa kabupaten di Papua Barat. Keterbatasan ini yang membuat pelayanan pasien Covid-19 di Papua Barat tidak ada persiapan yang memadai,” jelas Arnold.

Selanjutnya untuk kebutuhan obat-obatan, kata Arnoldus tidak masalah, karena mendapatkan suplai dukungan pendanaan dari APBD Provinsi. Jika pada waktu-waktu tertentu kehabisan obat, dengan cepat

dapat didatangkan dari Makassar, Jawa, bahkan Jayapura.

Mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di rumah sakit, diakui Arnoldus masih kurang, sehingga direkrut tenaga kesehatan dengan sistem kontrak. “Sejauh ini tenaga kesehatan yang statusnya ASN struktural berjumlah 93 orang, 60 orang fungsional dan ada 270 orang yang direkrut sebagai tenaga kontrak,” jelasnya.

Arnoldus menjelaskan, penempatan tenaga kesehatan di Puskesmas sekarang menjadi satu kelompok kerja yang terdiri dokter, perawat, apoteker, bidan dan analis. Ini sesuai dengan program Nusantara Sehat.

Pada masa Pandemi, Gubernur Papua Barat juga memberikan insentif yang besar kepada para tenaga kesehatan. “Dokter spesialis, gajinya sekitar Rp. 30.000.000, kemudian ditambah insentif lainnya sehingga mencapai Rp 80.000.000. Sedangkan dokter umum itu 25.000.000 dan insentifnya sekitar Rp. 10.000.000. Tenaga perawat kontrak, dibayar sekitar Rp. 7.500.000 dan insentif Rp 6.500.000. Apoteker dibayar sekitar Rp 7.500.000 dan dengan insentif Rp 6.500.000.

Sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19, tenaga medis sangat rentan terpapar virus ini. “Sekitar 25% tenaga kesehatan kita terpapar Covid 19. Puncaknya pada bulan Juni-Juli 2021, itu sampai 87%. “Tapi kami tidak mempublikasikan itu, karena kami punya prinsip yang sakit isolasi di rumah dan yang sehat tetap bekerja, agar pelayanan ini tetap jalan,” ungkap Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua Barat ini.

Mengenai program vaksinasi, Arnoldus menjelaskan, secara umum vaksinasi di Papua Barat masih rendah sekitar 30% dari penduduk. Capaian tertinggi di Kabupaten Manokwari, sudah lebih dari 50%. Hanya saja, proporsi Orang Asli Papua (OAP) sangat rendah, tidak sampai 25%.

Capaian vaksinasi yang tinggi akan melindungi dan membentuk imunitas kelompok herd-immunity. “Paling tidak harus 70% penduduk yang telah divaksinasi. Namun, kita belum bisa mencapai itu. Jika, kesadaran vaksinasi yang kurang, saya khawatir tidak akan mencapai 60% hard untuk menjadi herd-immunity. Jadi sangat diharapkan kesadaran semua pihak,” ungkapnya.



Wawancara Kepala Tata Usaha Kantor Otoritas Bandara Manokwari oleh tim Mata Pena Litbang 2021. DOK. BALITBANGDA PB

Penyebaran *HOAX*, kata Arnoldus, menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian vaksinasi di Papua Barat. Anahnya lagi, orang berpendidikan yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan juga percaya *hoax*, dan menghindar dari vaksin. Padahal sebenarnya vaksinasi ini adalah untuk memberi perlindungan kepada semua orang, tanpa terkecuali.

Pelayanan Penerbangan di Papua Barat Iktur Terdampak

Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Rendani Manokwari melalui Kepala sub bagian tata usaha Lasmon Hutabalian mengatakan pandemic Covid-19 berdampak buruk bagi pelayanan penerbangan secara nasional dan internasional, termasuk di Papua Barat.

Kondisi minimnya penumpang, membuat maskapai melakukan pemotongan rute keberangkatan agar dapat memenuhi biaya operasional. Pelayanan juga tidak maksimal contohnya seperti bandara Fak-fak dan Nabire yang belum terlaksana pelayanannya secara maksimal karena harus membuat posko pengawasan terlebih dahulu.

Perempuan Paling Merasakan Dampaknya

Ketua Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anike T H Sabami, mengatakan pandemic Covid-19 ini telah meluluhlantakan perekonomian nasional

bahkan ekonomi keluarga. Perempuan atau ibu rumah tangga yang paling merasakan dampaknya dalam keluarga.

“Pegawai setiap bulannya pasti mendapatkan gaji. Tetapi, bagaimana dengan perempuan yang bahkan suaminya tidak memiliki pekerjaan sama sekali? Mereka harus berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil jualan di pasar tidak lain untuk memberi makan bagi keluarganya,” Kata Anike Sabami.

Pandemi Covid-19 ini membawa luka tersendiri bagi kaum perempuan Papua, mereka bahkan menangis karena dalam masa sulit seperti ini dengan harus tetap berjualan di pasar, tetapi kemudian hasil jualan mereka diminta oleh suami, sehingga pada akhirnya terjadi kekerasan berbasis *gender* dalam rumah tangga.

Ana juga menemukan ada banyak bantuan dari pemerintah berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang tidak menjangkau banyak perempuan. Justru yang dapat BLT adalah mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Ana berharap hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, agar ke depan lebih selektif dan tepat sasaran.



Ketua Yayasan Mitra Perempuan Papua Ibu Anike Sabami ketika diwawancarai oleh Tim Mata Pena Litbang tahun 2021. DOK. TIM MATA PENA LITBANG 2021

DAP Temukan Dua Alasan Warga Tolak Vaksin

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP mengatakan, DAP mendapat dua alasan utama mengapa masyarakat adat menolak vaksin. Alasan pertama dari sisi agama atau aliran kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa dalam vaksin itu terkandung logam atau sesuatu yang menurut mereka itu dalam ajaran agama Nasrani disebut dengan antikris atau 666 yang berbentuk *chip*. Alasan kedua, karena ketakutan pada suanggi. Menurut adat istiadat Suku Besar Arfak, mereka meyakini dalam kepercayaannya bahwa orang yang jalan “suanggi” itu biasanya membunuh orang menggunakan suntik.

Meneruskan dua hal tersebut, DAP juga sudah berkoordinasi dengan pihak gereja untuk memberikan pemahaman melalui gereja agar masyarakat mau mengerti. Tetapi ada yang menolak sama sekali untuk divaksin, DAP tidak bisa memaksakan masyarakat untuk vaksin karena itu adalah hak masyarakat.



Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP.

DOK. TIM MATA PENA LITBANG 2021

Pemerintah Gelontorkan Ribuan Bapok dan Stimulus

Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak tinggal diam, ribuan bantuan bapok makanan telah disiapkan dan disalurkan ke ribuan warga. Para tokoh agama juga mendapat bantuan tangan kasih dari Gubernur dan bantuan stimulus bagi ratusan UMKM di Papua Barat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, George Yarangga mengatakan Gubernur Papua Barat telah menyalurkan ribuan Bapok, Tangan Kasih dan Stimulus ke ribuan warga Papua Barat yang berdomisili di 12 Kabupaten dan 1 Kota.

Bantuan yang diberikan pemerintah melalui Gubernur, merupakan respon terhadap dampak pandemi Covid-19 bagi warga masyarakat.



Penyaluran bapok Tangan Kasih di Kabupaten Manokwari Selatan

DOK. BALITBANGDA PB

| Penulis : Alberth Yomo & Tim Mata Pena
Litbang 2021

| Editor : Yance de Fretes (CI)

VAKSINASI, INOVASI DAN CAPAIAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

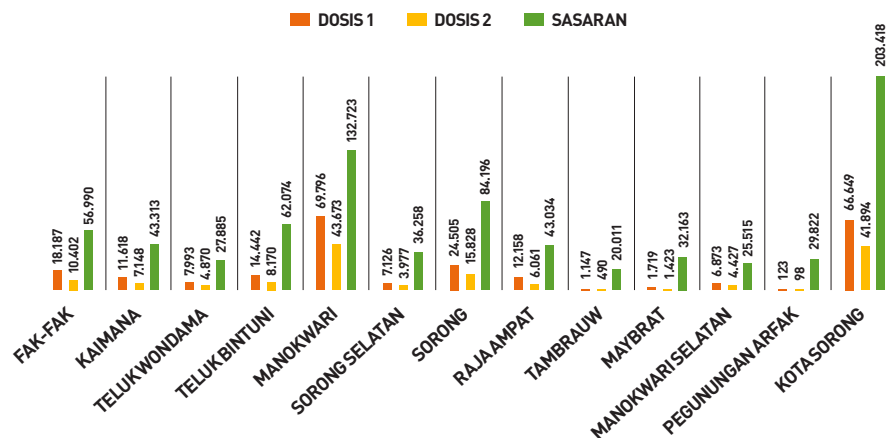
Papua Barat merupakan provinsi dengan ibu kota Manokwari, terletak di bagian barat Pulau Papua dan memiliki luas wilayah yang sangat besar, yaitu 102.955,15 km². Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kota Sorong.

Pandemi penyebaran Covid-19 yang tersebar merata di Indonesia termasuk juga di Papua Barat. Tantangan topografi wilayah Papua Barat yang didominasi oleh daerah berbukit dan gunung menyebabkan beberapa kabupaten sulit dijangkau baik melalui darat dengan kendaraan. Faktor aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pembatas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program Vaksinasi Covid 19. Faktor pembatas lain adalah kurangnya tenaga ahli, terbatasnya prasarana medis, pola adat istiadat dan budaya yang berbeda. Namun faktor pembatas tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk mensukseskan program vaksinasi covid 19 di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 dimaksudkan untuk menurunkan risiko terpapar COVID-19, menurunkan angka kesakitan, angka kematian, mencegah penularan serta memungkinkan tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity)^{2,3}. Berbagai inovasi melalui tahapan pelaksanaan sosialisasi intensif bagi program vaksinasi Covid-19 telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat sejak Desember 2020 melalui media sosial (Whats App, Facebook, Instagram, Warta Online, Web Dinas Kesehatan dan Web Provinsi Papua Barat), penyebaran brosur, pemasangan balihho vaksinasi massal, edukasi melalui RRI, dan TV lokal, merupakan upaya serius pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi covid 19 di wilayah ini.

Upaya pemerintah ini telah memberikan dampak yang positif terhadap kesadaran, dan antusiasme masyarakat agar segera mendapatkan vaksinasi. Hasil survei yang dilakukan oleh kementerian Kesehatan

VAKSINASI COVID-19 PROVINSI PAPUA BARAT



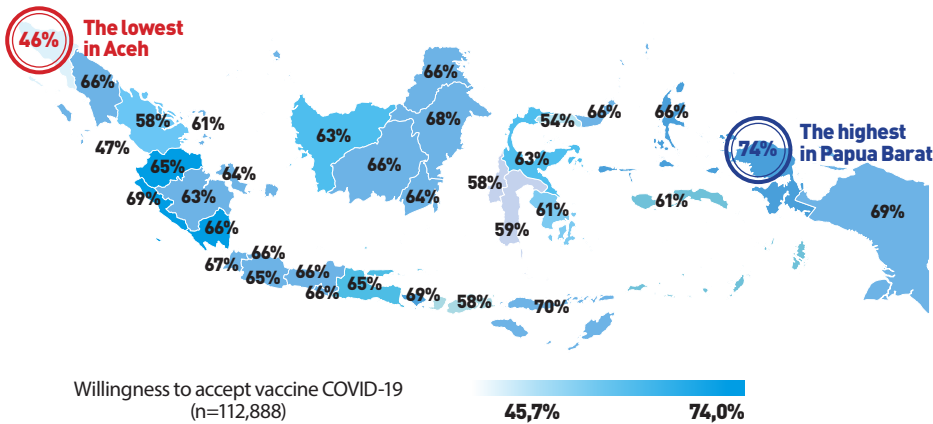
bersama United Nations Children's Fund (Unicef) dan world health organization (WHO) tentang Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 di Indonesia, menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat dinyatakan sebagai Provinsi yang tertinggi presentase masyarakat (74%) yang bersedia menerima program vaksinasi Covid-19.

Sekalipun hasil survei secara nasional Provinsi Papua Barat menduduki persentase tertinggi kesediaan masyarakat menerima program vaksinasi covid-19, namun belum dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan di lapangan menjadi lebih muda. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berinisiatif melakukan berbagai program percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Program-program percepatan diantaranya: (1) Penyiapan sumber daya manusia Kesehatan yang terlatih (Dokter, Perawat dan Bidan yang berkompeten) pada fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi

COVID-19 yaitu Puskesmas, puskesmas pembantu, Rumah Sakit dan bidang Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat telah memberikan pelatihan berkesinambungan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan protokol kesehatan ketat, ruangan vaksinasi, alur layanan, dosis dan cara pemberian vaksinasi, manajemen Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), update perkembangan vaksinasi dan system pencatatan pelaporan satu pintu lewat pcare. (2) Penyediaan cold chain dan alat pemantau suhu. Dinkes Provinsi Papua Barat telah mendata dan memastikan sarana untuk mempertahankan mutu vaksin tersedia dalam kondisi baik dan dalam jumlah cukup di fasyankes. (3) Memastikan vaksin, alat pendukung dan logistik tersedia di fasyankes. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk perhitungan kebutuhan vaksin, Auto Disable Syringe, Safety box, kapas alcohol, kit anafilaktik, kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan lain-lain. (4) Koordinasi dan kerjasama intensif dengan berbagai stoke holder, antara lain dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Dinas Perhubungan

COVID-19 VACCINE ACCEPTANCE BY PROVINCE



untuk distribusi vaksin, logistic, dan alat pendukung lain ke Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota terutama untuk penjangkaun daerah sulit. Kerjasama dengan TNI/POLRI dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 demi menjaga keamanan, baik dalam penyimpanan vaksinnnya, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi serta swipping prokes di masyarkat. (5) Tahapan sosialisasi vaksinasi COVID-19 ke masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Sekolah, Universitas, institusi pemerintah maupun swasta dan lain-lain. Baik sebelum maupun saat pelaksanaan tahapan sosialisasi dilakukan juga koordinasi dengan Dinkes Kabupaten / Kota, TNI / POLRI, Fasyankes dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi massal berkesinambungan. Melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19 lewat media sosial dan turun langsung ke lapangan untuk mengajak masyarakat agar di vaksin. (6) Mendokumentasikan dan menseminasikan tahapan program kegiatan vaksinasi massal di berbagai Kabupateb/ Kota sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas elaksanaan Covid-19 melalui media masa. (7) Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, monitoring harian cakupan vaksinasi COVID-19 dan evaluasi KIPI, dan pemantauan manajemen limbah.

Walaupun berbagai inovasi dan percepatan program penanggulangan Covid-19 sudah dilakukan, namun pada hasilnya dari 34 Provinsi di Indonesia untuk nilai cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat masih sangat rendah yaitu 24 per 100 penduduk sasaran vaksinasi telah menerima dosis 15. Cakupan vaksinasi covid-19 dari 12 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat, berdasarkan data update 28 September 2021 dapat dilihat pada histogram (Gambar 2).

Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki capaian vaksinasi COVID-19 terendah, dimana hanya 0,4% dari total sasaran yang menerima dosis 1. Hal ini tidak terlepas dari faktor wilayah topografis yang sulit dicapai dan pola adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Sementara Kabupaten Manokwari menduduki peringkat teratas dalam pencapaian cakupan vaksinasi COVID-19 (52,59%), dari sasaran penduduk telah menerima dosis 16.

Rapat koordinasi dan evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyimpulkan bahwa rendahnya cakupan vaksinasi Covid 19 di Provinsi Papua Barat disebabkan oleh (1) masyarakat percaya kepada informasi yang menyatakan bahwa vaksin covid 19 dapat menyebabkan kematian, (2) Masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada menghabiskan waktu antrian untuk mempeoleh giliran vaksinasi, dan (3) masyarakat beralasan tidak tersedia transportasi untuk menuju ke tempat vaksinasi. Kepercayaan masyarakat kepada informasi bahwa vaksin covid dapat menyabakan kematian terutama disebabkan oleh maraknya pemberitaan di media sosial yang bersifat *hoaks* dan provokatif. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingx vaksinasi covid 19 untuk menaikkan kekebalan tubuh menjadi salah satu penyebab kepercayaan masyarakat akan berita hoaks tersebut.

Atas dasar hasil evaluasi yang diuraikan di atas, maka Dinas Kesehatan provinsi Papua Barat mengambil langkah inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah dinovasi dimaksud adalah dengan mengajak Dewan Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD, TNI/POLRI, Perusahaan

Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan cakupan vaksinasi di Provinsi Papua Barat,7,8. Komitmen bersama yang disepakati untuk diimplementasikan dalam rangka meningkatkan cakupan vaksinasi covid 19 di provinsi Papua Barat sebagai berikut :

1. Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah kerja Provinsi papua barat wajib mengikuti vaksinasi, untuk pegawai SKPD yang belum mendapatkan vaksinasi dilarang untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kebijakan ini bisa diterapkan di kabupaten/kota
2. Seluruh sektor swasta dan BUMN wajib mendaftarkan pegawainya untuk mendapatkan vaksinasi ke puskesmas terdekat, dan bila tidak segera mendapatkan vaksinasi maka tidak bisa melakukan work from office.
3. Keringanan pajak diberikan untuk semua wajib pajak yang telah di vaksinasi.
4. Masyarakat di wilayah yang sulit transportasi, disediakan transportasi antar-jemput yang bekerjasama dengan POLDA,TNI dan Pemerintah Daerah setempat untuk menjangkau masyarakat (jemput bola).
5. Pemberian sembako bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan vaksinasi.
6. Membentuk satuan tugas khusus penanganan penyebaran berita-berita *hoax*.
7. Menerapkan kebijakan sertifikat vaksin covid 19 sebagai syarat akses pelayanan publik.
8. Mendekatkan layanan vaksinasi dengan tempat kerja dimana petugas kesehatan menjemput bola di kantor-kantor pemerintahan, swasta, swalayan, terminal, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, ikatan kerukunan daerah.

Dengan penurunan status Papua Barat dari Level PPKM 4 sekaligus mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan rekomendasi ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tetap optimis bahwa delapan poin kiat tambahan ini akan mampu menjawab sekaligus meningkatkan target 70% untuk pencapaian cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat pada evaluasi bulan Desember mendatang dalam mewujudkan program perlindungan Papua Barat Sehat.

Penulis : Yustinus Bambang (Dinkes PB)
Editor : Antoni Ungirwalu

Perkuat Pengelolaan Konten Digital Warga Dengan Mata Pena Litbang



Foto bersama Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Peserta Mata Pena Litbang. DOK. BALITBANGDA PB

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat untuk kali kedua, menggelar Pelatihan Membuat Konten Digital pada Juni 2021. Pelatihan ini merupakan bagian dari program Mata Pena Litbangtara yang digagas bersama Bentara Papua sejak 2020.

Pada pelaksanaan tahun ini nampaknya mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya warga yang mendaftar untuk mengikuti proses fasilitasi kelas belajar ini.

Jika pada Tahun 2020, peserta yang mendaftar terdata 42 orang, namun yang diterima mengikuti kelas belajar hanya 26 orang. Namun pada Tahun 2021 ini, warga yang mendaftar meningkat menjadi 124 orang. Kondisi ini menyebabkan perencanaan alokasi peserta berubah. Awalnya direncanakan untuk 30 orang, namun dengan pertimbangan banyaknya peserta, sehingga diambil kebijakan untuk

menambah peserta menjadi 60 orang.

Berita dan video pendek adalah informasi tercepat yang bisa dikabarkan seluas-luasnya. Untuk itu, berita dan video harus dikelola dengan teknik yang tepat dengan teknologi yang ada di tangan, dari mulai mendapatkan bahan, menuliskan atau mengedit hingga menyebarkannya. Prasyarat menulis berita atau membuat video pendek yang aktual, faktual, penting, dan menarik harus dipenuhi.

Materi pembelajaran yang diberikan sangat aplikatif dan mudah diterapkan asal peserta mampu memahami dan mengikuti dengan baik prosesnya. Maraknya informasi yang tersaji di media sosial hingga menumpuknya berita yang menyita perhatian publik, menuntut Pemuda untuk berperan aktif dalam menyajikan berita yang aktual dan faktual, bukan berita palsu yang disebarluaskan.

Media komunikasi lainnya yang populer dan

penting adalah video kreatif. Diharapkan para peserta mampu mengaplikasikan cerita-cerita inspiratif dari dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan membuat konten video yang kreatif melalui handphonenya dan dipublikasikan di media komunikasi yang ada.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani memberikan apresiasi atas kinerja Balitbangda, yang dengan dukungan kerjasama berbagai mitra telah melaksanakan petunjuk dan arahan gubernur dengan baik. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat membuka kegiatan fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021, Senin (14/6/2021) di Mansinam Beach.

Pelaksanaan fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021 bagi pemuda di Papua Barat dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk mempersiapkan para pemuda terhadap perkembangan zaman, terutama teknologi informasi dan instrumentasi digital



yang semakin luas dan cepat.

“Dimana perkembangan media, terutama internet yang menyasar ke berbagai aspek kehidupan dari sekedar catatan harian, berkeluh-kesah, bisnis, pendidikan dan lainnya sebagainya. Kondisi ini sangat mempengaruhi cara hidup manusia saat ini khususnya generasi milenial. Diharapkan agar terampil, cakap dan bijaksana dalam memberi informasi yang baik benar dan bertanggung jawab serta menghindari informasi yang menyesatkan,” tandasnya.

Wagub juga berpesan agar dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan konten-konten digital yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara umum, termasuk mempromosikan potensi unggulan daerah seperti potensi wisata budaya, alam, lingkungan dan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari tanggungjawab bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

“Mohon bantuan semua pihak, terutama lembaga institusi negara dan pemerintah daerah terkait untuk mendukung dan membantu mengembangkan potensi para pemuda generasi milenial kita di Papua Barat, agar mereka lebih kreatif, inovatif, maju dan mandiri dalam menggerakkan perekonomian kita,” harapnya.

Para pemateri dan narasumber dalam kegiatan mata pena ini pun bervariasi, baik dari Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar; Aruminingsih dari Bappenas Republik Indonesia; Prita Laura dari KSP RI, Ridho Slank dan Muhammad Farid dari Econusa.

Grup Band Slank Ridho dan wartawan senior Prita Laura dari KSP RI juga turut memberikan motivasi kepada para peserta
DOK. BALITBANGDA PB



Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si menjelaskan, kegiatan ‘Fasilitas Belajar Konten Digital ‘Mata Pena Litbang Papua Barat’ menghadirkan narasumber dan instruktur untuk memberi pembekalan kepada para pemuda sehingga mengembangkan bakat dan kualitas konten digital dalam menunjang pembangunan dan penyebaran informasi publik.

“Kita mengembangkan potensi mereka untuk menunjang penyebaran informasi terkait pembangunan daerah baik di bidang pariwisata dan lain-lain,” kata Prof. Heatubun.

Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif serta sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perkembangan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat dan luas.

“Setelah kegiatan Mata Pena ini, kita memberi kesempatan kepada para peserta selama enam bulan. Setelah itu akan dievaluasi dan bisa diberi insentif,” ujar penerima penghargaan Pejabat Pratama Terbaik Tahun 2020 ini.

“Prof. Heatubun berharap usai mengikuti program ini, kemampuan para alumni Mata Pena Litbang Papua Barat akan terus meningkat dalam pemanfaatan media sosial, dan menjadi lebih bijak dalam menyebarkan berbagai informasi, sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas melalui media sosial,”

Penulis: Isak Atanay (Balitbangda PB)
Editor: Alberth Yomo

Pembekalan Program Interfaith Rainforest Initiative Indonesia

Chapter Papua Barat

Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia merupakan organisasi prakarsa lintas agama untuk hutan tropis yang merupakan aliansi internasional lintas agama yang membawa urgensi moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya global untuk menghentikan dan memperbaiki penggundulan hutan tropis. Prakarsa ini sebagai wadah bagi semua pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha dalam aksi melindungi hutan tropis dan melindungi masyarakat adat sebagai penjaga hutan.

Prakarsa ini diluncurkan di Nobel Peace Center di Oslo, Norwegia, pada 19 Juni 2017. Peluncuran ini diselenggarakan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, dan dipimpin oleh Raja Harald V dari Norwegia. Prakarsa ini bergerak secara global untuk membawakan suara moral tentang perlindungan hutan ke forum pembuat kebijakan internasional tentang lingkungan, perubahan iklim, masalah masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 30 - 31 Januari 2020, lebih dari 250 pemimpin agama bertemu bersama dengan masyarakat adat, LSM, ilmuwan, pemimpin pemerintah dan PBB serta beberapa organisasi dunia di Manggala Wanabakti Jakarta, meluncurkan program Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis (*Interfaith Rainforest Initiative* – IRI) Indonesia.

Khusus di Provinsi Papua Barat pelaksanaan *launching* belum dapat dilakukan, sementara dalam tahap koordinasi dengan semua pihak dan kesepakatan bersama. Sehingga di Provinsi Papua Barat diawali dengan pembekalan program prakarsa lintas agama untuk hutan tropis Indonesia Papua Barat yang digelar pada Rabu, 23 Juni 2021 di Ruang Pertemuan Mansinam Beach Hotel dan



Sambutan Gubernur dalam kegiatan Pembekalan Program (Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis – Indonesia) Interfaith Rainforest Initiative (IRI) – Indonesia. DOK. BALITBANGDA PB

Resort Manokwari. Penyelenggaraan ini merupakan salah satu bentuk dukungan upaya perlindungan hutan tropis di Provinsi Papua Barat mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Papua Barat, Gubernur Papua Barat yang diwakili wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SE, M.Si, tamu undangan dan peserta kegiatan yang merupakan pimpinan dari organisasi keagamaan yang ada di Provinsi Papua Barat. Secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Penyerahan buku yang prakarsai IRI Indonesia untuk perlindungan hutan yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Papua Barat kepada setiap perwakilan Tokoh Agama Pdt. Shirley Parinussa, S.Th. DOK. BALITBANGDA PB



Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyampaikan materi bagaimana toleransi lintas Agama di Tanah Papua. DOK. BALITBANGDA PB

TAMU UNDANGAN DAN PESERTA	JUMLAH
Forkopimda	29
Tokoh masyarakat	13
Peserta kegiatan Pembekalan Program	40
Total	82

Pembekalan program IRI Papua Barat secara umum bertujuan untuk:

1. Mensosialisasikan program IRI terkait kehutanan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan gerakan masyarakat adat di Provinsi Papua Barat.
2. Mendapatkan dukungan para pihak untuk berkolaborasi dan melibatkan organisasi keagamaan dalam kegiatan kampanye lingkungan dan advokasi masyarakat adat.
3. Memberikan sosialisasi kepada pemuka agama sehingga pemuka agama bisa menggunakan ajaran agama-nya untuk mengajak masyarakat melestarikan lingkungan dan hutan di Indonesia.
4. Mendorong implementasi SDGs, mitigasi

bencana, pandemik di sektor kehutanan.

5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, LSM dan kelompok agama dalam penyelamatan hutan, pemanasan global, keanekaragaman hayati dan masyarakat adat.

Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut antara lain :

1. Tersosialisasi secara baik program IRI kepada pemuka lintas agama untuk melaksanakan kampanye penyelamatan hutan dan lahan, perubahan iklim dan memperkuat hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat.
2. Terbangunnya dukungan dan sinergisitas untuk menjaga kelestarian dan tata kelola alam dan lingkungan yang adil, berkearifan lokal dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
3. Teredukasi secara baik kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan di Provinsi Papua Barat.

Lebih lanjut, Gubernur Papua Barat, menyampaikan bahwa, sesungguhnya prinsip-prinsip Papua Barat sebagai Provinsi konservasi semata-mata untuk melindungi dan mempertahankan bumi dan segala isinya sebagai sebuah karunia Tuhan. Bapak Gubernur berpesan bahwa, bukan kita saja yang punya hak untuk menikmati apa yang

Tuhan limpahkan kepada kita tetapi anak cucu kita ke depan mereka juga punya hak untuk menikmati keindahan hutan, laut dan langit, sehingga komitmen ini perlu dituangkan dalam bentuk yang lebih konkrit sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang fokus pada prinsip pelestarian dan menjaga bumi ini dari degradasi dan deforestasi hutan oleh karena pemanfaatan yang tidak memperhatikan keberlanjutan.

Tentunya kegiatan ini sejalan dengan apa yang disepakati pada event Internasional ICBE 2018 dan Deklarasi Manokwari merupakan momentum bersejarah untuk mendorong terjadinya nomenklatur Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi menjadi Provinsi Pembangunan berkelanjutan. Perubahan ini dimaksudkan tidak terjadi perbedaan tafsir nilai-nilai konservasi dalam kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Khusus Daerah (PERDASUS) Provinsi Papua Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua Barat merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan, ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, tindakan konservasi keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem termasuk peran penge-



Pemaparan materi oleh setiap narasumber pada Pembekalan Program IRI Chapter Papua Barat.
DOK.BALITBANGDA PB

kita hanya perlukan bahwa apa yang kita lakukan adalah kita menjaga hutan kita, bukan hanya bermanfaat bagi diri pribadi atau kelompok yang ada. Ketika terjadi kerusakan hutan, dampak yang terjadi bermacam-macam seperti longsor, banjir, perubahan iklim dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat.

Saat ini beberapa negara-negara maju sedang menghadapi krisis dan perubahan iklim karena naiknya permukaan laut. kondisi ini terjadi karena akibat dari kerusakan lingkungan yang masif. Melalui kegiatan pembekalan lintas pemuka keagamaan dapat memberikan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya untuk melayani dan mengkompanyekan secara utuh untuk lingkungan dan alam di Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan yang istimewa ini. Tentu kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan untuk mewujudkan komitmen sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Hasil kegiatan ini diimplementasikan kepada masyarakat agar ikut berkontribusi menyelamatkan alam dan lingkungan yang lebih adil, berkearifan lokal dan berkelanjutan.

Penulis : Ezrom Batorinding/ Lince Baransano (Balitbangda PB)
Editor : Antoni Ungirwali (Unipa)

lolaan sumberdaya alam yang

Kegiatan Pembekalan ini juga kiranya dapat memberikan rekomendasi karena regulasi PERDASUS, Deklarasi Manokwari dan kegiatan ICBE 2018 lalu, ada komitmen-komitmen yang kemudian dikeluarkan di dalam momentum tersebut. Tentunya kita dihadapkan dengan masyarakat adat, masyarakat agama, masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah dimana ahli atau komitmen-komitmen untuk menjaga tutupan hutan di Papua Barat. Masyarakat adat tentu membutuhkan pelayanan pemerintahan dan juga pelayanan-pelayanan lain. Oleh karena itu model-model pendekatan yang bisa dihasilkan dari program atau kegiatan-kegiatan semacam ini tentu juga menjadi sesuatu yang kelihatan oleh pemerintah daerah sehingga kedepan kita lakukan secara komplit atau secara nyata untuk menyentu masyarakat adat sebagai pemilik sejati dari pada hutan, alam dimana mereka berada.

Komitmen pemerintah ini tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat adat sebagai pemilik sejati wilayah dimana mereka berada entah didalam kawasan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebab mereka juga perlu diinformasikan bahwa

ini sudah menjadi komitmen pemerintah bersama, oleh karena itu mari secara bersama-sama memanfaatkan hutan, laut dan alam secara bijak supaya masyarakat adat bisa hidup tetapi kedepan untuk anak cucu kita, anak cucu mereka, ini juga bisa menjadikan apa yang kita nikmati.

Momentum forum pembekalan program lintas Pemuka Agama adalah momentum yang luar biasa dan bisa ikut memberikan kontribusi, pemikiran, konsep kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan supaya proses ini bisa terus terjaga. Persyaratan yang kami maksudkan tersentu dengan baik kepada masyarakat adat tetapi juga kelestarian lingkungan dan alam terus terjaga. Ini menjadi momentum yang baik,

Tentunya kegiatan ini sejalan dengan apa yang disepakati pada event Internasional ICBE 2018 dan Deklarasi Manokwari merupakan momentum bersejarah untuk mendorong terjadinya komenklatur Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi menjadi Provinsi Pembangunan berkelanjutan.



Penyerahan Master Plan SMA Taruna Kasuari Nusantara dari Tim kerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

DOK. BALITBANGDA PB

SMA TKN - Langkah Visioner Gubernur Papua Barat

Tujuh puluh empat (74) siswa SMA Taruna Kasuari Nusantara (TKN) Papua Barat, telah resmi melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2021 – 2022, momentum ini merupakan jawaban atas kerinduan sekaligus kerisauan Gubernur Papua Barat Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, tentang kualitas SDM di Papua Barat khususnya lulusan SMA. Tidak bisa dipungkiri bahwa fakta selama ini lulusan SMA di Papua Barat khususnya siswa orang asli Papua kesulitan pada saat akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Siswa yang dapat diterima pada kampus-kampus kenamaan di tanah air termasuk sekolah-sekolah kedinasan, bisa dikatakan persentasenya relatif kecil dari lulusan terbaik dari Papua Barat, walaupun ada jalur afirmasi yang merupakan kebijakan pemerintah tetapi sebenarnya jalur ini tidak terlalu berdampak pada kualitas lulusan pendidikan tersebut.

Setiap tahun ajaran baru para orang tua dan siswa berlomba-lomba mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah dengan kualitas dan akreditasi yang baik, dengan harapan bersekolah di sekolah tersebut akan memberi dampak positif bagi masa depan anak dan kualitas sumberdaya manusia. Pertanyaan yang muncul adalah apakah di Provinsi Papua Barat sudah ada sekolah unggulan yang memiliki keunggulan berbeda dengan sekolah-sekolah menengah atas pada umumnya? pasti kita sepakat menjawab tidak ada atau belum ada, untuk itulah Bapak Dominggus Mandacan, sebagai Kepala Pemerintahan di Provinsi Papua Barat mengambil langkah Visioner untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama Orang Asli Papua dengan membangun SMA Unggulan. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia Papua yang unggul dan dapat membangun Provinsi Papua Barat. Percepatan ini dalam

rangka menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Papua Barat diantaranya: masih rendahnya kualitas dan kuantitas lulusan peserta didik yang kompeten dan mampu bersaing, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan, ada kesenjangan penyelenggaraan pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan daerah pinggiran (3T). Model pendidikan unggulan merupakan solusi visioner yang sangat efektif dalam menuntun generasi muda di Papua Barat kepada cita-cita luhur yaitu intelektual/pengetahuan yang dinamis dan berkarakter kebangsaan yang unggul, berakhlak mulia, beriman serta berbudaya. Untuk itu dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut Bapak Gubernur Papua Barat, kemudian menginstruksikan membentuk TIM Kerja pembentukan SMA Unggulan yang terdiri dari lintas OPD yang kemudian berkolaborasi menyusun dan membentuk sebuah SMA Unggulan yang kemudian diberi nama, SMAN Taruna Kasuari Nusantara, SMAN Taruna Kasuari Nusantara merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Papua Barat. Perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam aspek kelembagaan,



Gedung Kantor SMA Taruna Kasuari Nusantara. DOK.BALITBANGDA PB



Ruang Guru SMA Taruna Kasuari. DOK.BALITBANGDA PB

input siswa, kurikulum, guru/pamong dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penjaminan mutu, dukungan masyarakat dan pembiayaan di SMAN Taruna Kasuari Nusantara, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia Papua Barat yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan, sehingga diharapkan menjadi pelaku dan pendukung pembangunan dan menjadi pemimpin masa depan di Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan komitmen Gubernur Papua Barat dalam peningkatan sumberdaya manusia Papua yang kemudian menjadi visi SMAN Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat adalah **“Menyiapkan Sumber Daya Manusia Papua Barat yang Unggul, Berdaya Saing Global, Berkarakter, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”**. Seluruh proses pembentukan SMA N Taruna Kasuari ini dimulai dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia melalui Yayasan Pengembangan Potensial Sumber Daya Pertahanan (PPSPD) yayasan ini merupakan yayasan pengelola SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan bentukan TNI yang banyak menghasilkan lulusan – lulusan terbaik sebagai calon pemimpin di Negeri ini. Sehingga seluruh proses penyusunan dan pembentukan sekolah ini sejalan dengan SMA Taruna Nusantara yaitu ADOPSI, TIRU dan MODIFIKASI sehingga diharapkan akan lahir calon-calon pemimpin Papua Barat di masa depan.

Dalam mempersiapkan cita-cita dan visi peningkatan SDM melalui pendidikan diawali dengan langkah - langkah tindakan strategis dan terukur yang telah dilakukan tepat waktu oleh Tim yang terdiri dari Akademisi, Praktisi pendidikan dan mitra pembangunan, diantaranya: *Pertama*, Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen ini menjadi dasar dari seluruh tahapan penyusunan Kajian dan Riset pembentukan SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, Realisasi rencana Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pendirian Sekolah Unggulan SMA Taruna Kasuari Nusantara telah dipaparkan oleh Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021. Pemaparan Hasil dari studi kelayakan ini menyimpulkan bahwa pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk dilanjutkan termasuk dalam aspek input siswa, kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya pendidik dan siswa serta pendanaannya. *Kedua*, Penyusunan Master Plan SMA Taruna Kasuari Nusantara pada tahapan ini Telah dilaksanakan dengan penyerahan dokumen Rencana Induk (Master plan) dari Penanggung Jawab Penyusunan Dokumen Masterplan kepada Gubernur Papua Barat pada tanggal 25 Mei 2021. Dokumen Rencana Induk Master Plan ini merupakan produk ilmiah yang akan menjadi dasar dalam merencanakan dan mengembangkan SMA Taruna Kasuari Nusantara selama kurun waktu 25 tahun yang akan datang. Diharapkan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam aspek kelembagaan, dukungan masyarakat, input siswa, kurikulum, pamong/guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penjaminan mutu dan pembiayaan pendidikan, maka SMA Taruna Kasuari Nusantara ini dapat berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan di

Provinsi Papua Barat dengan menyiapkan dan menyediakan generasi Papua Barat yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Ketiga, Dokumen berikutnya adalah Kurikulum Operasional SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, dimana telah disusun oleh Tim Penyusunan Kurikulum Dokumen 1 Kurikulum SMAN Taruna Kasuari (SMA TKN), Dokumen 1 Kurikulum ini selanjutnya perlu dilengkapi dengan dokumen 2 yang berisi silabus dari setiap mata pelajaran dan Dokumen 3 adalah kumpulan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari setiap mata pelajaran. Hal ini sangat diperlukan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan manajemen mutu, yaitu semua proses dan prosedur memiliki standar operasional yang jelas, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dalam menghasilkan mutu suatu layanan. Demikian juga dokumen ini sangat diperlukan untuk kepentingan saat penilaian akreditasi sekolah, maka ke 3 dokumen tersebut menjadi salah satu syarat yang selalu harus tersedia. Keempat, Pemaparan Dokumen keempat adalah terkait Riset Sosial Pendirian SMAN Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021, merupakan Riset yang dilakukan untuk pemetaan konflik dalam rangka memastikan pengelolaan SMAN Taruna Kasuari Nusantara berjalan dengan baik, riset ini bertujuan:

- Memberikan informasi masyarakat, orang tua, guru, murid serta OPD terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat tentang sikap dan persepsi terhadap pendirian dan keberadaan SMA Taruna Kasuari di Provinsi Papua Barat
- Mengidentifikasi potensi konflik yang kemungkinan dapat terjadi, baik dari internal dan eksternal SMA Taruna Kasuari Nusantara, serta alternatif pemecahan masalahnya.
- Memberikan informasi tentang potensi pendanaan terhadap SMA Taruna Kasuari Nusantara untuk keberlanjutan SMA Taruna Kasuari Nusantara.

SMA Taruna Kasuari Nusantara yang beralamat di Eks Balai Latihan Kehutanan Manokwari yang kemudian di renovasi untuk dijadikan kompleks sekolah yang terdiri dari



Asrama siswa didik SMA Taruna Kasuari Nusantara. DOK.BALITBANGDA PB



Salah satu ruang kelas SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat. DOK.BALITBANGDA

ruang belajar, kantor, asrama, laboratorium, ruang guru, rumah guru, ruang makan, gudang, tempat ibadah, wisma tamu, lapangan olahraga dan ruang pendukung lainnya serta sarana prasarana pendukung yang semuanya tentu dalam rangka mendukung tujuan SMAN Taruna Kasuari Nusantara untuk mempersiapkan siswa dapat diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan internasional serta perguruan tinggi kedinasan, juga membangun karakter melalui kurikulum umum dan kurikulum

khusus. Kurikulum umum yang dimaksud adalah kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kurikulum K-13, sementara kurikulum khusus adalah pendidikan kebudayaan, kepemimpinan, bela negara, dan wawasan lingkungan. Hal ini menjadi ciri khas dari sekolah ini mengingat kebutuhan di pasar kerja bukan saja tenaga kerja dengan kualitas kognitif yang baik, tetapi juga karakter yang berkualitas. Karakter yang dimaksud adalah disiplin, kemampuan memimpin,



Sekretaris Tim Kajian, Martua Hutabarat saat memberikan pengarahan kepada guru didik dan pengajar. DOK. BALITBANGDA PB

menghargai keragaman suku dan budaya di Nusantara serta memiliki jiwa berwirausaha. Karakter ini akan bertumbuh jika ada pembinaan yang baik dan terus menerus dan hanya dapat dilakukan melalui pendidikan berpola asrama. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat memutuskan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di provinsi ini mulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas. Keputusan untuk memulai pendidikan karakter mulai dari jenjang SMA karena lulusan SMA akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Dari dokumen perencanaan yang dihasilkan berupa Studi Kelayakan, Penyusunan Masterplan, Penyusunan Kurikulum operasional dan Riset Sosial yang dilaksanakan menghasilkan berbagai rekomendasi dan kesimpulan yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak yang berkontribusi langsung terkait kelangsungan proses operasional SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, beberapa diantaranya adalah melengkapi

berbagai sarana dan prasarana pendukung, pengamanan TNI dalam pengembangan karakter siswa, diharapkan penerimaan berikutnya adalah 100 siswa OAP, seleksi dan rekrutmen guru yang menghasilkan guru-guru pilihan terbaik, perlunya sosialisasi ke sekolah – sekolah dan kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat termasuk peran media sosial (facebook, Youtube, Instagram)/website, komitmen dan sinergi semua pihak untuk mendukung SMA Taruna Kasuari Nusantara melalui berbagai kebijakan (MoU, PKS dan Regulasi), membentuk UPT pendidikan khusus, akses program CSR, website, input siswa SMA TKN secara kualitas dan kuantitas perlu keterwakilan setiap kabupaten/kota. Semua ini masih perlu terus dievaluasi dan didampingi dalam meningkatkan kualitas SMA TKN Papua Barat.

Tindakan dan langkah-langkah strategis akan terus dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya, sehingga

sumber daya manusia di Papua Barat khususnya Orang Asli Papua dapat menjadi pelaku-pelaku pembangunan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Ada pepatah mengatakan, *'tidak ada rotan, akar pun jadi*. Namun saya menyampaikan bahwa dalam pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara ini *'tidak ada rotan, harus tetap rotan'*. Artinya kita harus tetap menggunakan sumber daya terbaik yang kita miliki untuk memperoleh hasil yang terbaik pula. Tentu saja, usaha dan kerja keras kita akan sia-sia tanpa kerjasama dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada semua pihak untuk mendukung pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara ini, mari membangun dengan hati dan mempersatukan dengan kasih, sehingga cita-cita bersama kita untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat dapat tercapai.

Penulis : Feri Hurulean (Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding



Awal Yang Baik Untuk Masa Depan Inovasi Provinsi Papua Barat

Innovative Government Award (IGA) merupakan salah satu program Kementerian Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Litbang Inovasi Badan Litbang Kemendagri. Sasaran dari program ini mencakup seluruh inovasi yang ada di lingkup pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya maka akan diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan ini bertujuan memberikan motivasi kepada

pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, mendorong penerapan good governance, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Pengukuran tahun 2020 lalu, Kemendagri berhasil menjangkit sedikitnya 17.779 inovasi dari 484 pemerintah daerah. Namun, dari data yang ada, masih terdapat 58 daerah berkategori tidak dapat dinilai (disclaimer).

Kategori ini didapat karena daerah tersebut tidak melaporkan inovasi daerahnya.

Kepala Badan Litbang Kemendagri Dr. Agus Fatoni, M.Si saat menjadi pembicara kunci dalam acara Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021 secara virtual, Kamis, 8 Juli 2021 berharap bahwa pada tahun ini seluruh pemda dapat melaporkan hasil inovasinya. Lantaran, hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 388 ayat (7).

Dirinya juga mengungkapkan, pada pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah tahun lalu, Kemendagri telah memberikan penghargaan

berupa piagam dan tropi kepada 195 daerah kategori sangat inovatif. Selain itu, di antara daerah tersebut, sebanyak 31 daerah penerima IGA, diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat alokasi dana insentif daerah (DID). Fatoni berharap, berbagai capaian inovasi di daerah tersebut dapat memperkuat kerja sama antar daerah, sehingga hal itu juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal.

Berawal dari menindaklanjuti radiogram Kemendagri No. 002.6/3362/SJ untuk Gubernur, Bupati serta Walikota seluruh Indonesia maka Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) mengambil peran untuk mencoba mengikuti penilaian IGA 2021 tersebut.

Mengawali peran tersebut, Balitbangda Provinsi Papua Barat melakukan berbagai koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, terkhusus bagi setiap OPD yang memiliki Inovasi pada dua tahun terakhir. Untuk mempermudah proses penjangkauan atau pendataan kembali setiap OPD yang memiliki inovasi, Balitbangda secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Barat.

Alhasil dari hasil pendataan kembali serta koordinasi yang dilakukan diperoleh empat OPD yang akhirnya siap untuk menginput data inovasinya ke dalam aplikasi indeks inovasi daerah pada akun IGA Papua Barat 2021. Keempat OPD tersebut adalah Balitbangda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.

Kesembilan inovasi diatas kemudian melalui berbagai tahap verifikasi oleh tim internal IGA Provinsi Papua Barat sebelum akhirnya dilakukan penginputan. Verifikasi dilakukan terhadap 20 indikator yang didalamnya terdapat 5 indikator mandatori yang merupakan indikator wajib karena merupakan laporan atau pertanggungjawaban langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini secara tidak langsung memberikan perintah bahwa setiap inovasi yang ada di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk diinput ke dalam aplikasi indeks inovasi daerah akun IGA Kemendagri.

Hasil yang diperoleh dari penginputan, rata-rata poin yang diperoleh dari setiap inovasi

INOVASI YANG DIINPUT DI DALAM AKUN IGA PAPUA BARAT 2021

No	Instansi	Inovasi	Tahun Penerapan
1.	Balitbangda Provinsi Papua Barat	1. Ilmuwan Muda Papua (IdA Papua) 2. Mata Pena Litbangtara 3. Majalah Kasuari Inovasi (MAKASI) 4. Jurnal Ilmiah Igya ser hanjop (JISH) 5. Buku Kelitbangan dan Inovasi Daerah (BUKLIDA) 6. Jemput Koper (Komunal dan Personal)	2020 2020 2019 2019 2019 2020
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat	1. Mini Cattle Yard Solusi Pelayanan Terpadu (Mc Yard Sipandu) Sapi Potong di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	2019
3.	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat	1. e-Formulir	2019
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat	1. Bapokting Papua Barat	2019

mencapai 90 hingga 110 dari poin maksimalnya 150. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum memiliki data pendukung yang lengkap. Oleh karena itu, harapannya untuk tahun berikut Provinsi Papua Barat dapat mempersiapkan inovasi-inovasi dari setiap OPD yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator pendukungnya, agar dapat memberikan hasil penilaian yang maksimal. Melihat di tahun 2021 ini hanya empat OPD yang berpartisipasi, maka tahun berikutnya diharapkan agar semua OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat bisa berpartisipasi.

Hasil penilaian indeks inovasi daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 0026-5848 tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, Provinsi Papua Barat ditetapkan masuk dalam kategori Provinsi Inovatif dan menduduki peringkat 15 dari 22 provinsi yang termasuk kategori provinsi inovatif. Sedangkan provinsi yang masuk kategori sangat inovatif ada 8 provinsi dan 4 provinsi dengan kategori kurang inovatif.

Hasil penilaian dalam keikutsertaan perdana Provinsi Papua Barat dalam lomba IGA 2021 dan pemberian penghargaan bagi kepala daerah terinovatif kiranya dapat memberikan gambaran terkait kondisi perkembangan

inovasi di provinsi Papua Barat dan sekaligus sebagai pemacu semangat untuk membenahi kekurangan-kekurangan kita dalam mengelola hasil-hasil inovasi dan menghasilkan lebih banyak karya-karya inovatif yang dapat mendukung dan memudahkan pelayanan public kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparat sipil negara.

Dan juga diharapkan ini bisa menjadi model dan contoh untuk kemudian diikuti oleh 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 nantinya, terutama kabupaten/kota yang masih berstatus disclaimer atau tidak dapat dinilai. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui fungsi pembinaan, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif baru dan inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba sampai pada proses keberhasilan uji coba, yang kemudian ditetapkan dengan perda dan perkara untuk selanjutnya akan diimplementasikan di daerah.

| Penulis : Chris Maweikere (Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding



Jembatan Kormun. DOK. BRIAN AYATANOI PB

Menghirup Aroma Mangrove Dari Jembatan Kormun

Bagi warga Manokwari yang mencari tempat wisata di akhir pekan, Jembatan Kormun Wasidori Arfak nampaknya bisa jadi salah satu pilihan. Di tempat ini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan laut dan hutan mangrove di waktu yang bersamaan dengan sekali menoleh.

Hanya dengan berjalan kaki di atas jembatan, para pengunjung sudah dapat merasakan ketenangan jiwa dengan menikmati hembusan angin sepoi-sepoi disertai dengan pemandangan alam yang indah dan menyegarkan mata.

Hutan Mangrove atau bakau merupakan hutan yang tumbuh di air payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Hutan Mangrove mempengaruhi eksistensi ekosistem pesisir pantai, laut, dan menjaga daratan tidak terkena abrasi pantai. Hutan mangrove tidak hanya menjadi wilayah konservasi saja, namun juga menjadi lokasi tujuan wisata bagi para wisatawan untuk berlibur menikmati daerah dengan ekosistem pasang surut tetapi juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menenangkan diri karena hutan mangrove terletak pada lokasi yang tenang.

Salah satu tempat wisata hutan mangrove yang menarik untuk dikunjungi adalah Hutan Mangrove Arfai yang terkenal dengan sebutan Jembatan Kormun Wasidori Arfai. Ini adalah wisata alam lahan basah yang didominasi oleh pepohonan mangrove. surga kecil hijau dengan luas ± 1 hektar,

tempat wisata ini berada disebelah Selatan Kabupaten Manokwari, tepatnya di Arfai I, distrik Manokwari Selatan. Lokasinya cukup mudah dijangkau dengan transportasi umum, kurang lebih 20 menit dari kota Manokwari.

Tempat ini merupakan kawasan Wisata Alam yang dikelola secara pribadi oleh keluarga Obet Ayok Rumburen bersama Yustina Mansim dan dimanfaatkan sebagai usaha pariwisata, selain itu hutan mangrove ini juga dijaga dengan baik sehingga bermanfaat sebagai naungan bagi beberapa spesies flora dan fauna.

Wisata Jembatan Kormun ini juga menawarkan pemandangan alam yang indah yang dapat dinikmati sambil



Jembatan Kormun Wasidori Arfai. DOK. BRIAN AYATANOI



Pemandangan Gunung Arfak dari Jembatan Kormun Wasidori Arfai. DOK. BRIAN AYATANOI



Pemandangan Kota Manokwari dari Jembatan Kormun Wasidori Arfai. DOK. BRIAN AYATANOI

menelusuri jembatan kayu dengan panjang ± 100 meter yang memanjang membelah hijaunya Hutan mangrove, tracking berupa jembatan ini semakin jauh kedalam pepohonan mangrove akan juga menikmati kicauan burung yang menjadikan daerah ini sebagai habitat mereka.

Lokasi ini sangat bagus menjadi tempat wisata rekreasi bagi warga karena dari

jembatan ini kita juga dapat langsung menikmati pemandangan Pegunungan Arfak yang berada di kejauhan, Juga Pulau Mansinam dan Kota Manokwari. Menurut beberapa pengunjung yang datang ke tempat wisata ini, mereka merasa sangat nyaman karena membuat betah.

Jembatan Kormun saat ini sudah banyak menarik minat masyarakat Manokwari

untuk berkunjung ke sana. Dari data yang didapat untuk hari-hari biasa, pengunjung bisa mencapai ±40-50 Orang dalam sehari, sedangkan untuk hari-hari libur pengunjung bisa mencapai ±50-100 Orang. Untuk masuk ke tempat wisata ini pengunjung cukup menyediakan biaya sebesar Rp.10.000,-

Penulis : Brian Ayatanoi (Balitbangda PB)
Editor : Alberth Yomo



Foto bersama penerima Penghargaan Peduli Konsumen. DOK. SOURCEFROMINTERNET

Papua Barat Terima Penghargaan Peringkat Ketiga Peduli Konsumen Se-Indonesia

Pada peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) yang diperingati pada setiap 20 April namun baru dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 di Jakarta. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si didampingi Asisten II bersama kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat berkesempatan langsung hadir pada acara peringatan tersebut.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan kembali memberikan penghargaan kepada 6 daerah peduli konsumen terbaik. Provinsi Papua Barat mendapat penghargaan peringkat ketiga dari 34 Provinsi se-Indonesia. Suatu kehormatan, Gubernur Papua Barat dapat menerima piagam dan plakat penghargaan. Dari hasil yang dicapai secara khusus Disperindag dalam kegiatan yang dinilai oleh Dirjen PKTN ini dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di provinsi Papua Barat. Saat ini sudah kedua kali mendapatkan penghargaan, tahun 2019 di Bandung yang diterima oleh wakil Gubernur Papua Barat dan mendapat juara dua

dan tahun 2021 Papua Barat mendapat juara tiga dari enam Provinsi yang juga mendapatkan penghargaan diantaranya Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Maluku, Jambi dan Nusa Tenggara Barat.

Dasar penilaian sehingga Provinsi Papua Barat dapat memperoleh penghargaan, dicapai melalui beberapa hal yang dilakukan oleh Disperindag Provinsi Papua Barat selama tahun 2017 - 2021 setelah adanya salah satu direktorat dirjen perlindungan konsumen dan tertib niaga sehingga terbentuk bidang standarisasi dan perlindungan konsumen (SPK) kegiatan yang dijalankan adalah membuka layanan pengaduan konsumen melalui media sosial, pembentukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) tahun 2016, pelaksanaan sidak dan pengawasan distribusi kebutuhan pokok di kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat bersama LPKSM dan tim satgas pangan Polda Papua Barat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pelaksanaan edukasi konsumen bagi orang asli papua. Hasil penilaian dari semua kegiatan yang

dilakukan tersebut, maka Provinsi Papua Barat dinilai layak mendapat penghargaan ketiga.

Semoga dengan capaian hasil tersebut diharapkan Papua Barat dapat mempertahankan prestasi bahkan mungkin bisa lebih baik lagi atau naik ke peringkat yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Prestasi ini tentunya juga harus didukung dengan memberikan *reward* dan dukungan anggaran sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan pengawasan menjadi kewenangan provinsi sehingga membutuhkan anggaran dalam pengawasan ke kabupaten kota. Tentunya Disperindag Provinsi Papua Barat akan terus melakukan terobosan dan upaya-upaya serta juga menciptakan inovasi baru untuk terus memberikan edukasi kepada konsumen tentang perlindungan konsumen di Provinsi Papua Barat.

**Penulis : Lince Baransano
(Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding**

MENCARI JALAN KELUAR UNTUK “PERMATA HIJAU” TELUK WONDAMA

Rabu (17/11/2021) pukul 07.00 Wit, sebuah longboat berdinding putih bertuliskan Pertumbuhan Ekonomi Hijau melaju membela Perairan Teluk Wondama menuju Kampung Yomber, yang telak di Pulau Roswar.

Dalam perahu itu duduk Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, Dominggus Masyewi, S.TP, dan empat anggota tim penyusun Master Plan Rumput dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat.

Perahu yang dinahkodai oleh Bansir itu merupakan bantuan program pertumbuhan ekonomi hijau kepada masyarakat di Kampung Yomber untuk membawa hasil usaha budidaya rumput laut. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih 15 menit dari Pelabuhan Wasior untuk sampai pada lokasi pembibitan rumput laut yang diusahakan para nelayan di Kampung Yomber.

Kondisi laut yang tenang dan suasana pesisir pulau yang hijau dan asri menyambut kedatangan tim ini. Melihat kedatangan tim Balitbangda ini, sejumlah warga keluar dari rumahnya dan berkumpul di lokasi pertemuan. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Jhonal Thio, S.Pi yang mewakili Kepala Balitbangda Papua Barat mengaku kaget dengan antusias warga setempat. “Terus terang saya kaget lihat warga berbondong-bondong berkumpul ditempat ini. Karena tujuan kami hanya untuk melihat tempat-tempat yang ditanami rumput laut, bukan untuk gelar pertemuan,” tandasnya.

Namun, situasi yang tidak terduga itu dengan cepat direspon dan dimanfaatkan untuk menggali informasi dari warga tentang upaya yang telah dilakukan dan kendala yang mereka dihadapi dalam membudidayakan rumput laut. Meskipun diguyur hujan lebat, diskusi yang berlangsung di alam terbuka itu

tetap berjalan dengan penuh antusias. Satu per satu warga mulai mengangkat tangan dan memberikan pendapatnya.

“Kami masyarakat di sini, khususnya nelayan rumput laut pada awalnya sangat antusias. Sepanjang pesisir ini, dari ujung tanjung ini sampai ujung tanjung sana (sambil menunjuk dua tanjung yang mengitari), semua tanam rumput laut. Tapi karena harganya tidak sesuai, akhirnya masyarakat patah semangat, dan tidak serius lagi,” kata salah satu tokoh masyarakat Kampung Yomber, Amon Wandou.

Amon berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan instansi terkait lainnya dapat berkolaborasi untuk memajukan usaha budidaya dan pengembangan rumput laut menjadi komoditi yang menjanjikan bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan rumput laut.

Tokoh masyarakat lainnya, Kristian Munuai menambahkan bahwa masyarakat Yomber ingin sekali menggeluti usaha budidaya rumput laut, hanya saja informasi tentang prospek rumput laut ini belum sepenuhnya kami dipahami. Kristian mengharapkan agar informasi lengkap tentang rumput laut ini, khususnya tentang pasarannya dapat disampaikan kepada para petani rumput laut di Kampung Yomber.

“Banyak yang sudah kase tinggal, tapi karena lihat ada satu dua orang yang kerja terus dengan rumput laut, akhirnya masyarakat ikut lagi tanam rumput laut. Hanya saja masalah harga yang kecil ini yang bikin masyarakat malas,” jelasnya.

Tokoh masyarakat Yomber lainnya, Yason Wandou, mantan kepala Kampung Yomber, memberikan saran agar ada kolaborasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan dinas lainnya, sehingga usaha rumput laut ini dapat didukung juga dari dana



kampung atau dana otonomi khusus. “Kami minta agar dana kampung dan dana otsus juga bisa dipakai untuk mendukung usaha rumput laut,” ujar Yason.

Menanggapi keluhan tentang harga rumput laut, Bansir yang merupakan penadah rumput laut dari masyarakat Kampung Yomber, menjelaskan, harga yang ia berikan kepada nelayan rumput laut, itu sudah melalui hitung-hitungan. Sebagai pengusaha kecil, ia harus hitung berbagai pengeluaran hingga rumput laut itu dikapalkan ke Pulau Jawa.

Harga rumput laut kering per kilogramnya bisa naik, kalau masyarakat mampu mampu meningkatkan kuantitas rumput laut. “Kalau dalam sebulan masyarakat mampu menghasilkan 20 ton rumput laut kering, itu bisa mempengaruhi harga. Tapi kalau tidak mampu penuh target, saya yang



Salah satu nelayan di Kampung Yomber saat memisahkan bibit rumput laut. DOK. BALITBANGDA PB

akan kesulitan, karena menanggung biaya operasional dan pengiriman ke Pulau Jawa,” jelas Bansir.

Menanggapi diskusi itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, Dominggus Masyewi, S.TP menjelaskan, bahwa dirinya akan berupaya menjadikan Kampung Yomber sebagai kampung rumput laut. Dengan bantuan master plan yang disusun Balitbangda Papua Barat, dirinya yakin akan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Wondama, khususnya nelayan rumput laut.

Master plan rumput laut Kabupaten Teluk Wondama ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang penanganan rumput laut dari hulu sampai hilir. Peran tiap-tiap lembaga dan dinas

dalam menangani rumput laut ini, sehingga komoditi ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dinas Perikanan sendiri, kata Dominggus Masyewi, pada 2022 akan mulai menerapkan pendampingan yang dimulai dari kelompok kecil berbasis keluarga dan unsur jemaat dalam gereja. Dengan kelompok kecil ini, diharapkan dapat lebih teraktualisasi dan memberikan hasil yang nyata. Dirinya juga akan mengusulkan untuk memberikan bantuan perahu dayung, sehingga dapat digunakan kapan saja, tanpa menggantung pada bahan bakar (BBM).

Dominggus Masyewi, mengatakan penyusunan master plan rumput laut ini sangat penting bagi Kabupaten Teluk Wondama, karena dokumen ini akan menjadi

dasar dan rujukan dalam pengelolaan rumput laut, mulai dari hulu sampai hilir. Ini sangat tepat, karena dari 13 Distrik yang ada di Teluk Wondama, 9 distrik di antaranya memiliki potensi pengembangan rumput laut yang cukup menjanjikan,” ujarnya.

Dominggus menambahkan luasan lahan rumput laut di Kabupaten Teluk Wondama diperkirakan sekitar 150 hektar. Terlulus di Distrik Roswar ada 25 hektar, kemudian 20 hektar di Distrik Rumberpon, 20 hektar di Distrik Windesi, 15 hektar di Distrik Roon, 10 hektar di Teluk Wauri dan sebagian lagi ada di Distrik Wamesa dan Sowepu.

Dinas Kabupaten saat ini fokus pada pembibitan di Distrik Roswar. “Harus ada kebun pembibitan, karena dari kebun ini yang bisa menjawab kebutuhan rumput



Petani rumput laut ketika melakukan pemeliharaan rumput laut di Kampung Yomber.

DOK. BALITBANGDA PB



Kepala Dinas Perikanan Wondama Dominggus Masyewi.

DOK. BALITBANGDA PB

laut. Tahun ini ada perubahan iklim, sehingga mengganggu produksi. Jadi petani hanya fokus pada pembibitan,” jelasnya.

Dominggus menambahkan bahwa sudah banyak dukungan yang diberikan kepada para nelayan rumput laut melalui bantuan peralatan dan sebagainya dari Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama dan dukungan dari mitra lainnya. Hanya saja akibat kurangnya pendampingan, pengembangan rumput laut ini berjalan lambat. Diharapkan Lewat dukungan Balitbangda Papua Barat dan mitra pembangunan lainnya melalui penyusunan master plan, dirinya akan mengusulkan program pendampingan petani rumput laut mulai dari hulu sampai hilir, pembentukan tim terpadu pengembangan rumput laut yang terdiri dari lintas instansi oleh Bupati Kabupaten Teluk Wondama.

“Rumput laut ini komoditi unggulan di Kabupaten Teluk Wondama, jadi harus ada kolaborasi semua dinas. Kita tidak bisa jalan sendiri, harus pakai sistem keroyok oleh semua instansi, agar hasil dari program rumput laut ini bisa nyata,” tandasnya.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si melalui Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Jhonal Thio, S.Pi menyambut baik respon dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama dalam memberikan informasi terkait pengembangan rumput laut di Teluk Wondama.

Hal ini menjadi penting guna memperkuat penyusunan master plan rumput laut di Teluk Wondama yang merupakan program penelitian dan pengembangan perikanan dan kelautan di Balitbangda Papua Barat,

sesuai dengan hasil kajian inventarisasi komoditas unggulan di Provinsi Papua Barat yang telah dilakukan tahun sebelumnya.

“Tim ahli dari Balitbangda Papua Barat sedang menyusun master plan rumput laut dan kunjungan kali ini untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data dan memperbaharui informasi tentang perkembangan komoditi rumput laut di Kabupaten Teluk Wondama,” kata Jhonal Thio.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Ir. Hendrik S. Mambor, MM menyatakan akan mendukung penyusunan Master Plan Rumput Laut Kabupaten Teluk Wondama yang dikerjakan Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama tim ahli. Pernyataan dukungan ini disampaikan Bupati Mambor usai menerima tim Balitbangda Papua Barat di Wasior, Selasa, 16 November lalu.

“Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Teluk Wondama menyambut baik program ini dan sangat bersyukur karena Balitbang mau hadir membantu penyusunan master plan rumput laut,” kata Bupati Hendrik Mambor.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan bersinergi dengan Balitbangda menyelesaikan penyusunan dokumen ini, sehingga dirinya berharap tidak hanya sebatas pada dokumen, tapi hasil kajian itu dapat diterapkan menjadi kegiatan-kegiatan yang nyata bagi masyarakat di Teluk Wondama.

Bupati Kabupaten Teluk Wondama ini juga menegaskan, bahwa dirinya bersama Kepala Bappeda telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan rumput laut sebagai Permata Hijau Teluk Wondama, yang akan dimulai pada Tahun 2022.

Mambor berharap hasil master plan rumput laut ini kedepannya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat di kampung-kampung. “Apapun yang diperlukan oleh Balitbangda Papua Barat, kami akan dukung,” tandas Bupati yang terpilih lewat jalur independen ini.

Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Yance de Fretes



DIRGAHAYU

PROVINSI PAPUA BARAT KE - 22 Tahun

**“Membangun Dengan Hati, Mempersatukan Dengan Kasih
Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat”**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Pimpinan dan Seluruh Staf
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Mengucapkan

SELAMAT MERAYAKAN

123TH Hari Jadi Kota
MANOKWARI
1 Januari 1993 - 1 Januari 2023

MANOKWARI UNTUK SEMUA, SEMUA UNTUK MANOKWARI

Konferensi Internasional dan Rakornas KOBi Hasilkan Lima Rekomendasi

Konferensi Internasional dan Rapat Koordinasi Nasional Konsorsium Biologi Indonesia (KOBi) yang diselenggarakan Universitas Papua pada akhir November 2021 menghasilkan lima rekomendasi.

Lima rekomendasi itu antara lain, pertama Perguruan Tinggi bertanggungjawab terhadap eksistensi keanekaragaman hayati di Papua. Kedua, perlu meningkatkan jejaring stakeholder dan kapasitas peneliti dibidang biologi. Ketiga, perlu ada *collective action* untuk perlindungan biodiversitas melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pendirian *Natural History Museum* di Manokwari. Rekomendasi ke-empat adalah KOBi perlu membuat “Gerakan Sadar Konservasi” berbasis kearifan lokal. Kelima, pelaksanaan Konferensi Internasional KOBi tahun 2022 diusulkan di Manado.

Sebelumnya Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si saat membuka kegiatan itu mengatakan, ilmu pengetahuan merupakan dasar dalam kegiatan konservasi dan dasar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Karena itu menjadi penting untuk dikuasai dan dikembangkan.

Hal ini dikatakan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si saat membuka Konferensi Internasional dan Rakornas Konsorsium Biologi Indonesia (KOBi) secara daring dan luring di Manokwari, Rabu(24/11/2021).

Gubernur berharap melalui konferensi ini dapat memberikan masukan yang berarti dan menjadi katalis bagi pemerintah daerah dan seluruh mitra pembangunan. Konferensi ini juga dapat mengarahkan dan menyelaraskan program pembangunan dengan kegiatan konservasi untuk menjaga kekayaan alam Papua yang tak ternilai demi bumi dan masa depan manusia yang hidup di

atas Tanah Papua.

“Jangan kita mewariskan air mata bagi anak cucu, tapi kita harus mewariskan mata air bagi anak cucu kita”, ucap Sekda Papua Barat yang menegaskan kembali pesan Gubernur Papua Barat yang selalu disampaikan dalam setiap kesempatan.

Sebelumnya Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Prof. Dr. Budi Daryono dalam sambutan, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Papua yang dengan berani menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi bertaraf internasional. Dirinya berharap konferensi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang penting bagi Indonesia dan secara khusus Tanah Papua yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sesuai dengan tema “Membangun Optimisme Pasca Pandemi Covid-19; Pelestarian dan Pemanfaatan Biodiversitas untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”.

Sementara itu, Rektor Universitas Papua, Dr. Meky Sagrim, SP.,M.Si dalam penyampaiannya minta agar konferensi ini memberikan manfaat bagi Universitas Papua, baik secara langsung kepada para dosen dan mahasiswa, tapi juga bagi Universitas untuk menjadi Universitas yang berdaya saing. “Lebih penting lagi, konferensi ini memberikan sumbangan pemikiran bagi kemaslahatan umat manusia” tandasnya.

Rektor Unipa juga menyatakan, saat ini semua mata dunia tertuju ke Tanah Papua, karena itu kesempatan konferensi ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan target-target *Sustainable Development Goals* (SDG’S).

Ketua Panitia, Dr. Keliopas Krey, S.Pd, M.Si dalam laporannya mengatakan tujuan konferensi ini yang pertama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara global untuk kemaslahatan umat manusia, kedua untuk meningkatkan daya saing riset unggulan dan publikasi ilmiah



dalam bidang biodiversitas dan biosistemika, konservasi sumber daya alam dan lingkungan, biologi molekuler dan bioteknologi, mikrobiologi dan kesehatan serta bioantropologi.

Tujuan ketiga, lanjut Dr. Keliopas, membina kerjasama antar institusi riset, peneliti, akademik, pemerintah dan lembaga swasta dalam mendorong upaya perlindungan plasma nutfah Tanah Papua, dan ke-empat mendorong partisipasi para peneliti muda untuk mengaktualisasi kemampuan dan pengalaman deseminasi ilmiah pada level internasional.

Konferensi ke-4 KOBi yang diselenggarakan selama dua hari ini, kata Krey menghadirkan sembilan pembicara utama dari dalam dan luar negeri, yaitu Prof. Dr. Charlie D. Heatubun dari Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Jatna Supriyatna dari Universitas Indonesia,



Sekda Papua Barat Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si didampingi Kabalitbangda dan Rektor Unipa saat pembukaan Konferensi Internasional KOB1. DOK. BALITBANGDA PB

Victor Nikijuluw, Ph.D dari Conservation International, Ir. M.J Sadsoeitoeboen, M.Si dari Universitas Papua, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Billy Mambrasar, Dr. Robert Hewat dari National University of Kamboja, Prof. Eric Smith dari University of Texax, Dr. Sebastien Allard dari Curtin University Australia dan Yanuaris Dumutu, S.Si dari PT. Freeport Indonesia.

“Juga ada 100 naskah yang terdaftar pada sistem, yang teridentifikasi berasal dari 51 institusi dan 38 Universitas di dalam dan luar negeri. Sementara peserta non presenter sebanyak 200 orang” jelasnya.



Mengakhiri laporannya, Dr. Krey menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para sponsor, yakni Gubernur Papua Barat, Balitbangda Papua Barat, Conservation International, PT. Freeport Indonesia, dan Konsorsium Biologi

Indonesia hingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Penulis: Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor: Keliopas Krey



Balitbangda Dorong Percepatan Regulasi *Mooring System*

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), bekerjasama dengan Conservation International, Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua, PT. EON Engineering dan Raja Ampat Research and Conservation Centre (RARCC) akan mendorong percepatan pembangunan Papua Barat Mooring Sistem (PBMS). Hal ini terungkap pada Workshop Mooring Sistem yang berlangsung di Manokwari, Selasa(23/11/2021).

Inisiatif mendorong PBMS ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pengrusakan terhadap ekosistem karang yang dilakukan

oleh kapal-kapal wisata. Jika hal ini dibiarkan, cepat atau lambat keanekaragaman hayati perairan Raja Ampat akan terganggu.

Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si menjelaskan, *mooring system* adalah sistem penambatan perahu atau kapal di perairan laut yang memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem karang. Jika sistem ini tidak segera dikelola dengan baik, maka dapat mengancam populasi karang di Raja Ampat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan kapal-kapal yang masuk ke perairan Raja Ampat.

Dikatakan, Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan menjabarkan kegiatan aktivitas pembangunan dengan berpijak pada hasil Deklarasi Manokwari yang lahir dari kegiatan ICBE, maka *West Papua Mooring System* perlu mendapat dukungan semua pihak. Sehingga tidak hanya berlaku bagi Kabupaten Raja Ampat, tapi juga bagi seluruh kawasan perairan di Papua Barat.

Meity Mondong selaku pemimpin program Conservation International di Papua Barat mengatakan, sistem tambatan perahu penting dikerjakan untuk menghentikan kerusakan terumbu karang karena jangkar.



Suasana Pertemuan Pembahasan *Mooring System* bersama Mitra Pembangunan.

Sistem ini harus dikelola secara profesional, ada perawatan, dan ada pendanaan berkelanjutan.

Max Ammer dari Raja Ampat Research and Conservation Centre (RARCC) juga mengungkapkan fakta yang mereka temui di Raja Ampat. Dikatakan, banyak sekali kerusakan karang yang terjadi akibat jangkar karang yang dibuang seenaknya. “Paling tidak satu kasus tiap bulan. Jangkar dibuang tanpa tambatan,” jelasnya.

“Ada satu *site dive* di Raja Ampat yang sangat indah dan memiliki 374 jenis ikan yang dapat dilihat dalam satu kali menyelam. Sebuah kapal dengan nama Anakonda 2, membuang jangkar. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada sesuatu yang dilakukan, agar tempat ini jangan sampai rusak,” harapnya.



Mark Erdman dari Conservation International via zoom ikut memberikan dukungan. Dijelaskan, Papua Barat sebagai pusat keanekaragaman hayati, jadi sangat wajar membangun sistem tambatan perahu.

“Tahun 1997 di Bunaken itu menjadi isu yang sangat penting. Bedanya di Bunaken sekocinya kecil. Sementara di Papua Barat, di Raja Ampat itu kapal-kapal besar. Ketika jangkar di lepas pada kedalaman 50 – 100 meter bisa merusak karang. Apalagi pada lokasi yang dangkal di bawah 10 meter,” tandasnya.

Sementara itu, Wick Alliston dari PT. EON Engineering berharap sistem ini harus didukung dengan regulasi yang menyatakan setiap kapal tidak boleh membuang jangkar sembarangan, tapi harus mengikuti aturan. “Buat sistem yang hebat kalau tanpa perawatan itu juga tidak bisa. Jadi harus ada biaya perawatan juga. Ini sudah sangat wajar

dan wajib di bangun di Papua Barat,” tegasnya.

Kasus kerusakan karang terus terjadi di Raja Ampat, padahal itu pusat pariwisata. Ketertarikan wisatawan ke Raja Ampat makin tinggi. Pemerintah mengizinkan 66 kapal per tahun, juga membuka izin *single trip*. Hampir 170 kapal besar yang teridentifikasi yang keluar masuk Raja Ampat.

Banyak pihak ingin berkontribusi mendukung *Mooring System* di Papua Barat, namun masih kesulitan menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Jadi, diharapkan melalui workshop ini dapat menghasilkan ide-ide yang dapat menjadi aksi nyata untuk mewujudkan *West Papua Mooring System* melalui pembentukan kelembagaan dan pendukung lainnya.

Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding



Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si saat memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Transfer DAU Memperhitungkan Luas Tutupan Hutan di The Sultan Hotel Jakarta.
DOK. BALITBANGDA PB

Kaukus Mendesak Transfer DAU Memperhitungkan Luas Tutupan Hutan

Empat provinsi dan empat kabupaten yang memiliki luas wilayah hutan terbesar di Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memasukkan luas tutupan hutan menjadi bagian dalam perhitungan transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kami yang berkumpul di Jakarta hari ini, mewakili daerah bertutupan hutan terluas mendesak usulan luas wilayah tutupan hutan daerah menjadi bagian penghitungan transfer DAU ke daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) dengan menyebutkan luas wilayah tutupan hutan dalam UU HKPD,” tegas Bupati Gayo Luwes - Aceh, H. Muhamad Amru, MSP, yang mewakili Kaukus Daerah Bertutupan Hutan, membacakan seruan bersama itu di Hotel Sultan Jakarta, Selasa(30/11/2021).

Dikatakan, saat ini Rancangan Undang-Undang HKPD sedang di bahas di DPR RI. Jika diperlukan, Tim Kaukus Daerah Bertu-

tupan Hutan bersedia untuk diikutsertakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU HKPD.

Dr. M. MUSAAD, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua mengatakan, Provinsi Papua telah sepakat dan berkomitmen tidak hanya lewat ucapan tapi sudah tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan bahwa Papua menjamin ketertutupan hutan sampai dengan 90 persen. Ada 30,5 Juta Hektar luas hutan di Papua (23,1 persen luas tutupan hutan di Indonesia).

“Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung aksi perubahan iklim. Jadi apa yang dibicarakan hari ini adalah bagian dari upaya mendukung kebijakan itu,” tandas MUSAAD.

Kata MUSAAD, sebagian besar orang asli Papua hidup di hutan. Karena itu kebijakan untuk melindungi hutan demi mendukung aksi perubahan iklim dunia, jangan mengabaikan nasib mereka. Karena itu,

kebijakan transfer DAU dengan memasukan luas tutupan hutan sebagai instrumen perhitungan, adalah salah satu solusi yang harus diwujudkan.

Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya manusia dan hubungan kerjasama, Drs. Bukhari, MIM, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif memasukan luas tutupan hutan sebagai indikator perhitungan transfer DAU. “Perlindungan hutan ini juga memerlukan dana, disamping itu hutan juga merupakan sumber kehidupan manusia. Jadi kami sangat mendukung inisiatif ini,” tandasnya.

Gubernur Kalimantan Utara, yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hamsi juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini. “Kaltara 80 persen wilayahnya itu hutan. Tapi kami mengalami penurunan DAU dari tahun ke tahun. Meski demikian, Gubernur Kaltara mengambil kebijakan transfer dana berbasis ekologi kepada Kabupaten/Kota di Kaltara.

Tujuannya agar tutupan hutan ini tetap dijaga. Jadi, kami dukung inisiatif ini dan berharap ada perhatian yang lebih serius bagi kami-kami yang punya hutan ini," ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si dalam pemaparannya mengatakan bahwa provinsi dan kabupaten yang menjaga hutannya sangat layak untuk diberi penghargaan. Karena itu, dirinya berharap inisiatif ini dapat diterima oleh DPR RI dan dapat menjadi bagian pembahasan penting yang dimasukkan dalam RUU HKPD.

Bupati Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Gabriel Asem, SE, M.Si mengatakan, Tambrauw adalah salah satu kabupaten konservasi di Papua Barat yang memiliki tutupan hutan terluas di Provinsi Papua Barat. Namun di dalam Kabupaten ini ada banyak masalah, baik kondisi infrastruktur, keterbatasan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Momentum ini penting, sehingga ada formula yang dapat dihasilkan untuk mengintervensi DAU dengan pertimbangan luas tutupan hutan. Kita konservasi Kabupaten Tambrauw, tapi kita butuh biaya untuk merawat, biaya untuk tetap memastikan keberlanjutan masyarakat adat menjaga hutan di daerahnya. Inilah yang kita pikir dan diperjuangkan.

Karena itu, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan luasan luas wilayah hutan, usulan ini harus dipertimbangkan.

Kita bilang masyarakat jaga hutan, tapi mereka harus dapat sesuatu. Tanah adalah ibu bagi orang Papua. Kita juga dorong pariwisata alam berkelanjutan dan bangun energi terbarukan, bagaimana memaksimalkan potensi alam yang dimiliki masyarakat.

Bupati Luwu Utara, Sulsel Hj. Indah Putri Indriani, SIP, M.Si ikut mendukung kebijakan ini dengan memberikan beberapa usulan kebijakan transfer fiskal, antara lain, pertama adalah diperlukan skema transfer fiskal sebagai insentif ke daerah yang memiliki tutupan hutan luas dan atas kinerja dalam

pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kedua, instrumen pengalokasian anggaran melalui skema transfer anggaran yang sudah berjalan seperti DAU, DID, DAK, DBH dengan mereformulasi skema transfer ke daerah dengan menambah kriteria dan indikator ekologi.

Ketiga, formulasi DAU pada komponen kebutuhan fiskal dengan variabel indeks luas wilayah diusulkan penambahan luas tutupan hutan sebagai salah satu indikator.

Empat, pada formulasi DID diperlukan penambahan indikator baru yaitu indikator lingkungan hidup yang cukup universal yang dapat dipenuhi oleh semua daerah.

"Saya berharap ini diperjuangkan bersama, agar apa yang menjadi harapan bersama ini dapat teralisasi," tandasnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Kalbar, Wahyu Hidayat, ST juga sangat mendukung inisiatif yang dimulai dari Papua Barat ini. Dirinya mengaku prihatin ketika penjaga hutan diabaikan. "Penjaga Taman Nasional saja tidak diperhatikan. Jadi saya berharap ada hasil yang bisa dicapai dari forum ini," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, SH, M.Si

ketika membuka kegiatan ini mengatakan, persoalan pengelolaan hutan seperti jam tangan, terlihat simpel dengan hanya tiga jarum yang berputar, tapi mesin di belakang yang tidak terlihat mata dengan komponen rumit dan kompleks yang menentukan ketika jarum itu bergerak.

Ketiga jarum itu, kata Lakotani, mewakili *leadership* dan SDM yang tangguh, tata kelola yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dan yang terakhir pendanaan yang berkelanjutan. "Semoga komponen ini dapat kita perkuat sebagai salah satu solusi pembangunan kehutanan di provinsi-provinsi dengan tutupan hutan tinggi," ujarnya.

Dijelaskan, menyusun undang-undang membutuhkan waktu dan pembahasan yang lama. Tantangan besar ini dapat dihadapi dengan bersatu meyakinkan bahwa melindungi dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan didukung dengan pendanaan yang cukup dan berkelanjutan sehingga undang-undang ini akan memihak kepada keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Mohamad Lakotani berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan langkah-langkah bersama dalam upaya dukungan pendanaan kepada provinsi dan kabupaten ber hutan melalui pembahasan RUU HKPD ini.



Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si turut hadir pada Workshop Transfer DAU Memperhitungkan Luas Tutupan Hutan di The Sultan Hotel Jakarta. DOK. BALITBANGDA PB

Adapun tiga tujuan pertemuan membahas RUU HKPD, yaitu pertama, menyampaikan kepada pemerintah aspirasi provinsi dan kabupaten dengan wilayah tutupan hutan tentang masukan untuk perbaikan RUU HKPD berkaitan dengan dana alokasi umum mempertimbangkan luas wilayah tutupan hutan daerah

Kedua, mendengarkan dan mendiskusikan pandangan pemerintah bersama Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan ilmuwan (Badan Riset dan Inovasi Nasional), tentang aspirasi provinsi dan kabupaten dengan wilayah tutupan hutan dari seluruh Indonesia untuk perbaikan DAU dalam RUU HKPD.



Bupati Tambrauw Gabriel Asem, SE, M.Si saat berdiskusi dengan CEO EcoNusa Foudation Bustar Maitar disela-sela kegiatan workshop. DOK. BALITBANGDA PB

Ketiga, menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bersama untuk RUU HKPD. Pada saat ini, DPR-RI tengah membahas RUU HKPD yang akan mengatur Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah ke depan, menggantikan pengaturan DAU saat ini. DPR RI akan merevisi UU terkait DAU termasuk merevisi rumusan, cara dan indikator penghitungan kemampuan fiskal, kebutuhan fiskal, dan celah fiskal daerah dalam DAU. RUU HKPD merupakan usulan pemerintah kepada DPR RI. Perampungan RUU HKPD melibatkan DPD RI dalam proses tripartit.

Revisi UU HKPD ini adalah kesempatan baik bagi daerah yang memiliki wilayah tutupan hutan, seperti Provinsi Aceh,

Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. Juga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumbar), Pesisir Barat (Lampung), Kutai Barat (Kaltim), Murung Raya (Kalteng), Kapuas Hulu (Kalbar), Morowali (Sulteng), dan Kolaka (Sultra).

DAU dalam UU HKPD nanti berpeluang untuk memenuhi *keadilan fiskal* dan *keadilan ekologis* bagi daerah-daerah dengan tutupan hutan. Tentang keadilan fiskal, seperti ditunjukkan di atas, tutupan hutan dalam perhitungan DAU menurunkan ketimpangan fiskal antar daerah (baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota). Terkait keadilan ekologis, ini adalah bentuk pengakuan (*recognition*) atas sumbangan daerah dengan tutupan hutan

bagi kebaikan kita bersama. Dengan DAU yang mempertimbangkan tutupan hutan, pengakuan tersebut dapat diwujudkan dengan menutup celah fiskal daerah-daerah dengan tutupan hutan tersebut melalui peningkatan kemampuan fiskal mereka dalam mengimbangi naiknya kebutuhan fiskal mereka untuk menjaga tutupan hutan.

“ Kalau komitmen kita kuat dan bersama kita dorong, maka bukan hal yang mustahil untuk diterima oleh Pemerintah Pusat. Ini penting, bukan saja dalam hal DAU, tapi juga untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang,” ujar Lakotani.

Sonny Mumbunan, Ph.D dari Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) dalam pengantarnya mengatakan, ada sejumlah problem yang dihadapi provinsi dan kabupaten dengan luas tutupan hutan, pertama, kemampuan fiskalnya cenderung menurun.

“Jadi semakin luas hutan, kemampuan fiskalnya menurun. Pada saat bersamaan, kebutuhan fiskalnya meningkat, terutama daerah dengan luas tutupan hutan sangat tinggi,” ujarnya.

Problem kedua, celah fiskalnya melebar. Karena kebutuhan fiskalnya meningkat, sementara kemampuannya menurun. Daerah tidak bisa buka untuk sawit dan batubara misalnya. Ini yang perlu ditangkal untuk DAU ke depan.

Tapi kabar baiknya, lanjut Sonny, kalau tutupan hutan dipertimbangkan dalam DAU. “Ini hasil simulasi kami, 100 persen sama dengan yang digunakan Kementerian Keuangan dalam empat-lima tahun, Kemudian kami gunakan data tutupan hutan KHLK, maka setiap penambahan proporsi tutupan hutan, ketimpang fiskal antar daerah, kabupaten/kota maupun provinsi turun. Ini menggunakan indeks Williamson yang biasa digunakan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Setelah pengantar dari Sonny Mumbunan, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan lima narasumber, diantaranya dari Papua Barat yang diwakili Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani dan Provinsi Papua yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua mewakili Gubernur Papua, M.Musaad.

Sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, SE, M.Si, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Gayo Lues Aceh, Gubernur Aceh diwakili oleh Asisten 1, Wakil Ketua Komisi XI, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua mewakili Gubernur Papua, Staf khusus kementerian keuangan, Bupati Kapuas Hulu diwakili oleh Asisten 2, Bupati Luwu Utara dan Senator Papua Barat, Filep Wamafma dan sejumlah pimpinan LSM nasional.

| Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Jimmy F Wanma (Unipa)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan *the Governors' Climate and Forest (GCF) Task Force, Norway's International Climate and Forests Initiative (NICFI)* dan Yayasan Bumi Eka Lestari menggelar Pelatihan Program Web Platform Mitra Pembangunan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si mengatakan, kata koordinasi ini seringkali mudah diucapkan tapi ternyata sulit untuk dilaksanakan. "Kita berharap dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, teknologi digital berbasis web ini dapat memudahkan koordinasi karena kemajuan dan inovasi serta tantangan yang sering disampaikan secara lisan, sekarang saatnya semua tertulis dan dapat dibaca oleh publik melalui web ini," jelas Prof. Heatubun.

Diikatakan, platform ini akan menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas untuk pertanggung jawaban ke publik terkait apa yang telah dikerjakan bersama. Bahkan, dengan web ini mudah-mudahan membuat koordinasi jadi lebih mudah dan membuat kita lebih maju.

"Ini salah satu langkah maju yang bisa kita tunjukkan. Walaupun Papua Barat jauh, tapi untuk hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan hutan, koordinasi dan sinkronisasi maupun kolaborasi, kita menjadi yang terdepan," tandasnya.

Prof. Heatubun juga menegaskan, bahwa Balitbangda Papua Barat termasuk yang paling progresif, karena kekuatan Balitbangda maupun Papua Barat sebenarnya adalah kemitraan atau kolaborasi, dan ini adalah sesuatu yang menjadi pembeda dengan daerah lain. Pernyataan Prof Charlie ini mendukung pepatah "*if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together*".

"Mitra pembangunan di Papua Barat dapat menggunakan platform ini dengan baik untuk kita saling bertukar informasi. Sekaligus juga sebagai sarana monitoring dan evaluasi tentang kerja-kerja kita di Papua Barat, terutama mewujudkan butir-butir dari Deklarasi Manokwari," ujar Kepala Balitbangda Papua Barat ini.

Prof. Heatubun juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada GCF dan teman-teman



Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si didampingi Indonesian Coordinator GCF Task Force, Delon Marthinus saat membuka Pelatihan Program Web Platform Mitra Pembangunan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/12/2021). DOK. BALITBANGDA PB

Mitra Pembangunan di Papua Barat Miliki Web Koordinasi Bersama



mitra lainnya yang telah menyumbangkan web platform dalam rangka koordinasi dan harmonisasi mitra pembangunan sebagai bagian dari proses percepatan implementasi kesepakatan Deklarasi Manokwari.

Indonesian Coordinator GCF Task Force, Delon Marthinus menambahkan, bahwa inisiatif pembangunan *web platform* di Papua Barat adalah untuk mengkordinir, menghimpun semua informasi terkait inisiatif dan program kerja mitra pembangunan di Papua Barat. Harapannya para admin pengelola web dari Balitbangda dan para

mitra dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, sehingga web bersama ini dapat bermanfaat bagi semua.

"Ini adalah media komunikasi bersama untuk menghadirkan berbagai informasi dari hasil deklarasi manokwari dan strategi pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Semoga platform ini bermanfaat untuk mengawal inisiatif bersama," tandasnya.

Penulis : Alberth Yomo
Editor : Antoni Ungirwalu (Unipa)

Balitbangda, WRI dan Econusa Bidik Skema Pendanaan Lain untuk Papua Barat



Kepala Balitbangda ketika memberikan sambutan pada acara workshop kegiatan Opsi Skema Pendanaan Lain untuk Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan *World Resources Institute* dan Yayasan Econusa saat ini sedang berupaya mencari opsi skema pendanaan lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Upaya ini merupakan salah satu yang disepakati dalam Deklarasi Manokwari yang diluncurkan pada Oktober 2018.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun,

S.Hut, M.Si mengatakan persoalan klasik yang dihadapi dalam pembangunan adalah tentang pembiayaan atau pendanaan. “Waktu dan sumber daya manusia siap, tapi kalau pendanaan tidak ada, ini juga akan susah. Jadi ini sangat penting untuk dibahas,” kata Prof. Heatubun saat membuka Workshop Opsi Skema Pendanaan Berkelanjutan Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Senin(6/12/2021).

Sistem penganggaran yang berlaku dalam pemerintahan sekarang sifatnya bukan *multi years*, sehingga ini menjadi hal yang sulit, karena pertanggung jawabannya

harus selesai juga pada tahun anggaran itu.

“Karena itu, kita coba cari model sistem penganggaran yang berkelanjutan dan fleksibel, sehingga dapat membiayai kegiatan-kegiatan berkelanjutan,” tandas penyandang predikat Profesor termuda di Universitas Papua ini.

Pendanaan berkelanjutan, sambung Prof. Heatubun, telah menjadi isu utama, sehingga ini perlu diseriisi. Hasil kajian terkait opsi skema pendanaan ini selanjutnya akan didorong untuk menjadi kajian naskah akademik, untuk

“Waktu dan sumber daya manusia siap, tapi kalau pendanaan tidak ada, ini juga akan susah. Jadi ini sangat penting untuk dibahas.”

kemudian dibuat regulasinya. “Pendanaan abadi secara yuridis dimungkinkan, tinggal ditindaklanjuti saja,” tandas Prof. Heatubun.

Workshop ini, kata Prof. Heatubun, merupakan kesempatan baik untuk berdiskusi dengan para pihak yang berpengalaman, sehingga di masa mendatang, institusi dan lembaga lainnya di Tanah Papua dapat menjangkau sumber-sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah.

“Terima kasih kepada WRI dan Econusa, semoga apa yang dihasilkan hari ini membawa manfaat bagi pembangunan berkelanjutan dan orang asli Papua untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan,” tutup Peraih ASN Pejabat Pratama Teladan se-Indonesia Tahun 2020 ini.

Sekadar diketahui pemateri dalam kegiatan workshop ini antara lain, Muhammad Farid (Senior Advisor di Yayasan Econusa), Mercyta Jorsvinna Glorya (Peneliti dari WRI), Sita Primadevi (Peneliti dari WRI), dan Christina Julianti Siahaan (Fundraising team dari Yayasan Econusa). Workshop ini dimoderatori oleh Ir. Abd. Haviedz Fatamasyah, M.Si (Balitbangda Papua Barat) dan Drs. Elly Lesnusa dari Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua.

Penulis : Alberth Yomo
Editor : Jimmy F. Wanma (Unipa)



Presentasi narasumber dari Mitra Pembangunan. DOK. BALITBANGDA PB



Produk coklat yang dihasilkan dari bahan baku kakao Ransiki Manokwari Selatan di Luar Negeri. DOK. BALITBANGDA PB



Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto saat meninjau kebun coklat milik Koperasi Ebieb Suth didampingi oleh Bupati Manokwari Selatan Markus Waran. DOK. BALITBANGDA PB



Kunjungan Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto ke gudang penampungan untuk melihat biji kakao kering yang siap di ekspor ke luar negeri. DOK. BALITBANGDA PB



Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto ketika berdiskusi dengan Kepala Balitbangda Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si di lokasi pembangunan gedung inovasi kakao Manokwari Selatan. DOK. BALITBANGDA PB

Dirjen PPDT dan Bupati Mansel Tinjau Lokasi Pembangunan Gedung Inovasi Kakao Ransiki



Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Sri Haryanto bersama Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Dwi Rudi Hartoyo melakukan kunjungan kerja ke Ransiki, Manokwari Selatan (Mansel), Jumat (5/11/2021).

Kunjungan ini dalam rangka melihat dari dekat dan memastikan perkembangan komoditas kakao melalui program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, kerjasama antara Kementerian Desa dengan Kedutaan Besar Inggris. Setelah menemui para petani, berdiskusi dan melihat beberapa kampung di Manokwari Selatan, kunjungan dilanjutkan ke Koperasi Ebier Suth Cokran dan lokasi pembangunan Gedung Inovasi Kakao di Warmapi Ransiki.

Dalam pertemuan bersama pengurus Koperasi Ebier Suth, hadir pula Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST, M.Si, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si dan pimpinan program pertumbuhan ekonomi hijau, Anthony Toren.

Bupati Markus Waran selaku Ketua Koperasi Ebier Suth dalam forum diskusi itu berharap dukungan pemerintah pusat untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan. "Mansel ini termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Karena itu, saya sangat berharap bantuan Dirjen untuk

menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan daerah di sini, termasuk Koperasi Ebier Suth" ujar Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran.

Sementara itu, Anthoni Toren dari Pertumbuhan Hijau blak-blakan soal pemutusan program ekonomi hijau oleh Pemerintah Inggris pada awal Tahun 2021. Dijelaskan, Covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan pemotongan anggaran besar-besaran, termasuk anggaran program ekonomi hijau. "Untung ada pahlawan kita, Prof. Charlie Heatubun bersama Gubernur Papua Barat yang saat itu (Awal 2021) menghadap Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menjelaskan pentingnya program ini, sehingga program ekonomi hijau di Papua Barat ini dapat didukung dan dibiayai kembali," jelasnya.

Selanjutnya menanggapi pernyataan Bupati Waran, Dirjen Eko Sri Haryanto mengatakan akan mengupayakan sesuai kemampuan yang dimiliki. Terkait Koperasi Ebier Suth, bukan berada dalam kewenangannya, sehingga akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Setelah pertemuan itu, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan, melihat dari dekat gudang penampungan biji kakao kering yang siap ekspor, kemudian melihat tempat persemaian bibit kakao unggul dan terakhir berkunjung ke lokasi pembangunan gedung inovasi kakao yang sedang dibangun oleh CV. Farhed Cipta Nusantara.

**| Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding**

Inovasi Komoditas Lokal dari Bumkam Tenggekhawang Fakfak



Balsam Pala, produk turunan dari pala yang berhasil diproduksi oleh Bumkam Tenggekhawang Fakfak. DOK. BALITBANGDA PB

Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di Kabupaten Fakfak menorehkan sejarah baru. Memproduksi produk turunan dari komoditi lokal dan dijual dengan harga fantastis. Ya, namanya Bumkam Tenggekhawang di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, yang baru saja menjual 10 ribu Balsem Pala Fakfak bernilai Rp 250 Juta ke PT. Kembang Christopharma Bandung, Kamis(11/11/2021).

Proses yang dilalui Bumkam Tenggekhawang hingga menembus pasar nasional bukan hal mudah. Kolaborasinya dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan difasilitasi riset, pelatihan dan pendampingan oleh PT. Mahkota Dewa hingga mengurus dokumen perijinan usaha dan produk di BPOM menjadi kunci sukses. Usaha keras yang tidak mengkhianati hasil, itulah yang dirasakan Bumkam Tenggekhawang bersama para mitra

strategisnya dengan mendapat gelontoran uang senilai Rp 250 Juta per bulan dari PT. Christopharma Bandung dari hasil produksi Balsem Pala Fakfak 10 ribu pot.

Bahkan sertifikat izin memproduksi bahan kategori herbal dan obat-obatan yang dikeluarkan BPOM kepada Bumkam Tenggekhawang adalah yang pertama dan satu-satunya di Tanah Papua. Ini sesuatu yang luar biasa yang patut ditiru.

Bumkam bentukan pemerintah kampung di Tanah Papua dapat melakukan hal itu jika mengikuti jejak Bumkam Tenggekhawang. Kuncinya adalah kolaborasi. Jika pemerintah kampung mengunci diri dan tidak terbuka untuk kolaborasi, maka akan sulit mencapai seperti apa yang diraih oleh Bumkam

Tenggekhawang.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Ir. Abdul Rahim Fatamasyah mengatakan jika sebelumnya warga lokal hanya mendapat untung dari menjual biji pala super yang harga per kilogramnya Rp 100 ribu. Namun dengan hasil inovasi, biji pala super yang harganya Rp 100 ribu itu, jika diolah menjadi lemak pala menjadi 250 gram, dan dari 250 gram lemak pala itu mampu menghasilkan 200 pot Balsem Pala yang nilainya Rp 4 juta.

Sebelum produk Balsem Pala, sudah banyak inovasi produk yang telah dihasilkan oleh warga Fakfak dari tanaman pala. Sebut saja, manisan pala, keripik pala, sirup pala, sabun pala dan sebagainya yang diproduksi



lingkup Kabupaten dan Provinsi untuk belajar dari Bumkam Tenggekhawang dan Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Sehingga tidak hanya Balsam Pala Fakfak, tapi komoditi lokal lainnya juga dapat diupayakan untuk mendapat pasar yang besar.

“ Ini akan membuka lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita. Tidak hanya sebatas pada orang-orang tua yang tinggal di kampung. Tapi anak muda yang sudah selesai pendidikan, mari pulang ke kampung kembangkan potensi komoditas lokal yang ada di kampung-kampung dengan ilmu yang didapatkan untuk memajukan kampung,” tandasnya.

Mengakhiri sambutannya, seperti biasa Gubernur Dominggus Mandacan kembali mengingatkan kepada warganya agar tidak meninggalkan air mata bagi anak cucu, tetapi tinggalkan mata air bagi anak cucu. Pesan yang memiliki makna untuk terus menjaga alam dan lingkungan di Papua Barat agar tetap hijau dan dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil dalam sambutannya mengatakan akan berpikir cepat dan terintegrasi bersama seluruh SKPD di lingkup Kabupaten Fakfak untuk

mengangkat potensi komoditi Pala. Dirinya juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBD dan Dana Otsus untuk mengembangkan potensi pala di Kabupaten Fakfak.

Bupati Fakfak yang dilantik pada Tahun 2021 ini juga berharap Gubernur Papua Barat dapat mengeluarkan kebijakan khusus bagi Fakfak dalam hal penganggaran, sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk meningkatkan pembangunan yang lebih maju lagi dari sebelumnya.

Seremoni pengiriman 10 Ribu Pot Balsam Pala Fakfak ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Ketua DPRD Fakfak, Muspida Kabupaten Fakfak, Pimpinan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Papua dan Papua Barat, Kepala BPOM Manokwari, Direktur PT. Kembang Christopharma Bandung, Direktur PT. Mahkota Dewa, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, salah satu Direktur dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan warga Kampung Brongkendik.

Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding

dalam skala rumah tangga.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si mengapresiasi usaha dan kerja keras Bumkam Tenggekhawang, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, PT. Mahkota Dewa, Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan seluruh masyarakat Kampung Brongkendik. Dirinya berharap, agar produksi itu tetap berkelanjutan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga dapat menjangkau pasar Internasional. “ Selain ke Bandung, kita harapkan tidak sebatas Bandung saja, tapi juga Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tapi juga ke luar negeri,” ucap Dominggus Mandacan ketika melepas pengiriman 10 ribu pot Balsam Pala Fakfak di Kampung Brongkendik, Kamis(11/11/2021).

Dominggus Mandacan juga mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di



Tarian penyambutan Gubernur Papua Barat dan rombongan dalam pelepasan Balsam Pala Fakfak. DOK. BALITBANGDA PB

Walaupun termasuk provinsi termuda yang dibentuk di Indonesia, provinsi Papua Barat telah menunjukkan eksistensi yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyak iven berskala nasional bahkan internasional yang dilaksanakan di provinsi ini. Salah satunya Provinsi Papua Barat mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan kegiatan “Woman 20 (W20) and Youth 20 (Y20)”. Iven ini merupakan mesin penggerak atau Engagement Group dari kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yangnantinya akan berlangsung di Bali pada Juni 2022.

Kepastian menjadi tuan rumah ajang internasional ini disampaikan Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes, yang ditunjuk sebagai host untuk mengatur kunjungan para tamu W20 di Manokwari Papua Barat.

“Panitia Nasional telah memilih Papua Barat sebagai salah satu tempat di Indonesia yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan untuk kelompok W20 dan Y20,” jelas dr. Rosaline.

Dijelaskan, istri-istri Kepala Negara akan berkunjung ke Manokwari pada bulan Juni 2022. Jadi, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menunjuk CPP untuk memfasilitasi pelaksanaannya di Manokwari.

“Perwakilan negara yang akan ke Manokwari tu berasal dari Jerman, Australia, Meksiko, Jepang dan India. Ini suatu kehormatan bagi Papua Barat. Iven seperti ini 20 tahun sekali, jadi kita harus jadi tuan rumah yang baik untuk menyambut kegiatan ini,” tandasnya.

Rosaline mengatakan, bahwa Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat memberikan sambutan yang luar biasa untuk menyambut kegiatan ini, apalagi isu yang diangkat adalah tentang Perempuan Desa, Disabilitas dan UMKM.

Dalam kunjungannya ke Manokwari pertengahan Desember 2021, Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bekerjasama dengan sejumlah Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang difasilitasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan pertemuan, kemudian mengunjungi sejumlah fasilitas umum di Kota Manokwari.

“Panitia Nasional W20 sudah bertemu dengan OPD terkait. Semua OPD merespon dengan baik dan siap mendukung kegiatan W20 di Manokwari,” ujar dr. Rosaline.

Bahkan lebih lanjut dr. Rosaline Bersama dengan tim kerja nasional sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M. Si. Gubernur Papua Barat dan gubernur sangat mendukung kegiatan ini dan akan mempersiapkan semuanya dengan baik untuk menyambut kunjungan sejumlah istri pejabat negara-negara G20.

“Perwakilan negara yang akan ke Manokwari tu berasal dari Jerman, Australia, Meksiko, Jepang dan India. Ini suatu kehormatan bagi Papua Barat. Iven seperti ini 20 tahun sekali, jadi kita harus jadi tuan rumah yang baik untuk menyambut kegiatan ini,” tandasnya.

Sebelum berangkat kembali ke Jakarta, Panitia Nasional W20 yang dipimpin Ketua Komite W20, Tantri Dyah Kiranadewi, Chair W20 Hadiani Uli Tiur Ida Silalahi, Greez N Numberi dari CPP dan Lisyé Sinalungga dari Komite W20 melakukan pertemuan dengan Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS.

Greez Natalia Numberi, Bendahara CPP sekaligus Ketua Pelaksana W20, mengatakan manfaat kunjungan ibu-ibu negara luar bagi warga di Papua Barat adalah akan ada dukungan lanjutan, baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui program-program pemberdayaan dan penguatan kapasitas yang diberikan oleh negara-negara G20 setelah melihat langsung kondisi di Papua Barat.

Sementara itu, Michael Victor Sianipar, Ketua Indonesian Youth Diplomacy/Co-chair Y-20 Indonesia 2022 mengatakan, dari 20 negara ini akan mengutus empat delegasi pemuda datang ke Indonesia. Acara puncaknya di Jakarta dan Bandung, namun sebelumnya akan ada rangkaian



Papua Barat Akan Jadi Tuan Rumah

Kegiatan Internasional Untuk Perempuan dan Pemuda



Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes, Bendahara CPP sekaligus Ketua Pelaksana W20 Greez Natalia Numberi, Ketua Indonesian Youth Diplomacy Co-chair Y-20 Indonesia 2022 saat bertemu dengan Wakil Gubernur M. Lakotani, M.Si yang didampingi oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat di Jakarta. DOK. BALITBANGDA PB



Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes, Bendahara CPP sekaligus Ketua Pelaksana W20 Greez Natalia Numberi, Ketua Indonesian Youth Diplomacy Co-chair Y-20 Indonesia 2022 saat bertemu dengan Wakil Gubernur M. Lakotani, M.Si yang didampingi oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat di Jakarta. DOK. BALITBANGDA PB

kegiatan kunjungan ke sejumlah tempat, salah satunya di Manokwari Papua Barat.

“Khusus di Manokwari akan membahas tema Keberlangsungan Planet Kita. Ini sangat sesuai dengan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.” Apa masukan pemuda untuk keberlangsungan planet kita, itu akan dibahas dan diputuskan pada level pertemuan kepala negara. Menariknya hasil diskusi itu akan menjadi bahan yang ditulis dalam satu dokumen Deklarasi Pemuda Dunia yang akan lahir dari Manokwari,” jelasnya.

Rahayu Saraswati, Co-head Divisi Program Indonesian Youth Diplomacy (IYD) mengatakan ini bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi pemuda-pemudi Papua Barat. Karena jarang sekali anak-anak muda Indonesia maupun Papua dilibatkan dalam ajang Konferensi Tingkat

Tinggi Dunia yang terjadi sekali dalam 20 tahun.

“Harapannya, kita bisa menunjukkan pemuda di Papua tidak kalah hebatnya dengan daerah lain, kedua ini membawa ilmu tentang hubungan internasional ke Papua Barat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, bahwa hari ini, 1 Desember 2021, Indonesia secara resmi menerima estafet presidensi dari Italia. Dalam menyambut kepemimpinan Indonesia, pemerintah RI secara resmi telah membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2021 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2021.

Untuk mengadvokasi isu dan kebijakan, semangat multilateralisme dalam proses perumusan regulasi dituangkan melalui keterlibatan aktor non-negara dalam

forum G20 yang akan mengangkat isu-isu publik, seperti kepemudaan, kesehatan, kewirausahaan, hingga kesetaraan gender.

Dalam hal ini, G20 Indonesia memiliki sejumlah mesin penggerak untuk menyusun rekomendasi publik yang terdiri dari berbagai macam kelompok atau disebut dengan engagement group. Mereka adalah Civil 20 (C20), Business 20 (B20), Labour 20 (L20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Think Tank (T20), Urban 20 (U20), Science 20 (S20).

Pemerintah telah menegaskan, Presidensi Indonesia di G20 akan mengusung semangat inklusif. Bukan sebatas mengurus kepentingan anggota G20. Presidensi ini juga memberi perhatian pada negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan. Delegasi yang mewakili negara-negara non-anggota ini juga turut diundang dalam rangkaian kegiatan G20.

Pada posisi presidensi, Indonesia dituntut untuk mampu menyelaraskan agenda global dengan kepentingan domestik. Berpegang pada prinsip tersebut, dukungan internasional akan diperoleh. Presidensi Indonesia pada 2022 akan mengusung tema "Recover together, stronger together". Harapannya, dengan bekerja sama, dunia akan pulih bersama, serta menjadi lebih kuat bersama-sama.

Agenda G20 terbagi dalam dua jalur utama, yakni jalur keuangan dan sherpa. Di antara kedua jalur utama ini terdapat pula area yang beririsan dan digarap bersama (cross cutting). Di jalur keuangan, Presidensi Indonesia akan memprioritaskan untuk membahas bagaimana G20 dapat melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan terutama negara berkembang dari dampak "exit policy" yang diterapkan oleh negara yang perekonomiannya lebih dulu pulih (umumnya negara maju).

Masih pada jalur keuangan, agenda prioritas lain diantaranya implementasi standar pembayaran lintas batas negara serta prinsip-prinsip pengembangan mata uang digital oleh bank sentral (CBDC). Risiko iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta keuangan berkelanjutan juga

masuk dalam agenda prioritas.

Pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas dan keuangan inklusif, terutama bagi perempuan, pemuda, dan UMKM juga mendapat porsi prioritas. Selain itu, diagendakan pula untuk meneruskan pembahasan soal perpajakan internasional, terutama yang terkait implementasi kerangka kerja bersama OECD.

Di jalur Sherpa, isu yang mengemuka adalah pengembangan instrumen protokol kesehatan global yang memastikan interkoneksi secara aman dan terstandarisasi. Agenda lain terkait kesehatan antara lain penyusunan mekanisme pengumpulan sumber daya (pooling of resources) yang dapat didistribusikan secara cepat pada negara yang membutuhkan di saat darurat.

Jalur Sherpa juga akan mengagendakan pembahasan terkait isu perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup; ekonomi digital; anti korupsi; ketenagakerjaan; pariwisata; pendidikan; perdagangan; pertanian; serta pemberdayaan perempuan.

Forum ini juga melibatkan perwakilan pemangku kepentingan dari masyarakat

sipil atau Engagement Group. Di dalamnya antara lain bergabung kelompok buruh (L20), perempuan (W20), pebisnis (B20), dan pemuda (Y20).

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 (Group of 20) pada November 2022. Pelaksanaan G20 akan menjadi gelaran bersejarah dan momentum penting bagi Indonesia, karena forum ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan perekonomian dunia yang berdampak langsung pada keberlangsungan pembangunan di tanah air.

G20 terdiri dari 19 negara ekonomi raksasa dunia plus Uni Eropa yang berkontribusi atas 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, 75 persen perdagangan internasional, serta rumah bagi dua per tiga penduduk bumi. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Cina, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.

**| Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Antoni Ungirwalu**



Presentasi rencana pelaksanaan kegiatan W20 G20 Presidensi Indonesia Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat oleh panitia pelaksana kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari
DOK. BALITBANGDA PB

Kebijakan Gubernur Papua Barat Masuk Dalam Lima Kemenangan Dunia Bidang Lingkungan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melindungi hutan di Tanah Papua mendapat apresiasi yang luar biasa dari media internasional National Geographic. Dalam rilisnya per 9 Desember 2021, media ini menempatkan kebijakan perlindungan hutan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat masuk dalam lima kemenangan dunia di bidang lingkungan pada Tahun 2021 yang memberi harapan bagi kehidupan makhluk hidup dunia.

Dalam publikasinya berjudul *5 environmental victories from 2021 that offer hope* (nationalgeographic.com), media yang berkantor pusat di Washington DC Amerika Serikat ini menguraikan, saat ini dunia diperhadapkan pada kondisi yang menyedihkan karena lebih dari satu juta spesies terancam punah, kadar karbon dioksida di atmosfer terus meningkat dan planet ini diguncang oleh serangkaian perubahan iklim yang dipicu kejadian cuaca ekstrim. Sementara itu, dunia terus bergulat dengan pandemi mematikan yang sepertinya tidak akan pernah berakhir.

Namun, di penghujung Tahun 2021, ada aksi-aksi hebat yang dilakukan berbagai pihak di dunia yang memberi alasan untuk merasa optimis tentang kondisi lingkungan hidup saat ini. Bahkan National Geographic mengibaratkan seperti tanda-tanda

keberhasilan di jalan yang panjang dan sulit, seperti yang dilalui oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Mitra Pembangunan di Tanah Papua ini.

Dalam publikasinya, National Geographic menulis Pemerintah Provinsi Papua Barat di Indonesia mencabut izin untuk 12 kontrak perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup lebih dari 660.000 acre (area dua kali ukuran Los Angeles), tiga perlima diantaranya masih berhutan perawan. Kelompok pegiat hak-hak lingkungan dan masyarakat adat mendesak pemerintah untuk melangkah lebih jauh dan mengakui hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut untuk mengelola hutan sendiri. Tiga dari 12 pemegang kontrak terus memperjuangkan keputusan pemerintah di pengadilan. Namun kabar terakhir, salah satu Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten (Bupati) Sorong meraih kemenangan atas gugatan yang diajukan oleh para pemegang izin perkebunan tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dr. Ir. Yacob Fonataba, merasa bangga karena kebijakan perlindungan hutan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi dan perhatian media internasional.

“Papua Barat telah ikut mendukung untuk menjaga kepunahan spesies dan mencegah terjadinya deforestasi,” kata Yacob Fonataba.

Senada dengan kebijakan Gubernur Papua Barat ini, mengacu pada moratorium perluasan dan penanaman kelapa sawit, juga mengacu pada Deklarasi Manokwari yang merupakan hasil ICBE 2018. Komitmen ini juga mendapat dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). “Apa yang telah kita lakukan telah berkontribusi dalam menjaga alam dan mencegah deforestasi di Tanah Papua,” tandasnya.

Fonataba menjelaskan, dari hasil evaluasi review perijinan penggunaan lahan di Papua Barat, telah terselamatkan 611.440,84 hektar lahan dari 24 perusahaan, dan yang masih berupa tutupan hutan luasnya 383.431,05 hektar.

“Memang ada tiga perusahaan yang kemudian menggugat. Tetapi setelah melalui proses persidangan, pada 7 Desember 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menggugurkan gugatan itu, dan ini adalah suatu kemenangan bagi Pemerintah Papua Barat dan masyarakat adat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS turut merasa bangga dengan publikasi ini. Sebagai inisiator International Conference on Biodiversity, Eco-Tourism and Creative Economy (ICBE) 2018, dirinya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang bekerja keras menjaga komitmen bersama yang dilahirkan pada ICBE 2018 melalui Deklarasi Manokwari.

Komitmen ini tidak hanya sebatas kata, tetapi diwujudkan dalam aksi dan tindakan nyata sehingga mendapat pengakuan dunia internasional. Publikasi itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di Papua Barat adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga bumi tetap sehat dan layak dihuni. Sehingga generasi berikut dapat menikmati udara yang segar dan mata air yang terus mengalir di masa yang akan datang, sesuai pesan bapak Gubernur Papua Barat – Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, agar “kita mewarisi air mata bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya meninggalkan air mata bagi mereka”.

Sekedar diketahui, Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat ini, oleh National Geographic dikelompokkan dalam kemenangan lingkungan di bidang Perlindungan Hutan bersama kemenangan yang dicapai pada Konferensi Iklim PBB di Glasgow untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030.

Kemenangan di bidang Perlindungan Hutan juga dicapai di Republik Demokratik Kongo. Pada bulan Oktober, Presiden Felix Tshisekedi dari Republik Demokratik Kongo menyerukan audit atas konsesi hutannya yang luas dan penangguhan semua “kontrak yang meragukan” sampai audit selesai. Beberapa minggu kemudian, pemerintah mundur dari rencana untuk mencabut moratorium berusia 19 tahun atas pemberian izin penebangan baru di Hutan Cekungan Kongo.

Empat kemenangan lingkungan lainnya pada Tahun 2021 yang di publish National Geographic; Pertama, terkait penundaan penggunaan bahan bakar fosil yang dihasilkan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan di Glasgow.

Kedua, pembatasan penggunaan bahan plastik yang berhasil dilakukan di Negara Bagian Washington dan di California Amerika Serikat.

Ketiga, kemenangan di bidang Restorasi Habitat yang dilakukan di Amerika yang mulai memulihkan perlindungan habitat. Lalu di Panama yang melipatgandakan luas Kawasan Konservasi Laut Cordillera de Coiba. Demikian juga dengan Portugal yang mendirikan cagar alam laut yang dilindungi sepenuhnya dan terbesar di Eropa.

Ke-empat, dukungan pemulihan satwa liar. Contohnya di China yang mengumumkan pembuatan Taman Nasional Panda Raksasa, bagian dari sistem taman baru yang akan mencakup area hampir sebesar Inggris Raya. Taman ini dirancang untuk melindungi spesies asli seperti harimau Cina Timur Laut, macan tutul Siberia, dan siamang jambul hitam Hainan.

**I Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Antoni Ungirwalu**

“
Sebagai salah satu motto pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yaitu mewarisi mata air bagi anak cucu kita bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka
”

Dominggus Mandacan



Rantai Pasok Pangan Papua Barat MENDAPAT PERHATIAN INTERNASIONAL



Wawancara dilakukan kepada petani yang terkena dampak Covid-19. DOK. BALITBANGDA PB

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada Tahun 2021 telah berdampak luas. Warga di Provinsi Papua Barat termasuk yang merasakan dampak itu.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga untuk menjamin warganya agar tetap kuat menghadapi cobaan ini. Selain fokus pada penanganan virus Covid-19 itu sendiri, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah memastikan kegiatan ekonomi di daerah tetap jalan. Warga Papua Barat harus tetap memproduksi dengan bercocok tanam, melaut mencari ikan dan menjual hasilnya ke pasar, sehingga dapur tetap mengepul menjamin keberlanjutan hidup rumah tangga dari perkotaan hingga pelosok-pelosok kampung walau dalam situasi genting.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat tidak tinggal diam. Badan yang baru seumur jagung di Provinsi Papua Barat ini kemudian mencari dukungan. Melakukan lobi-lobi ke beberapa lembaga internasional untuk mencari dukungan.

Gaung bersambut, salah satu lembaga internasional bersedia memberikan dukungan. Ya, Center for International Forestry Research

(Cifor) bersedia membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui penelitian rantai pasok pangan.

Selain memiliki kesamaan dalam tugas dan fungsi, Balitbangda Papua Barat dan Cifor ingin memastikan rantai pasok pangan di Papua Barat tidak terganggu. Caranya adalah dengan melakukan penelitian. Hasil penelitian itu yang dapat menjadi rujukan kebijakan intervensi apa yang tepat.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS menjelaskan kerjasama dengan Cifor ini didasarkan pada komitmen terhadap butir-butir Deklarasi Manokwari. Deklarasi Manokwari sendiri telah diwujudkan dengan disahkannya peraturan daerah khusus (PERDASUS) nomor 10 tahun 2019 mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Deklarasi Manokwari merupakan dasar dan arahan utama dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan dalam PERDASUS, khususnya pada butir 7 tentang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pembangunan berkelanjutan, serta butir 12 tentang ketahanan pangan.

Kegiatan yang dilakukan Balitbangda Papua Barat bersama Cifor dimulai dengan Survey dampak pandemi Covid-19 terhadap rantai pasok pangan Provinsi Papua Barat. Mulai dari dampak terhadap pelaku rantai pasok pangan secara umum, kemudian dampak terhadap produsen pangan skala kecil dalam rantai pasok tradisional dan dampak terhadap konsumen dalam perilaku dan lingkungan pangan mereka.

Tenaga surveyor yang diterjunkan juga diberikan training. Mulai dari tahapan dalam berpenelitian, pelaksanaan survey, termasuk pemahaman terhadap topik penelitian, pertanyaan dalam questioner, dan perbaikan kuesioner melalui diskusi dan uji coba. Kemudian, pengelolaan turun lapangan dalam masa pandemic Covid-19, pengolahan data, interpretasi data dan presentasi hasil penelitian.

Setelah melakukan survei selama beberapa bulan di beberapa kabupaten di Papua Barat, hasil survei itu kemudian dipresentasikan pada konferensi internasional. Saran yang diberikan dari penelitian ini, pertama, perlu adanya studi partisipatif untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan orang asli papua sebagai pedoman pola makan yang memiliki nilai budaya, penghargaan bagi alam dan merupakan keinginan masyarakat setempat.

Kedua, studi perubahan perilaku orang asli papua untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal yang sehat, serta yang ketiga adalah memahami adanya dampak konservasi 70 % tutupan hutan terhadap ketersediaan pangan atau ketahanan pangan khususnya orang asli papua di sekitar kawasan hutan.

Selanjutnya, artikel dari hasil penelitian ini direncanakan akan publikasikan ke dalam special issue Jurnal peer-review internasional *Frontiers in Sustainable Food Systems*.

Seluruh kegiatan dari kolaborasi ini pembiayaannya dilakukan dengan sharing dana antara CIFOR melalui United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), United States Agency for International Development (USAID), dan Balitbangda Provinsi Papua Barat dari Sumber dana APBD Provinsi Papua Barat.

Penulis : Ferry Hurulean (Balitbangda PB)
Editor : Alberth Yomo



SERBA-SERBI



Penyerahan laporan akhir Aksi Perubahan Diklat PIM angkatan II BPSDM Provinsi Papua Barat kepada Kepala Balitbangda. DOK. BALITBANGDA PB



Tiga Staf Balitbangda Provinsi Papua Barat Hasilkan Tiga Inovasi di Penghujung Tahun 2021

Pada penghujung Tahun 2021, tiga orang Aparat Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat sukses menghasilkan tiga inovasi berupa aplikasi pelayanan publik berbasis web. Ketiga aplikasi itu adalah Dasi Brida, Si Terindah dan Sindi.

Dasi Brida merupakan sebutan untuk Dashboard Sistem Informasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, Si Terindah merupakan singkatan dari Sistem Informasi Data Riset dan Inovasi Daerah, sedangkan Sindi adalah sebutan untuk Sistem Informasi Data Kekayaan Intelektual.



Diskusi bersama Kepala Balitbangda dan Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Tampilan website SI TERINDAH. DOK. SOURCEFROMINTERNET

Tiga aplikasi ini merupakan bagian dari tugas akhir Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II tahun 2021 yang diikuti selama tiga bulan.

Dasi Brida merupakan karya Ferry Hurulean, SP. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Si Terindah adalah hasil karya Ezrom Batorinding, S.Hut, M.Sc. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah dan Sindi adalah karya Victor

Kambu, S.TP Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

Dasi Brida adalah sebuah tampilan visual dari informasi yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar, menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Dashboard itu sebuah tampilan pada satu monitor komputer yang berisi informasi berupa kombinasi teks, grafik dan video.

Dasi BRIDA ini didukung dengan sebuah tools digital dashboard berupa sebuah panel komputer layar datar yang interaktif dengan dukungan penuh fungsi penulisan, kamera, audio menjadi presentasi dan kolaborasi yang sangat efisien dan inovatif. Monitornya merupakan produk Digital Signage dengan layar berukuran 49 inci. Digital signage dengan floorstand dapat menyajikan cara baru dalam berpromosi menggunakan teknologi terbaru display LCD



Ujian akhir pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan II BPSDM Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh tiga staf Balitbangda secara daring DOK. SOURCEFROMINTERNET

dengan resolusi High Definition yaitu 1080p dan tingkat kecerahan yang tinggi, sehingga membuat berbagai materi promosi tampil menarik.

Fitur Unggulan dari Dashboard ini antara lain:

- Tempered glass
- Dengan design yang tipis
- Layar HD (High definition)
- Mendukung penggunaan 7 x 24 jam
- Full viewing angle, mencapai 170 derajat
- Memiliki fungsi pengatur waktu On / Off

Monitor Touchscreen 49 inci hanya berfungsi sebagai monitor dimana monitor ini hanya untuk memunculkan gambar, sedangkan untuk video maupun suara memerlukan controller.

Ferry Hurulean mengatakan DASI BRIDA yang dibuatnya ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja pelayanan publik berupa penyajian data dan informasi secara transparan, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

“Keterbukaan informasi publik ini, tentu akan mampu meningkatkan rasa

kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi merupakan bagian pelayanan kepada publik guna memberikan kemudahan masyarakat mengakses informasi dan data.

Inovasi ini adalah dalam rangka penyebaran data dan informasi yang lebih maju dan modern, inovasi tersebut adalah sebuah tools yang dapat digunakan untuk merepresentasikan data secara visual dan interaktif.

Sementara itu Si Terindah, karya Ezrom Batorinding adalah website yang berisi data riset dan inovasi daerah yang dihasilkan Balitbangda dan inovasi daerah yang



dihasilkan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah dilombakan dalam ajang Innovative Government Award tahun 2021. Aplikasi berbasis web ini menjadi penting karena data riset dan inovasi daerah yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah akan dapat diakses oleh semua OPD di Provinsi Papua Barat dan publik, tapi juga data riset dan inovasi yang diinput ke sistem website ini langsung tersimpan di server.

Ezrom Batorinding mengatakan alasan membuat website ini adalah selama ini sistem penyajian data riset dan inovasi daerah di Balitbangda masih bersifat manual dan belum tertata dalam satu sistem file elektronik yang dapat diakses dengan

mudah oleh user atau pengguna. Kehadiran website ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan basis data riset dan inovasi dengan mengintegrasikan data riset dan inovasi daerah ke dalam satu sistem aplikasi berbasis website.

Selanjutnya Sindi yang juga merupakan aplikasi berbasis website ini, juga menyajikan tentang informasi Hak Kekayaan Intelektual di Papua Barat, baik yang sedang berproses maupun yang sudah final. Masyarakat bahkan dapat memperoleh berbagai informasi tentang syarat dan hal-hal yang diperlukan dalam proses pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dalam website ini.

Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS mengapresiasi karya ketiga stafnya ini. "Ini karya yang baik bagi mereka, tapi juga bagi Balitbangda sendiri maupun bagi masyarakat luas," tandasnya.

Prof. Heatubun bahkan menyebut ketiga stafnya ini adalah Inovator dan Transformer karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi publik.

**| Penulis : Ezrom Batorinding (Balitbangda PB)
Editor : Alberth Yomo**

Petak Ukur Permanen, Pemberi Sinyal Kondisi Hutan Gunung Meja

Kawasan Hutan Gunung Meja merupakan salah satu aset penting bagi warga Kota Manokwari. Keberadaan kawasan ini telah berkontribusi pada setiap detik hembusan nafas dan kebutuhan air minum penghuni ibukota Provinsi Papua Barat ini.

Karena itu, guna memastikan fungsi ekologis dan hidrologinya tidak terganggu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Fahutan UNIPA) mulai mengintensifkan kolaborasi dengan sejumlah pihak melakukan kajian dan penelitian ilmiah.

Salah satu kegiatan yang sudah berjalan adalah penelitian dinamika hutan tropis menggunakan Petak Ukur Permanen (PUP). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika perkembangan kondisi hutan dari waktu ke waktu. Hasilnya diharapkan akan memberikan informasi ilmiah dan rekomendasi atau informasi tentang intervensi apa yang akan dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Gunung Meja juga memberikan nilai estetika, spiritual, pendidikan dan nilai ilmiah tapi juga inspirasi dalam kreativitas dan tentunya ekonomi. Sebagai warga Manokwari, kita harus bangga dan harus menjaga dan lindungi untuk masa depan anak-cucu kita,” ujar Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS ketika berkunjung

ke kawasan hutan Gunung Meja Manokwari, beberapa waktu lalu.

Kunjungan ke Gunung Meja ini didampingi Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Haerul Arifin, S.Hut, M.Si; Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Jimmy Oruw, S.Hut, M.Si; Koordinator Lapangan PUP dari Fakultas Kehutanan UNIPA, Jimmy Wanma, S.Hut, M.App.Sc dan sejumlah staf Balitbangda Papua Barat serta mahasiswa kehutanan UNIPA.

Professor Heatubun menjelaskan, Balitbangda Papua Barat sebagai lembaga riset dan inovasi di daerah akan memainkan perannya dalam menjaga hutan Gunung Meja sebagai harta tak ternilai dan modal alam kita. PUP adalah aset dan langkah strategis dalam mengaplikasikan metode penelitian ilmiah yang digunakan oleh negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk memastikan kontribusi hutan tropis bagi kestabilan iklim planet bumi kita.

PUP yang dibangun di Gunung Meja ini akan menjadi bagian dari sistem jaringan petak ukur permanen hutan tropis di dunia. “Kita harus bangga karena hutan Gunung Meja ini juga berperan besar bagi kelangsungan umat manusia di muka bumi, karena data dari hasil time series yang dikirim dari tim PUP Manokwari ke jaringan PUP internasional membantu dalam memahami dinamika hutan dan pengaruhnya terhadap iklim secara global,” jelasnya.





Kondisi eksisting hutan gunung meja saat ini. DOK. BALITBANGDA PB



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun S.Hut, M.Si, FLS ketika memberikan penjelasan tentang penyebab tumbangya pohon kepada Jimmy Wanma selaku koordinator lapangan PUP Fakultas Kehutanan Unipa saat melakukan pengamatan di lapangan.
DOK. BALITBANGDA PB

Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Balitbangda Papua Barat, Jimmy Oruw menambahkan bahwa PUP ini bisa menjadi salah satu model fasilitas untuk menskenariokan atau memodelkan pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi hutan atau ekosistem sekitar kawasan.

Dengan PUP ini, bisa dilihat dinamika yang terjadi dalam hutan normal atau tidak. Ini

harus diketahui karena akan berdampak pada wilayah di sekitarnya. Hasilnya akan menjadi rekomendasi ke pemerintah daerah untuk mengatur model pengelolaan yang tepat.

“Secara kewenangan berdasarkan status pengelolaan hutan, kawasan hutan ini berada dalam kewenangan BKSDA karena masih berstatus Taman Wisata Alam, jadi kita

akan berkolaborasi juga dengan pengelola Kawasan BKSDA untuk tindaklanjutnya,” tandasnya.

Ditambahkan, kawasan Gunung Meja ini penting dan memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat di Kota Manokwari. Karena itu, kebijakan daerah yang didasari oleh hasil riset ini sangat penting dalam rangka pengelolaannya di masa depan untuk memastikan kontribusi bagi ekonomi lokal maupun bagi kemaslahatan umat manusia.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) PUP Fakultas Kehutanan UNIPA, Jimmy Wanma menjelaskan PUP Gunung Meja ini sudah dibangun sejak Tahun 2016 bekerjasama dengan pihak the Royal Botanic Gardens Kew, UK (Inggris) dan melibatkan Fahutan UNIPA serta Balai Litbang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia waktu itu.

“Jadi survei ke lokasi kali ini bersama Kepala Balitbangda Papua Barat adalah untuk melihat dinamika hutan gunung meja yang terjadi dalam 5 Tahun terakhir disamping mengecek progress aktivitas riset yang sedang berjalan dan upaya pemeliharaan PUP itu sendiri,” Ujar Jimmy Wanma yang juga sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fahutan Unipa.

Adapun luas areal yang digunakan untuk membangun PUP ini adalah 100 x 100 (meter), dengan membuat sebanyak 25 sub plot yang masing-masing berukuran 20 x 20 meter. Plot ini menggunakan metode Rainfor, yaitu metode pengukuran yang dikembangkan lembaga riset yang membatasi mengukur pohon berdiameter di atas 10 cm.

“Setelah 5 Tahun, kami kembali lagi untuk menghitung data time seriesnya. Melihat hasil perkembangan pekerjaan yang sudah dikerjakan 5 tahun lalu,” jelasnya.

Setelah diamati, lanjut Jimmy Wanma, ternyata dalam lima tahun, banyak dinamika yang terjadi. Pohon yang sebelumnya belum 10 cm, sekarang diamatinya sudah lebih dari 10 cm. Tapi ada juga pohon yang pernah diukur, sekarang sudah mati karena tumbang. Sehingga diamati lagi penyebabnya tumbangya pohon-pohon itu.



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun S.Hut, M.Si, FLS ketika memberikan penjelasan kepada Tim saat melakukan pengamatan di lapangan. DOK. BALITBANGDA PB



Selain itu, akan dilakukan juga pengukuran data abiotik, (intensitas cahaya dan aspek kondisi tanah). Juga akan membuat peta penyebaran pohon, peta situasi dan kedudukan PUP dalam kawasan Gunung Meja.

Tim kerja juga, lanjut Jimmy Wanma, akan berkonsultasi dengan BKSDA Papua Barat, membuat papan nama PUP dan mengatur waktu peresmian. Harapannya PUP ini akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses akreditasi Fahutan UNIPA.

“Petak ukur ini idealnya datanya diambil setiap tahun. Namun baru dilakukan sekarang karena disupport oleh Balitbangda Papua Barat,” ujarnya.

Dari hasil pengamatan lapangan itu, kata Jimmy Wanma, dapat dikatakan bahwa proses alamiah di Gunung Meja masih berlangsung dengan baik. “Walaupun ada 40 pohon yang mati, tapi ada 40 pohon baru juga yang tumbuh,” tandasnya.

Karena itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fahutan UNIPA ini berharap dukungan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk bersama mendukung upaya riset dan pengembangan pada kawasan hutan Gunung Meja demi masa depan dan kepentingan bersama menyelamatkan salah satu ikon Kota Manokwari.

Penulis : Alberth Yomo (Balitbangda PB)
Editor : Ezrom Batorinding

GALERI



Sambutan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembukaan Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah (dok. balitbangda PB) DOK. BALITBANGDA PB



Peserta Workshop Karya Tulis Ilmiah, perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Orchardz Kemayoran, Jakarta Pusat (30 Juni - 2 Juli 2021). DOK. BALITBANGDA PB



Rapat tim internal Balitbangda Provinsi Papua Barat dalam persiapan mengikuti Inovasi Government Award (IGA) Tahun 2021. DOK. BALITBANGDA PB



Rapat Persiapan untuk mengikuti Inovasi Government Award 2021 bersama beberapa perwakilan OPD teknis di Pemerintah Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Penyerahan hasil-hasil publikasi Balitbangda Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Bidang Litbang Bappeda Provinsi Papua. DOK. BALITBANGDA PB



Penandatanganan tanda terima penyerahan hasil-hasil publikasi Balitbangda Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Bidang Litbang Bappeda Provinsi Papua. DOK. BALITBANGDA PB



Diskusi untuk peninjauan kerjasama dengan Bank Papua. DOK. BALITBANGDA PB





Kunjungan Tim Balitbangda ke Politeknik Fakfak.
DOK. BALITBANGDA PB



Bekunjung ke Koperasi Ebier Suth dan melihat produk kakao asal Ransiki dalam kemasan yang telah diproduksi sejumlah negara. DOK. BALITBANGDA PB

Meninjau lokasi pembangunan gedung inovasi kakao di Ransiki. DOK. BALITBANGDA PB

Hutan Adat Model Adaptif di Papua Barat



Etnis Miyah. DOK. ANTONI UNGIRWALU

Tidak teras Perhutanan Sosial (PS) telah memasuki periode ketiga yang ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat setempat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dengan cara memformalkan skema pengelolannya. Konsep pengelolaan “berbasis masyarakat” diwujudkan dalam pikiran Pasal 3 Permenhut No. P. 01/2004 tentang konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat atau lebih dikenal dengan *Community Based Forest Management* (CBFM). Namun dalam penerapan Skema Perhutanan Sosial, khususnya untuk skema model hutan adat belum satupun diberikan kepada masyarakat hukum adat di Tanah

Papua (Ungirwalu et al, 2001)

Mengapa hutan adat penting keberadaannya di Papua Barat? Masyarakat adat di Tanah Papua telah menyatu kehidupannya dengan hutan secara turun temurun. Masyarakat asli Papua menganggap hutan sebagai “Mama” karena segala kebutuhannya terpenuhi dari hutan Secara *de facto* keberadaan masyarakat adat pada konteks tujuh wilayah adat namun secara *de jure* belum. Sehingga konteks skema hutan adat sangat sesuai dengan kebiasaan masyarakat asli Papua dalam mengelola hutannya sendiri.

Berbeda dengan masyarakat di Pulau Jawa perodesasi Perhutanan Sosial lebih

banyak definisi dan dieksekusi langsung oleh pemerintah, Sementara di Tanah Papua periode pertama lahir sejak akhir tahun 1970-an melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang awalnya dikelola pemerintah namun dieksekusi oleh para pihak swasta melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sementara kehadiran masyarakat Adat di sekitar hutan hanya menjadi objek pelengkap. Program PMDH yang dilaksanakan oleh HPH dianggap telah gagal karena tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar Kawasan konsesi. Selain itu kehadirannya telah merampas ruang dan akses hutan masyarakat adat karena telah ditetapkan sebagai Kawasan hutan menjadi fungsi produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.

Di sisi lain Gerakan pendampingan di tingkat tapak untuk mewujudkan masyarakat adat sejak awal telah dilakukan secara masif oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendapat bantuan dari berbagai pihak yang memiliki kesamaan tujuan untuk menjaga hutan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dinamika di lingkungan kampus juga hadir



berkolaborasi dengan membangun forum komunikasi *multistakeholder* tahun 2018 di Fakultas Kehutanan Unipa. Selanjutnya tercatat beberapa pertemuan yang diinisiasi oleh Tim Pokja PS, mitra pembangunan melalui kegiatan *workshop* terkait status perhutanan sosial dan reforma agrarian antara lain pada tanggal 8-9 Februari 2021 di Mansinam Beach Hotel, Coaching clinic pada Tanggal 18-19 Maret 2021 di Hotel Vega Sorong dan *field trip* pada Tanggal 20 Maret 2021 di Malaumkarta, Sorong (diterbitkan di majalah Inovasi Kasuari EDISI XXX). Dari ketiga kegiatan diperoleh informasi penting terkait potensi Tanah Objek Reforma Agrarian (TORA) yang mencapai 14.837,44

Ha sedangkan luas Kawasan Perhutanan Sosial yang telah keluar SK di Papua Barat untuk Hutan Desa 52.198 ha dan Hutan Kemasyarakatan 1.057 ha. Sementara skema hutan adat masih jalan ditempat karena masih dalam wujud peta indikatif.

Belajar dari sistem pengelolaan selama ini, dalam menempatkan konteks hutan adat pada skema perhutanan sosial terkesan tidak komprehensif karena adanya diferensiasi dan disklasifikasi yang gamang terhadap keberadaan masyarakat adat itu sendiri seakan memisahkan aspek budaya dan kearifan tradisional dalam penerapannya. Berdasarkan prinsip dasar pengelolaan

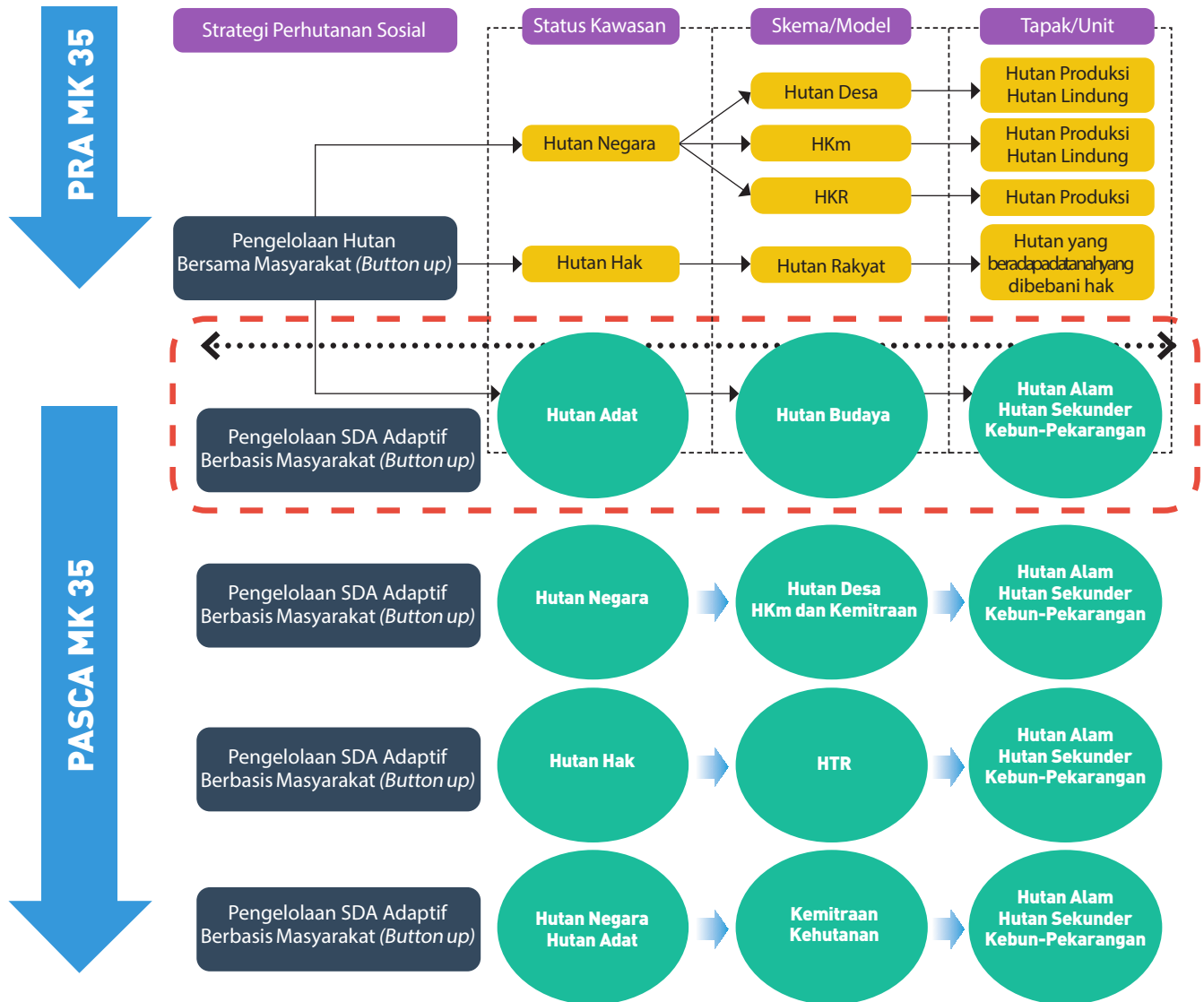
berbasis masyarakat (Adat) menurut Awang (2004) terletak pada posisi inisiatif dan penempatan posisi masyarakat sebagai obyek atau subyek dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hasil kajian yang kami ajukan melalui konsep hutan-budaya dalam sistem kebijakan perhutanan sosial di Papua Barat dapat dilaksanakan dalam semua skema pengelolaan hutan adat berdasarkan status kawasan, skema/model dan tapak yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Ada harapan besar di Papua Barat dengan ditetapkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang substansi atas pengakuan hutan adat yang pada awalnya tidak di rekognisi dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai provinsi berkelanjutan atau provinsi konservasi pertama di Indonesia, pengakuan masyarakat adat menjadi isu sentral dan menjadi konsen utama karena hutan di Tanah Papua telah dijaga dan dikelola oleh masyarakat adat secara berkelanjutan. Hal ini juga terkait dengan tindak lanjut pertemuan dan Deklarasi Manokwari dalam kegiatan ICBE pada Oktober 2018. Di tingkat regional, Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 09 tahun 2019 tentang pedoman pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat (Perdasus Papua Barat No. 9/2019). Selanjutnya Sekda Provinsi Papua Barat Bapak Nataniel Mandacan mengungkapkan konteks kawasan hutan, tidak bisa kita pisahkan dari masyarakat adat yang hidup di tanah ini. Sebagian besar dari masyarakat pribumi menggantungkan hidupnya dari hutan di sekitar mereka selama ratusan tahun. Perlindungan hutan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat adat mereka adalah pelaku langsung di lapangan yang menjaga, hingga hutan yang ada sekarang masih bisa kita nikmati. Perlu ada upaya mempertahankan kearifan lokal yang sudah dibangun nenek moyang kita agar tujuan melindungi hutan bisa terwujud dan sekaligus menjamin kualitas hidup dari masyarakat adat. Diskursus ini tentunya akan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teknokratis dan masyarakat lokal untuk melihat secara subyektif untuk menentukan keberhasilan kebijakan keberlanjutan ini (Riordan dkk. 2016).

Skema ini dapat diterapkan dalam status



MODEL KONSEP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI PAPUA BARAT



Skema pengelolaan SDA Adaptif berbasis masyarakat adat

kawasan hutan negara dan hutan adat. Hal utama dari kajian hutan-budaya ini adalah entitas dan identitas yang di rekognisi melalui pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, sumberdaya lokal, proses dan keterampilan lokal dalam konteks skema pengelolaan sebagai sebuah modal sosial, budaya dan ekologi yang unggul pada tatanan skala lokal. Dalam tatanan nasional, regional dan internasional skema model masyarakat adat di Papua Barat melalui pendekatan hutan-budaya pada penciri di tingkat tapak (hutan

primer, sekunder dan kebun-pekarangan) dapat dijadikan sebagai terminologi baru dalam mewujudkan pengelolaan SDA adaptif di Papua Barat sekaligus merekonstruksi kebijakan perhutanan sosial yang berkeadilan khususnya di luar pulau Jawa. Tentunya ini tidak terlepas dari syarat dan prasyarat yang saling berhubungan antara modalitas kebiasaan budaya masyarakat, keberpihakan pemerintah yang akan mengkoridorisasi ke dalam tata kelola pemerintahan. Semoga harapan besar

terhadap pengakuan hutan dan masyarakat adat dapat terealisasi dalam waktu dekat, seperti ungkapan Gubernur Papua Barat, Bapak Drs. Dominggus Mandacan, MSI bahwa "Kita jaga hutan, hutan jaga kita dan tugas utama kita adalah mewariskan mata air bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya mewariskan air mata bagi mereka"

**Penulis : Antoni Ungirwalu (Fahutan Unipa)
Editor : Muhammad Farid (EcoNusa)**

Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga (Livelihood) Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat Kawasan Mangrove di Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Ekosistem Gambut dan Mangrove atau *Peatland and Mangrove Ecosystem* (PME) adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. Namun kemajuan pengelolaannya ditingkat lokal belum nampak karena saat ini masih dibahas di tingkat nasional dan provinsi. Penerapan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove belum dimulai khususnya terhadap kegiatan lapangan yang melibatkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Adanya kendala untuk mencapai tujuan tersebut, karena pelaksanaan program pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang melibatkan masyarakat setempat belum dimulai. Oleh karena itu perlu adanya informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang dapat digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan program tersebut.

Conservation International (CI) Indonesia melalui program *International Climate Initiative-Peatland and Mangrove Ecosystem* (IKI-PME project) melaksanakan serangkaian pelatihan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Papua Barat. Sasaran kegiatan ini untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ekosistem gambut dan mangrove di Papua Barat dan diharapkan pada setiap kegiatan pengelolaan akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat itu sendiri.

CI Indonesia melaksanakan proyek mitigasi, adaptasi melalui Konservasi dan Penghidupan Berkelanjutan di Ekosistem Gambut dan Mangrove Indonesia dibawah Inisiatif Iklim Internasional (IKI), Kementerian Federal untuk Lingkungan Alam dan Keselamatan Nuklir (BMU) sebagai lembaga donor dari proyek ini. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan



Foto bersama Komunitas Perempuan Kelomang Fakfak. DOK. LIVELIHOOD

ketahanan pangan masyarakat terhadap perubahan iklim di komunitas yang rentan dan keanekaragaman hayati. Proyek ini juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan mempercepat konservasi skala besar dan pengelolaan PME secara efektif.

Papua Barat sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem gambut dan mangrove yang terbesar di Indonesia. Namun, Papua Barat hanya mampu melindungi 10% dari luas mangrovenya (650.000 ha). Situasi sosial dan budaya masyarakat lokal yang tinggal di kawasan mangrove yang terbatas kepada pemanfaatan ekosistem mangrove

yang sangat minim, terutama di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Bintuni. Masyarakat sekitar sebagian besar memanfaatkan mangrove untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, untuk meningkatkan pendapatan, beberapa orang melakukan kegiatan lain untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Misalnya masyarakat Bintuni dan Kaimana menjual udang dan kepiting kepada pengunjung di luar Papua Barat.

Proyek IKI-PME, CI Indonesia melaksanakan serangkaian pelatihan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar



Komunitas Perempuan Kelomang Fak-Fak saat mengikuti pemaparan pelatihan. DOK. LIVELIHOOD

wilayah PME. Agar rangkaian kegiatan pelatihan ini berjalan secara efektif, CI Indonesia juga melakukan baseline survei untuk mendapatkan data awal sumber daya alam di wilayah PME, tingkat pemanfaatan PME dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta kebutuhan pelatihan dalam pelestarian dan pemanfaatan mangrove. Program pelatihan dengan pra dan pasca penilaian untuk melihat dampak kegiatan dan juga sebagai pertimbangan dalam laporan dasar untuk evaluasi dan perencanaan program masa depan. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Pelatihan ini menargetkan sekitar 2.000 mengikuti pelatihan ini

Rangkaian pelatihan dilakukan bersama Komunitas Perempuan Kelomang Fakfak, dilaksanakan pada tanggal 16-18 September 2021 bertempat di Kampung Hamriamkendik, Fakfak Tengah. Pelatihan yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut, diikuti sebanyak 153 orang peserta dari 9 kampung yaitu Kampung Hamriamkendik, Kampung Unipokpok, Kampung Mandopma, Kampung Kanantare, Kampung Sakartemin, Kampung Brongkendik, Kampung Raduria, Kampung Air Besar, Kampung Pasir Putih.

Pada hari ke-3 pelatihan mengundang perwakilan peserta dari Kampung Ubadari



Pelatihan pembuatan bakso ikan (atas kanan). DOK. LIVELIHOOD



Pelatihan pembuatan VC atau minyak kelapa murni. DOK. LIVELIHOOD

sebagai mitra kerja CI Indonesia untuk bergabung mengikuti pelatihan pembuatan balsam pala.

Untuk mendukung suksesnya pelatihan ini, selain menyediakan bahan baku dan alat pelatihan juga memberikan alat-alat pelatihan ini seperti kompor, pematut kelapa, blender, panci dan alat lain yang telah digunakan selama pelatihan ini kepada perwakilan 9 kampung yang ikut serta.

Ada tiga macam pelatihan livelihood yang dilakukan yaitu (1) Pelatihan pengolahan bahan makanan berbahan dasar ikan (bakso ikan), (2) Pelatihan pembuatan minyak kelapa murni / *virgin coconut oil* (VCO), dan (3) Pelatihan pembuatan balsam pala dan pemasangan papan informasi kampanye bahaya sampah plastik di 9 kampung Fakfak Tengah.

“Kami sangat senang dan berterimakasih dengan adanya pelatihan ini. Kami jadi tahu

dan mengerti bagaimana cara membuat bakso ikan, membuat minyak kelapa tanpa api, dan balsam pala. Kami akan praktekkan ilmu yang sudah kami dapat ini di rumah dan kampung kami, sehingga kami bisa kami jual bakso ikan di sekolah yang terdekat di kampung kami. Harapan kami semoga Kelomang bisa memberikan pelatihan lainnya yang bahan bakunya ada dan tersedia di kampung kami tinggal, ujar salah satu kelompok desa yang ikut pelatihan ini”

Penulis : Sisca Gafri
Editor : Antoni Ungirwalu (Unipa)

Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Wilayah Pesisir Mangrove Kampung Kambala dan Yarona

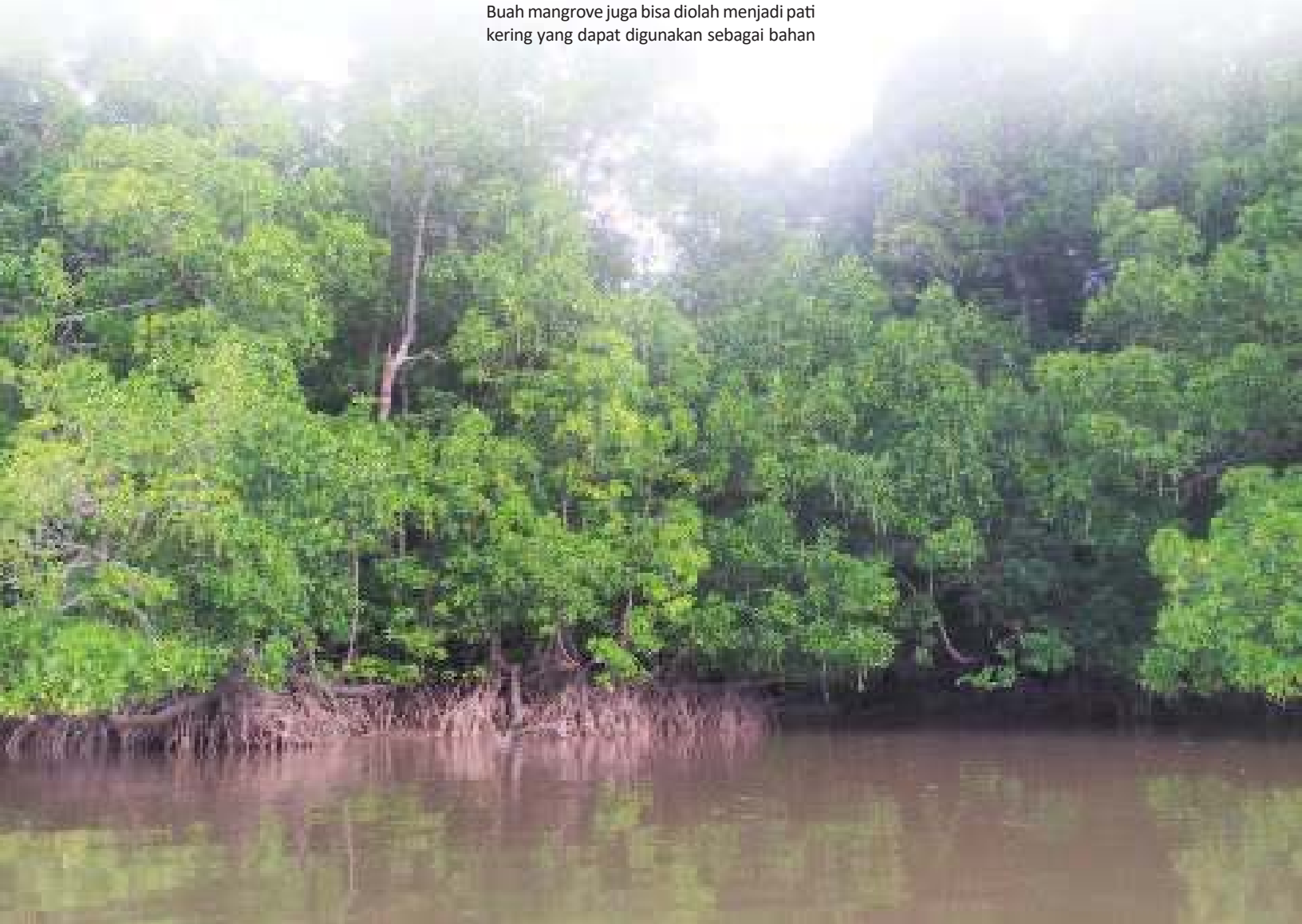
Kawasan mangrove atau yang biasa dikenal dengan kawasan bakau memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon biru untuk mengurangi efek perubahan iklim. Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 10 kali lebih banyak per hektar dibandingkan hutan terestrial. Kapasitas penyimpanannya dapat mencapai 800 - 1.200 ton karbon per hektar dan 80% karbon tersebut tersimpan di dalam tanah. Penyimpanan karbon ini dalam bentuk biomassa hidup, biomassa mati dan tanah serta limbah daun, ranting dan batang mangrove. Namun, ekosistem mangrove juga memiliki konsekuensi jika tidak dapat dikelola dengan baik. Kerusakan pada ekosistem ini melalui pelepasan karbon ke atmosfer adalah faktor pendorong utama

perubahan iklim karena ekosistem karbon biru menyimpan banyak karbon dalam waktu yang sangat lama, dapat mencapai berabad-abad bahkan hingga ribuan tahun.

Selain itu, mangrove juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati. Ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat dalam penyediaan habitat untuk sejumlah spesies mamalia, reptil, amfibi, dan burung yang terancam punah serta perlindungan terumbu karang dan rumput laut. Tidak hanya itu, kawasan mangrove juga mampu memenuhi fungsi sosial dan ekonomi untuk lingkungan hidup di sekitarnya termasuk penyediaan berbagai jenis kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan perlindungan jalur pelayaran terhadap pengendapan. Buah mangrove juga bisa diolah menjadi pati kering yang dapat digunakan sebagai bahan

dasar pembuatan roti dan kue. Dengan potensi ini, mangrove memberikan banyak keuntungan tidak hanya bagi flora dan fauna, tapi juga manusia yang hidup di sekitarnya.

Secara global, luas mangrove di dunia mencapai 16,53 juta hektar dimana jumlah ini telah mengalami penurunan dari luas awal 19,8 hektar di tahun 1980. Negara-negara yang memiliki kawasan mangrove yang luas memiliki peran yang penting dalam melakukan pengembangan kawasan mangrove yang berkelanjutan. Berikut adalah lima negara dengan kawasan mangrove terluas dan persebarannya berdasarkan benua.



TABEL 1. LIMA NEGARA DENGAN KAWASAN MANGROVE TERLUAS DI DUNIA

No.	Negara	Luas Kawasan Mangrove*
1.	Indonesia	20%
2.	Brasil	9%
3.	Australia	7%
4.	Meksiko	5%
5.	Nigeria	5%

*Persentase dari luas kawasan mangrove secara global.

Sumber: World Atlas of Mangroves

TABEL 2. LUAS KAWASAN MANGROVE BERDASARKAN PERSEBARAN BENUA

No.	Benua	Luas Kawasan Mangrove*
1.	Asia	41%
2.	Afrika	18,4%
3.	Amerika Selatan	15,7%
4.	Amerika Utara dan Tengah	14,7%
5.	Oceania	3,7%

Sumber: World Atlas of Mangroves

Dengan luas 3,31 juta hektar, persebaran mangrove di Indonesia meliputi: Tanah Papua 1,49 juta hektar (45% dari total mangrove Indonesia), Kalimantan 735 ribu hektar, Sumatera 666 ribu hektar, Maluku 221 ribu hektar, Sulawesi 118 ribu hektar, Jawa 35 ribu hektar, dan Bali & Nusa Tenggara 34 ribu hektar. Dalam perkembangannya, keadaan hutan mangrove di sebagian wilayah pesisir pantai Indonesia saat ini mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan dan faktor perubahan iklim. Menurut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sekitar 637.000 hektar dari total sebaran mangrove di Indonesia kondisinya rusak kritis. Menanggapi hal ini, tentunya dibutuhkan upaya perlindungan dan pemanfaatan mangrove secara lestari.

Salah satu kabupaten yang fokus pada upaya pelestarian mangrove ini adalah Kabupaten Kaimana mengingat kawasan mangrove di wilayah ini terbilang luas yakni mencapai 52.3268 hektar. Tingkat kepadatan mangrove di Kabupaten Kaimana sangat tinggi dan kondisinya masih baik. Tidak hanya itu, 75,86% mangrove di Kabupaten Kaimana juga termasuk mangrove primer atau mangrove yang dalam kondisi baik tanpa

pernah mengalami kerusakan. Sisanya yaitu 24,14% merupakan mangrove sekunder atau mangrove dari hasil pemulihan karena pernah mengalami kerusakan. Dengan potensi ini, upaya pelestarian mangrove menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi lokal, dan masyarakat.

Masyarakat lokal di sekitar kawasan memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian mangrove mengingat mereka tinggal dan hidup berdampingan. Kurangnya pemahaman mengenai peran penting ekosistem mangrove dan sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari memungkinkan masyarakat untuk mengeksploitasi mangrove secara berlebihan.

Untuk mendukung pengembangan ekosistem mangrove Kaimana yang berkelanjutan, CI Indonesia melalui IKI-PME project bekerjasama dengan Fakultas Teknik Pertanian Universitas Papua dengan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat mengadakan pelatihan peningkatan mata pencaharian yang berlangsung pada 10-14 September 2021 di Kabupaten Kaimana. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove dan memfasilitasi mereka keterampilan pengolahan pangan yang nantinya dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari dan pengembangan bisnis sebagai bagian dari peningkatan mata pencaharian. Pelatihan ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan kegiatan perekonomian yang sudah dirintis sejak awal maupun yang baru akan diinisiasi sehingga memajukan kesejahteraannya dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem mangrove.

Pelatihan ini dilaksanakan di dua kampung yakni Kampung Kambala dan Kampung Yarona. Secara administratif, kedua kampung ini masuk ke dalam wilayah distrik Buruway yang memiliki potensi hasil laut dan hutan. Potensi tersebut digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan penduduk setempat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ikan, sagu, dan hasil pertanian lainnya tersedia cukup luas namun pengolahannya menjadi sejumlah produk yang berbeda masih sangat terbatas.

Partisipasi Aktif Masyarakat Kambala dan Yarona

Kampung Kambala merupakan pusat Distrik Buruway dan memiliki berbagai fasilitas perangkat pemerintahan. Jumlah warga Kampung Kambala meliputi 307 laki-laki dan 293 perempuan. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan aparatur sipil negara (ASN). Umumnya masyarakat Kampung Kambala memiliki pendidikan terakhir SMA. Dengan latar belakang yang beragam, masyarakat Kambala menunjukkan antusias yang tinggi dalam menyambut berbagai inisiasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan di Kambala dilaksanakan selama dua hari yakni 10-11 September 2021 dengan melibatkan masyarakat lokal lintas Rukun Tetangga (RT). Kegiatan dalam pelatihan ini meliputi penyampaian materi mengenai pentingnya ekosistem mangrove yang disertai dengan pembagian materi publikasi berupa flyer dan poster yang dipasang di papan pengumuman fasilitas umum. Disamping itu, praktik pengolahan pangan berbahan dasar ikan dan sagu juga dilakukan untuk menghasilkan sejumlah



Ekosistem Mangrove Kabupaten Kaimana. dok. ci

produk seperti keripik pisang, abon ikan, kerupuk ikan, brownies sagu, cookies sagu, tepung sagu, dan keripik singkong. Target jumlah peserta dalam pelatihan yang dilaksanakan di Kambala adalah 50 orang. Namun antusiasme masyarakat sangat tinggi hingga peserta yang bergabung mencapai 84 orang, dengan komposisi 74 perempuan dan 10 laki-laki.

Hal yang ditekankan dalam pelatihan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di lingkungan sekitar dan melakukan diversifikasi olahan makanan. Selain itu, melalui pelatihan ini peran perempuan didorong agar tidak hanya aktif dalam rangkaian pelatihan saja namun keberlanjutan kegiatan setelah pelatihan tetap dilakukan. Lebih jauh lagi, diharapkan ada tokoh perempuan yang dapat menggerakkan program yang melibatkan partisipasi aktif komunitas perempuan lokal di Kampung Kambala.

Hanya berselang sehari, pelatihan berikutnya dilakukan di Kampung Yarona yang terletak di sebelah barat Kota Kaimana dengan jumlah

penduduk yang mencapai 390 orang. Sebagian besar masyarakat di kampung ini berprofesi sebagai petani. Umumnya, masyarakat Yarona memiliki pendidikan akhir SD. Materi pelatihan yang dilakukan di Kampung Yarona sama dengan yang dilakukan di Kambala. Namun dari sisi jumlah peserta, Kampung Yarona lebih banyak yakni 89 orang dari target 50 orang. Dibandingkan Kampung Kambala, peserta laki-laki yang berpartisipasi di Kampung Yarona cukup tinggi, mencapai 30 orang. Dalam pelaksanaannya, peserta laki-laki juga berperan aktif dalam mengikuti rangkaian pelatihan dimulai dari membuat adonan brownies, menghaluskan ikan, hingga memantau proses penjemuran kerupuk ikan.

Pelatihan di dua kampung ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan pengolahan pangan. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya ekosistem mangrove juga menjadi hal yang sangat penting. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan pembekalan keterampilan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan upaya peles-

tarian kawasan mangrove yang ada di sekitar kampung.

Tindak lanjut

Masyarakat kampung Kambala saat ini belum diperkenalkan dengan lembaga ekonomi kampung yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Oleh karena itu, pembentukan BUMDes dinilai sangat krusial dalam mengelola potensi kampung secara bersama, dengan tujuan seluruh masyarakat kampung lebih sejahtera. Kehadiran BUMDes dinilai penting sebagai wadah untuk membangun sebuah kampung karena pengelolaan bisnisnya akan berjalan maksimal dengan pendampingan dan pengawasan dari BUMDes. Dalam hal ini, pembentukan BUMDes tentu saja didasarkan pada kebutuhan dan potensi kampung setelah melakukan diskusi dengan perangkat kampung karena dianggap sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Arnaldi Nasrum/CI
Editor : Keliopas Krey (Unipa)

Potensi Keanekaragaman Hayati Kampung Ubadari Dalam Penyusunan Dokumen Pengelolaan Hutan Desa



Ikan air tawar disurvei dengan berbagai metode, gillnet digunakan untuk mensurvei ikan di sungai yang lebih besar dan berarus deras. FOTO-FOTO DOK. CI-SESILKADRIE

Dalam RPMJ KLHK 2015-2019 sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yang kedua ditarget 12,700.000 ha untuk skema pengembangan program perhutanan sosial (PS). Provinsi Papua Barat sendiri berdasarkan peta indikatif perhutanan sosial dialokasikan sekitar 47,105 ha. Dalam perkembangannya skema perhutanan sosial di Papua Barat sudah berjalan dengan diterbitnya 14 ijin hutan desa (HD). Dari luas aktual di tahun 2021 ini baru terwujud seluas 25.323 ha yang diperuntukan untuk 14 unit HD dengan adanya ijin sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun fakta lain yang dijumpai bahwa belum adanya dokumen rencana

pengelolaan hutan desa (RPHD) sebagai salah satu syarat utama pembentukan skema HD itu sendiri. Hal tentunya akan berdampak pada keberlangsungan program ini dan dapat mengakibatkan dicabutnya ijin tersebut jika tidak mampu beroperasi dengan baik.

Tulisan ini menyampaikan pengalaman dan pendekatan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa Kampung Ubadari, sebagai bagian dari program perhutanan sosial. Secara umum, kegiatan penyusunan dilaksanakan melalui 3 tahapan: proses sosialisasi dan persiapan kegiatan lapangan; survai potensi dan keragaman jenis serta sosial-ekonomi; dan penyusunan rencana



Kupu-kupu diamati dengan menggunakan mist net.



Kelelawar buah hidung tabung, banyak ditemukan di Hutan Obadari. Ada sekitar 14 spesies kelelawar yang diamati dalam survei ini.



Tim Survei. Baris belakang: Ambramsyah (botanis), Hendrik Burwos (mamologis, asisten lapangan), A. Warawarin (Asisten Botani), A. Kilmaskosu (Burung, asisten lapangan), P. Taruwutubun (herpet, asisten lapangan), Burhan Tjaturadi (manajer lapangan, herpetologis), Keliopas Krey (herpetologis), Wiji Suharsono (asisten botani). Baris depan: Sesile Kadri (Fotografer), Evie Warrikar (Lepidopterist), Henni Ohee (ichthyologist), Risna Taware (economist), Marthen Jitmau (botanis), dan Yance de Fretes (Ketua Tim).

pengelolaan. Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan pada Oktober 2020-April 2021.

Potensi dan Keragaman Jenis Flora dan Fauna

Survei potensi hutan dan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada 5-16 Februari

2021 dengan melibatkan 9 ilmuwan dari Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih. Sedikitnya ada 6 taksa utama flora dan fauna yang disurvei termasuk di dalamnya botani; kupu-kupu, ikan air tawar; herpetofauna; burung dan mamalia. Selain inventarisasi hutan, tim juga melakukan

survei keadaan sosial ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Selain keanekaragaman jenis flora yang tinggi, wilayah hutan ini juga menjadi rumah bagi beberapa burung langka dan endemik, mamalia, kupu-kupu, dan herpetofauna. Survei berhasil mencatat 848 spesies tumbuhan tingkat pohon dengan diameter rata-rata adalah 89 cm setinggi dada (dbh) dan tinggi pohon rata-rata 20 m. Tumbuhan didominasi oleh sekitar 10 spesies, tetapi matoa (*Pometia pinnata*) dan pala (*Myristica argentea*) termasuk spesies yang umum. *Pometia pinnata* dominan memiliki banyak tegakan pohon yang beriameter lebih besar, namun *Intisia palembanica* dan *I. bijuga* adalah spesies pohon dengan diameter yang paling lebih besar.

Untuk keragaman spesies kupu-kupu dari hasil survei ini berhasil mencatat 103 spesies dari enam famili. Di antara semuanya, terdapat 2 spesies endemik dan langka (*rare*) yakni *Mycalesis pemotata* dan *Harsiesis yolante*, yang jarang ditemukan di daerah New Guinea, tetapi berlimpah di hutan Ubadari; serta 1 spesies yang dilindungi *Ornithoptera priamus*. Spesies kupu-kupu yang termasuk dalam famili *Nymphalidae* hadir dengan jumlah yang tertinggi yaitu 45 spesies diikuti oleh kupu-kupu Famili *Lycaenidae*, *Papilionidae*, *Pieridae* dan yang terendah *Hesperiidae* (5 spesies).

Sementara hasil survei untuk spesies ikan air tawar tercatat 22 spesies dari 14 famili. Walaupun sebagian besar spesies ikan air tawar memiliki penyebaran yang luas, tetapi kebanyakan spesies merupakan spesies yang langka dalam survei ini, karena hanya berhasil diamati pada lokasi tertentu. Tercatat spesies yang endemik *Hephaestus lineatus*, daerah Kepala Burung (*Vogelkop*) dan spesies ikan pelangi yang menarik, karena belum dilaporkan sebelumnya, *Melantonia sp.*

Survei *herpetofauna* menggunakan metode VAES (*Visual Audio Encounter Survey*) pada transek sepanjang 2.000 m dalam hutan dan *patch sampling* menyurvei habitat-habitat di luar transek. Total 45 spesies *herpetofauna* berhasil dicatat selama survei. Lima belas spesies katak meliputi famili *Hylidae*, *Microhylidae*, dan *Ranidae*. Sedangkan reptil tercatat seba-



Tropidonophis doriae sedang diamati di atas ranting pohon saat survei di malam hari.

nyak 30 spesies yang meliputi enam famili yakni *Scincidae*, *Geckonidae*, *Varanidae*, *Colubridae*, *Pythonidae*, dan *Elapidae*. Kebanyakan spesies herpet hanya dapat diidentifikasi sampai tingkat genus saja, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan analisis lanjutan untuk menentukan nama spesies yang tepat. Kebanyakan spesies yang dijumpai spesies endemik *New Guinea*. Katak *Cornufer papuensis* ditemukan hidup *co-habitat* dengan *C. batantae* di hutan dalam kebun pala. Tercatat 3 individu jenis *Microphekis ikaheka* (ular putih) selama survei sangat luar biasa. Temuan menunjukkan bahwa hutan ini menyediakan makanan yang cukup (tikus dan mamalia kecil) untuk spesies ini.

Untuk pengamatan burung dilakukan pada dua transek dengan teknik pengamatan spesies burung dilakukan dengan menggunakan unit contoh kombinasi transek garis dengan VCP (*Variable Circular Plot*). Hasil pengamatan berhasil mencatat 143 spesies burung dari 46 famili, termasuk spesies *Casuaris casuaris* (Kasuari Utara). Setidaknya ada 3 tempat pengeraman telur aktif yang diamati oleh tim. Bersamaan dengan itu, sedikitnya 5 jenis burung cenderawasih juga telah diamati. Walaupun tercatat ada sekitar 46 famili, namun kebanyakan famili hanya terdiri dari 1-2 spesies saja. Hanya ada 6 famili dengan 5 spesies, 3 famili dengan 10-12 spesies dan

1 famili (kelompok merpati, *Columbidae*) yang hadir dengan 23 spesies. Kelompok *Paradisea* (Cenderawasih) terdiri dari 5 spesies termasuk *Maducodia ater*, *Seleucidis melanoleucus*, *Cicinnurus regius*, *Paradisaea minor* dan *Ptiloris magnificus*. Cendrawasih Kecil (*Paradisaea minor*) dapat diamati setiap hari sekitar pukul 7-9 pagi di tepi hutan ini, sehingga merupakan potensi untuk pengembangan kegiatan wisata burung.

Sementara itu untuk survei spesies mamalia berhasil mencatat sekitar 34 spesies yang berasal dari 13 famili. Kebanyakan mamalia yang diamati menggunakan *misnet* dan didominasi oleh *Macroglossus minimus* (20 individu), *Dobsonia magna* (8 individu) dan *Hipposideros papua* (8 individu).

Sosial-Ekonomi Masyarakat Kampung Ubadari

Saat ini ada sekitar 46 keluarga di Kampung Ubadari dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 208 jiwa, 99 di antaranya perempuan dan 109 laki-laki. Sebagian besar responden bekerja sebagai petani (64%), sedangkan sisanya bekerja sebagai pedagang (10%) dan tukang kayu (10%). Meskipun sebagian besar bekerja sebagai petani, tetapi mereka bergantung pada kebun pala. Beberapa kebun kecil yang dapat diamati di tepi hutan digunakan untuk menanam singkong, pisang dan berbagai sayuran hijau. Kebun ini dimaksudkan untuk konsumsi lokal, tetapi kadang-kadang dijual secara tunai di Fakfak. Rata-rata mereka menghasilkan Rp. 4-5 juta per tahun, terutama dari penjualan pala. Rata-rata satu rumah tangga mengumpulkan 10-50 kg buah pala. Harga pala segar berkisar Rp. 500.000 per 1000 buah, sementara harga buah kering sekitar Rp. 100.000-200.000 per kg.

Masyarakat memanfaatkan sekitar 70 jenis tumbuhan untuk berbagai keperluan, mulai dari obat-obatan hingga kebutuhan



Tim sedang melakukan pengukuran diameter pohon.



Hylophorbus spp. from Microhylidae. Sekitar 15 spesies katak berhasil dicatat selama survey dilakukan. Lebih banyak upaya yang dibutuhkan untuk menentukan spesies dan penyebarannya.

Di antara semuanya, terdapat 2 spesies endemik dan langka (rare) yakni *Mycalesis pematata* dan *Harsiesis yolantae*, yang jarang ditemukan di daerah New Guinea, tetapi berlimpah di hutan Ubadari; serta 1 spesies yang dilindungi *Ornithoptera priamus*.

rumah, namun masyarakat Ubadari termasuk dalam kategori jarang memanfaatkan hutan. Mereka lebih sering menggunakan hutan untuk mengumpulkan dahan kering atau yang sudah mati untuk kayu bakar. Berburu sangat jarang dilakukan dan orang hanya berburu (pemasangan jerat) rusa jika ada acara tertentu di desa. Karena hutan ini didominasi oleh kebun pala, masyarakat hanya menggunakan hutan pada saat panen pala yang biasanya dua kali setahun.

Masyarakat menyadari bahwa hutan mereka adalah “kepala air” Sungai Ubadari sehingga tidak ada perkebunan di daerah

kepala air. Selama berdiskusi dengan masyarakat mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan, ada beberapa gagasan yang muncul. Misalnya mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, mendorong kegiatan ekowisata alam dengan memanfaatkan kegiatan wisata Sungai Ubadari yang sudah ada, wisata mangrove dengan jalur: Sungai Ubadari -Kaburur-Pantiburak, yang memakan waktu 20-60 menit perjalanan. Pantiburak merupakan situs agama penting bagi Provinsi Papua Barat, dimana terdapat bangunan mesjid yang tertua. Hutan Ubadari juga memiliki beberapa goa alam dengan berbagai ukuran

pengelolaan 2021-2031. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 5 hari (9-16 Juli 2021) dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah sosialisasi dan presentasi hasil survai biodiversitas dan potensi hutan; tahap kedua pelatihan penggunaan GPS bagi anggota masyarakat pengelola hutan dan tahap ketiga pelatihan penyusunan rencana pengelolaan. Lembaga pengelola hutan desa (LPHD) Kampung Ubadari telah ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2018. Sesuai Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No.P.16/PSKL/Set/ PS/0/12/2016) LPDH bertugas untuk 1) membuat tata batas hutan desa, 2) sonasi; 3) penyusunan rencana



Kali Ubadari.

dengan jarak tempuh 30-90 menit yang juga merupakan objek wisata alam yang menarik. Masyarakat juga mengusulkan pembuatan aturan atau larangan penggunaan senapan angin, larangan berburu bagi masyarakat dari luar kampung, termasuk pemasangan jerat, penerbitan tamanan obat dari hutan Ubadari serta buku keanekaragaman hayati hutan Ubadari.

Penyusunan Rencana Pengelolaan HD

Tahapan setelah melaksanakan survei dilanjutkan dengan penyusunan rencana

pemanfaatan dan pengelolaan; dan 4) menyusun rencana monitor, pelaporan dan evaluasi. Penyusunan Rencana Pengelolaan menghasilkan 9 rencana pengelolaan, mulai penataan batas, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengembangan ekowisata, penguatan kelembagaan, pengembangan pusat informasi ekowisata.

Penulis : Evie L. Warikar (Uncen)
Editor : Antoni Ungirwalu

Anggrek Biru

Penemuan Kembali Anggrek Langka dan Endemik Raja Ampat



Anggrek biru. DOK. MAURITS KAFIAR (FFI)

Kepulauan Raja Ampat, surga petualangan dunia yang berada di ujung barat laut Pulau Papua. Tumbuhan dan satwa liar yang hidup di Raja Ampat telah beradaptasi terhadap proses geologi yang telah berlangsung ribuan tahun. Tingkat endemisitas tinggi yang dimiliki oleh Kepulauan Raja Ampat disebabkan oleh wilayahnya yang mempunyai tipe habitat dengan percampuran

batuan induk antara aluvial, vulkanik, ultrabasa serta kapur.

Menurut Supriana (1999) Raja Ampat memiliki 3 dari 22 area di Papua yang dikenal sebagai tempat yang memiliki tingkat endemisitas yang sangat tinggi untuk floranya. Di antara pulau besar yang ada di Kepulauan Raja Ampat, Pulau Waigeo

memiliki beberapa jenis tumbuhan yang endemik.

Pulau Waigeo adalah salah satu pulau eksotis terbesar yang memiliki kekayaan tumbuhan dan satwa liar yang tersimpan dalam hijaunya hutan hujan tropis. Pulau ini dulunya merupakan bagian dari Paparan Sahul yang terpisah akibat adanya tumbukan



Anggrek biru. DOK. YANUAR ISHAQ (FFI)

Lempeng Australia-India dengan Lempeng Pasifik. Peristiwa tersebut mengakibatkan proses spesiasi keanekaragaman hayati yang khas dan unik. Eksplorasi tumbuhan yang dilakukan oleh van telah dilakukan berbagai peneliti asing dan Indonesia, mulai dari tahun 1960 sampai saat ini menunjukkan bahwa Pulau Waigeo memiliki kekayaan tumbuhan endemik yang tinggi. Sembilan 9 jenis tumbuhan endemik yang telah ditemukan yakni *Dendrobium azureum*, *Rhododendron cornu-bovis*, *Rhodamnia waigeoensis*, *Alstonia beatricis*, *Maesa rheophytica*, *Guioa waigeoensis*, *Psychotria tripedunculata*, *Alyxia laurina* dan *Wallaceodoxa raja-ampat*.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Fauna & Flora International Indonesia Programme dan anggota masyarakat Teluk Mayalibit berhasil mencatat sekitar 78 jenis tumbuhan langka dan endemik di Cagar Alam Waigeo Timur, salah satunya jenis tumbuhan endemik Waigeo yakni *Dendrobium azureum* atau anggrek biru.

Kisah Anggrek Biru

Anggrek biru atau *Dendrobium azureum* ditemukan pertama kali oleh Lucy Evelyn Cheesman. Ia adalah peneliti serangga asal Inggris yang terkenal karena melakukan ekspedisi solo menjelajah kepulauan Pasifik Selatan pada tahun 1938. Dalam salah satu perjalanannya yang ditulis pada buku berjudul *Six-legged Snakes in New Guinea* (1949) turut mencantumkan penemuan berbagai jenis anggrek yang menempel di pohon dengan warna krim, oranye, dan biru di Pulau Waigeo. Anggrek-anggrek yang diceritakan dalam buku tersebut diabadikan dalam koleksi herbarium di Museum *Natural History* di Inggris dan belum teridentifikasi.

75 tahun kemudian, tepatnya tahun 2013, André Schuiteman seorang peneliti anggrek di KEW Royal Botanic Garden menemukan koleksi anggrek *Dendrobium* tanpa nama dalam sebuah laci penyimpanan di Museum *Natural History*. Sebuah spesimen herbarium anggrek berwarna biru dari *New Guinea* menarik perhatiannya. Menurutnya, anggrek epifit dengan bunga berwarna biru sangat jarang ditemui karena dari 17 ribu anggrek epifit hanya satu ini yang memiliki warna biru. Tambahnya lagi, bunga anggrek *dendrobium* umumnya tampil dengan warna-warna yang ada di pelangi.

Kemudian André meyakini bahwa anggrek epifit dengan warna biru sangat langka dan spesimen tersebut dideskripsikan menjadi jenis baru dengan nama *Dendrobium azureum*. Kata *azureum* atau *azurea* berarti biru tua dalam bahasa Latin.

Eksplorasi Anggrek Biru

Tahun 2016, ketika tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat (BBKSDA Papua Barat) dan Fauna & Flora International melakukan eksplorasi biodiversitas di hutan Pulau Waigeo secara tidak sengaja mendokumentasikan anggrek biru. Ini merupakan dokumentasi pertama kali anggrek biru di alam.

Karena informasi anggrek biru sangat minim, baik mengenai populasi, sebaran dan habitatnya, BBKSDA dan FFI melakukan survei pada tahun 2020 dan 2021, melakukan survei khusus untuk mencari anggrek biru dan berhasil menemukannya. Eksplorasi ini memberikan pemahaman baru mengenai anggrek biru, tidak hanya penting untuk

konservasi tetapi juga tentang taksonomi, ekologi dan juga biogeografi dari jenis ini.

Seperti pada umumnya anggrek *Dendrobium* hidup secara epifit. Anggrek epifit mendapatkan unsur hara dari udara, substrat seperti kulit maupun serasah serta simbiosis dengan *mikoriza*. Anggrek *Dendrobium* tumbuh tegak, tidak bercabang serta memiliki ruas di batang yang menebal membentuk *pseudobulb* yang dapat menyimpan air dan makanan selama musim kering.

Anggrek ini diamati pada ketinggian antara 763-897 meter di atas permukaan laut, dan tumbuh di pangkal pohon dari pohon inang bahkan hingga di lantai hutan yang berserasah dan berlumut. Jenis pohon yang menjadi inang termasuk *Agathis labillardieri*, *Dillenia papuana*, *Elaeocarpus*, *Syzygium*, *Litsea* dan *Rapanea*. Dari temuan di habitat aslinya, tercatat sebanyak 29,7% hidup sebagai epifit dan menempel di batang pohon. Sedangkan 70,3% lainnya hidup di lantai hutan dengan serasah dengan ketebalan sekitar 30 cm. Anggrek ini tumbuh berasosiasi dengan anggrek *Bulbophyllum* spp. yang memiliki bunga warna kuning kecil serta *Dendrobium* berbunga merah.

Kepekatan warna pada anggrek biru kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah kandungan antosianin dari pigmen pada petal dan sepal. Besarnya kandungan antosianin dipengaruhi oleh lingkungan berupa suhu, intensitas cahaya, pH substrat serta ketersediaan nutrisi. Warna yang mencolok akan mengundang polinator yang umumnya pada anggrek diketahui adalah serangga untuk mampir dan membantu penyerbukan.

Usulan Status Konservasi Anggrek Biru

Anggrek biru perlu mendapat perhatian karena memiliki sebaran terbatas, hanya di Pulau Waigeo. Mengingat penyebarannya yang terbatas, maka dianggap perlu melakukan penilaian mengenai status konservasi dan lindungnya.

| Penulis : Yanuar Ishaq Dc, dkk
Editor : Yance de Fretes



Pimpinan dan Seluruh Staf
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Mengucapkan

SELAMAT MERAYAKAN

Hari Natal 25 Desember 2021

&

Tahun Baru 1 Januari 2022



Pimpinan dan Seluruh Staf
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Mengucapkan

SELAMAT MERAYAKAN

**"HARI ULANG TAHUN
GKI di TANAH PAPUA Ke - 65 Tahun"**



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 2021

**"INDONESIA TANGGUH
INDONESIA TUMBUH"**

Telah Hadir.....!!

"SMA TARUNA KASUARI NUSANTARA PAPUA BARAT"

**Untuk Mendingun Sumber Daya Manusia "ROTAN HARUS
di Papua Barat Tidak ada Estilah "TETAP ROTAN-!
Tidak ada Rotan Akar pun Jadi"**

Dia Romogga Mandras

Gubernur Papua Barat



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
GOVERNMENT OF WEST PAPUA PROVINCE**



**KASUARI
INOVASI**



Mendorong Peran Pemuda Melalui Program Ilmuwan Muda Papua

Ilmuwan Muda Papua (IMP) merupakan program kolaborasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat dengan Yayasan EcoNusa. Program ini bertujuan untuk mengorganisir partisipasi anak muda Tanah Papua di seluruh Indonesia melalui penelitian. Program ini sebagai basis data potensi dan kearifan lokal yang ilmiah sehingga selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.

Konsep dari program ini berupa dana hibah sebesar maksimal Rp. 15.000.000,- yang diberikan kepada para mahasiswa terpilih yang sedang menjalankan skripsi

di Perguruan Tinggi Tanah Papua. Program IMP telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan telah berhasil memfasilitasi 10 mahasiswa dari Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih dalam melakukan penelitian mereka. Beberapa diantaranya melakukan penelitian terkait asosiasi ikan Pomacentridae dengan terumbu karang diatom sebagai bioindikator kualitas air Sungai Pami Amban Manokwari dan kontribusi nilai sosial budaya usaha peternakan babi terhadap pendapatan ekonomi keluarga di Kabupaten Maybrat.

Kesempatan bagi para mahasiswa di Tanah Papua berlanjut lagi pada tahun 2021. Program IMP mengalami penambahan kuota

Pemaparan materi oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si juga sebagai tim panel bagi peserta Bootcamp Ilmuwan Muda Papua. DOK. BALITBANGDA.PB

Ilmuwan Muda dari yang semula hanya 10 orang pada tahun 2020 menjadi 25 orang pada tahun 2021. Tambahan kuota penerima bantuan penelitian sebanyak 15 orang merupakan bentuk dukungan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. IMP 2021 menyetujui tema Mengelola Sumberdaya Alam dan Budaya di Tanah Papua dengan empat sub tema yaitu konservasi hutan dan laut, dampak dan solusi krisis iklim, pemanfaatan hutan dan laut oleh masyarakat adat, perempuan dan kaum muda, komunikasi dan edukasi lingkungan.

Ilmuwan Muda Papua 2021 menggandeng para panelis hebat dan berpengalaman yakni Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S. Hut, M. Si, FLS (Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat), Prof. Jatna Supriatna, M. Sc, Ph.D (Guru Besar FMIPA UI), Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si (Guru Besar FPIK UNIPA), Dr.



Praktek penggunaan alat *Global Positioning System* (GPS) di lokasi *fieldtrip* (kiri atas).
DOK. BALITBANGDA PB



Kegiatan *fieldtrip* peserta Bootcamp IMP Tahun 2021, lokasi di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja Amban.
DOK. BALITBANGDA PB



Pembukaan Bootcamp Ilmuwan Muda Papua dilakukan juga secara daring.
DOK. BALITBANGDA PB

rer. nat Henderite L. Ohee (Dosen Biologi UNCEN), Victor Yansen Kambu, S.TP (Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Balitbangda Papua Barat) dan Muhammad Farid, Shut, M.Sc (Yayasan Eco-Nusa).

Sebanyak 104 mahasiswa dan mahasiswi dari 12 Perguruan Tinggi di Tanah Papua, ikut berpartisipasi untuk memasukkan proposal penelitiannya. Seluruh proposal penelitian mahasiswa diseleksi secara administrasi maupun substansi oleh para panelis hingga terpilih 35 proposal terbaik. Guna mendapatkan pembobotan dan penilaian maka proposal tersebut selanjutnya dipresentasikan oleh mahasiswa didepan para panelis secara *online*. Akhirnya terpilih 25 mahasiswa IMP tahun 2021 melalui penilaian yang mendalam dan ketat. Mereka berasal dari lima Universitas di Tanah Papua yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Papua, Politeknik Pembangunan Pertanian, Universitas Victori, dan Universitas Musa-

mus. Topik-topik penelitian mahasiswa ini cukup beragam mulai dari perancangan venue at letik di Kabupaten Merauke (pendekatan arsitektur *post-modern*), pemanfaatan limbah daun pisang kering sebagai media persemaian benih kakao (*Theobroma cacao*) di Manokwari Selatan, keragaman jenis burung pada areal ekowisata *bird watching* di Kampung Malagufuk Kabupaten Sorong, hingga pemanfaatan buah merah (*Pandanus conoideus*) sebagai pewarna alami kosmetik pemerah pipi (*blush on*) dalam bentuk *stick*.

Program IMP bagi 25 mahasiswa terpilih tahun 2021 ini juga diboboti kualitasnya melalui pelatihan dalam bentuk *bootcamp*. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sebelum melakukan penelitiannya. Para mahasiswa yang terpilih juga diberikan pelatihan pasca *bootcamp* berupa Penulisan Karya Ilmiah Populer yang akan dipublikasi skala nasional maupun internasional. Gubernur Papua

Barat menyampaikan pada penutupan *bootcamp* IMP 2021 bahwa Tanah Papua memiliki kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang sangat melimpah. Kekayaan tersebut merupakan modal alam yang harus dikelola secara arif dan bijaksana, sehingga bisa dinikmati juga oleh generasi yang akan datang. Penelitian yang berkualitas dan kajian teoritis sangat penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan dalam mengelola sumberdaya alam dan budaya yang sifatnya berkelanjutan. Tentunya untuk melakukan itu semua perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Melalui program IMP ini diharapkan dapat mengisi kekurangan peneliti muda papua baik kuantitas maupun kualitasnya dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah.

Penulis: Shifa Fauziah dan F.X Adi
Maturbongs (Yayasan EcoNusa)
Editor: Keliopas Krey (Unipa)

Tulisan Semi Populer Maupun Ilmiah, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK YANG TAK TERPISAHKAN

Pengelolaan sumber daya alam dan tata guna lahan di Provinsi Papua Barat tentunya memiliki tantangan yang sangat kompleks yang memerlukan upaya-upaya nyata untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan komitmen pemerintah.

Dalam melaksanakan upaya mencapai komitmen pembangunan berkelanjutan tersebut, mitra pembangunan dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dan saling bersinergi. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk program kegiatan maupun berupa kebijakan-kebijakan strategis terutama dalam upaya mengawal komitmen tentang pembangunan berkelanjutan. Program dan kebijakan ini tentunya dilakukan berdasarkan kajian atau penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi komitmen pembangunan berkelanjutan yang harus dilakukan sehingga produk kebijakan maupun program kegiatan yang dilakukan tidak salah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena

itu, pemerintah daerah memerlukan tenaga ahli peneliti yang tidak hanya berasal dari perguruan tinggi melainkan berasal dari internal pemerintah, yaitu berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah daerah itu sendiri.

Melihat peran penting yang dimiliki oleh peneliti dalam mendukung berbagai upaya pemerintah daerah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat bersama WRI Indonesia (Mitra Pembangunan) melaksanakan program bersama dalam rangka peningkatan kapasitas PNS melalui kegiatan Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah dan Artikel Semi Populer bagi PNS di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat serta Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, terhitung mulai pada tanggal 06 – 08 September 2021 secara daring dan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat, Raymond RH. Yap, SE, M.TP mewakili Gubernur Papua Barat.

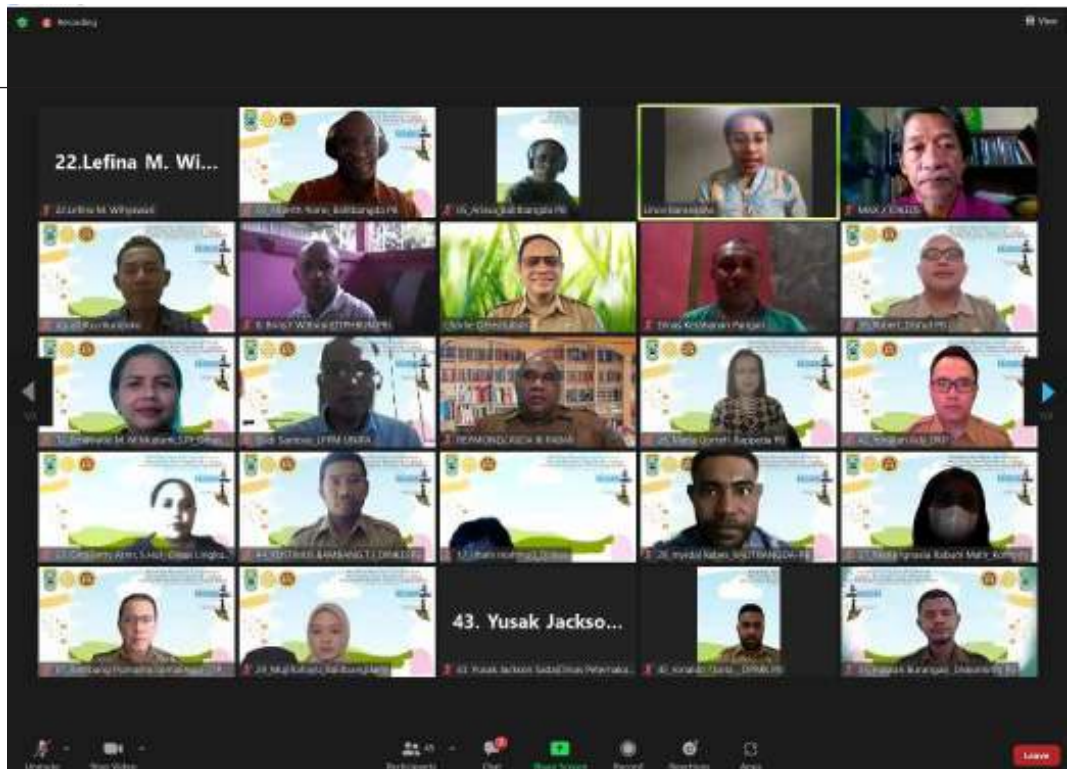
Saat memberikan arahan, Raymond RH Yap, SE, M.TP mengatakan Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi para PNS yang akan terlibat di dalam kegiatan penelitian dan kajian. “Karena perencanaan dan pembangunan yang baik sangat bergantung pada hasil kajian dan penelitian yang baik,” kata Raymond RH Yap melalui virtual meeting. Ia juga menambahkan bahwa selama ini Balitbangda Papua Barat telah banyak melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM, terutama anak-anak muda Papua.

Sementara itu, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS dalam arahannya mengatakan penulisan naskah jurnal ilmiah dan artikel semi populer itu sangat penting. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggung jawaban publik yang harus dilaporkan kepada masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab. Karena itu, agar pesan kita tersampaikan dengan baik, maka perlu dipelajari teknik-tekniknya. Sehingga dengan karya yang baik dan bermutu, ini akan

MAJALAH

KASUARI INOV

Pembukaan Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah dan Artikel Semi Populer yang diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat dan WRI Indonesia. DOK. BALITBANGDA PB



menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk menentukan kebijakan pembangunan. Karya-karya yang dihasilkan melalui artikel populer dan artikel ilmiah, diharapkan dapat menjembatani para pengambil kebijakan dan masyarakat umum.

Kegiatan yang awalnya sesuai rencana akan diikuti oleh 30 peserta, namun karena antusias dari peserta yang cukup tinggi sehingga terjadi penambahan peserta dari jumlah sebelumnya menjadi 46. Hal ini menggambarkan bahwa ditengah-tengah kesibukan pegawai yang cukup tinggi serta pengaruh birokrasi yang sangat kuat, ternyata masih banyak PNS yang memiliki keinginan untuk menulis artikel ilmiah maupun semi populer.

Dari keseluruhan peserta, terdapat 14 OPD yang mengirimkan pegawainya sebagai peserta pelatihan, diantaranya Balitbangda, Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan,

Bappeda, Dinas KOMINFO dan Statistik, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Selain itu, terdapat juga tiga (3) Mitra Pembangunan lokal yang turut serta mengikuti kegiatan ini yaitu Mnuqwar, PERDU dan Panah Papua.

Instruktur yang dihadirkan dalam pelatihan ini adalah dosen dan peneliti dari Universitas Papua, yaitu Ir. Max J. Tokede, MP, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P, Dr. Agustinus Murdjoko, S.Hut, M.Sc, Dr. Antoni Ungirwalu, S.Hut, M.Sc dan Dr. Ir. Mulyadi Djaya, M.Si. Adapun materi-materi yang diberikan antara lain, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, Bahasa Karya Ilmiah, Proses Penulisan Karya Ilmiah, Penggunaan Ilustrasi Dalam Karya Ilmiah (Tabel, Gambar, dll), Memahami plagiarisme dan etika penulisan (Penggunaan

software Turnitin, Zotero, Mendeley), Teknik Penulisan Artikel Semi Populer, Bahasa Artikel Semi Populer, Proses Penulisan Artikel Semi Populer, Teknik Penelusuran Informasi dan Pengacuannya, serta Teknik Penyusunan Pertanyaan Wawancara.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan semangat kembali kepada para PNS untuk menulis serta mempublikasikannya dalam bentuk artikel semi populer melalui wadah yang telah ada di Balitbangda Provinsi Papua Barat yaitu Majalah Kasuari Inovasi maupun dalam bentuk tulisan ilmiah yang dapat dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Igya ser hanjop.

Penulis: Chris Maweikere (Balitbangda PB)
Editor: Ezrom Batorinding



A photograph of a waterfall in a dense forest. The water is captured with a long exposure, creating a soft, white, and slightly blurred effect as it falls over dark, mossy rocks. The surrounding trees and foliage are vibrant green, with sunlight filtering through the canopy, creating a dappled light effect. The overall scene is serene and natural.

PANORAMA

Air terjun fulica Sowi I
Manokwari.



Igya ser hanjop
Jurnal Pembangunan Berkelanjutan



! Call for papers

Jurnal Igya Ser Hanjop Pembangunan Berkelanjutan Volume 3

Igya Ser Hanjop : Jurnal Pembangunan Berkelanjutan merupakan jurnal yang menyediakan sumber informasi ilmiah yang ditujukan untuk peneliti, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan. *Igya Ser Hanjop* menerbitkan manuskrip original penelitian yang berfokus pada hasil penelitian tentang berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. *Igya Ser Hanjop* diterbitkan secara on-line dan dicetak dua kali dalam setiap volume oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Kami mengundang para peneliti, pengajar, mahasiswa, aktivis, ASN Se - Provinsi Papua Barat untuk berpartisipasi dengan mengirimkan artikel (Bahasa Indonesia/ Bahasa Inggris) baik hasil riset lapangan atau review.

Syarat dan ketentuan :

- Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah manapun
- Panjang artikel minimal 38.000 dan maksimal 40.000 karakter tanpa spasi
- Untuk template penulisan silahkan unduh di <https://jurnal.papuabaratprov.go.id/index.php/ish/libraryFiles/downloadPublic/1>
- Referensi minimal 15 artikel Jurnal Ilmiah elektronik terkini (10 tahun terakhir)
- Panduan penulisan lainnya dapat dilihat pada <https://jurnal.papuabaratprov.go.id/index.php/ish/about/submissions>

Pengiriman artikel dan Proses publikasi artikel tidak dipungut biaya (gratis).
Submit artikel :

- <https://jurnal.papuabaratprov.go.id/index.php/ish/about/submissions>
- igyaserhanjop@balitbangdapapuabarat.com

Alamat : Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi,
Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2 dan 3,
Arafai - Manokwari

INFORMASI WA : +62 852-5460-7856 /LINCE BARANSANO

Rp. 1jt
bagi penulis
yang artikelnya
dimuat dalam
setiap edisi

TRANSAKSI MUDAH DENGAN

mobile banking & SMS banking Bank Papua



- Transfer Antar Rekening Bank Papua
- Transfer Antar Rekening Bank Lain
- Bayar Listrik PLN
- Bayar Air PDAM
- Bayar Telepon
- Beli Pulsa Telkomsel
- Beli Pulsa Indosat
- Beli Pulsa XL
- Beli Pulsa PLN
- Pembayaran Kartu Kredit

DOWNLOAD APURASNYA DI:

SMS Banking





PAPUA CUSTOMER CARE

Kemudahan akses informasi melalui
Official Whatsapp Bank Papua

 **0813 4460 5555**



Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat



Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat hadir sebagai organisasi perangkat daerah yang diharapkan dapat menjawab persoalan kesehatan di Provinsi Papua Barat, sesuai dengan visinya Menjadi Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Papua Barat Yang Sehat, Berkualitas, Mandiri dan Berkeadilan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat saat ini dipimpin oleh Otto Parorrongan, SKM, M.Mkes. Program kesehatan yang menjadi prioritasnya adalah Penyakit yang banyak diderita dan dialami oleh masyarakat kita di Tanah Papua terutama malaria, tuberkulosis (TBC), HIV AIDS, kaki gajah, kusta, *stunting* (kondisi anak yang kerdil). Kedua, program pelayanan kesehatan bergerak dari satu kampung ke kampung yang lain pada daerah terpencil dan sulit dijangkau dan ketiga Program Kesehatan ibu dan anak.

Penyakit prioritas hampir ada pada semua wilayah Papua Barat dan ditangani secara simultan, tidak secara sendiri. Contohnya ketika melakukan pelayanan dari kampung ke kampung dan menemukan penyakit prioritas langsung diobati oleh dokter spesialis, ahli gizi atau perawat. Semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat dilayani dengan baik.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sendiri belum memasukan dan melaporkan untuk menjadi program Inovasi. Dinas ini hanya melakukan program lanjutan yang saling berkesinambungan dan tidak bisa dihentikan seperti penanganan suatu penyakit seperti HIV AIDS, kusta yang pengobatannya terus berlanjut karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masa pengobatan.

Terlepas dari Satgas Covid Papua Barat, berikut ini peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Dinas Kesehatan tidak bisa terlepas dari satuan tugas karena sejak adanya pandemi memang Gubernur membentuk satuan tugas tersendiri untuk menangani covid 19, begitupun pada tingkat pusat sampai daerah. Dinas Kesehatan tidak akan mampu melaksanakan tugas sendiri, apalagi ini wabah yang terkait dengan hampir semua sektor. Wabah yang bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia/ global disebut Pandemi. Jadi Dinas Kesehatan tidak bisa terlepas dari satuan tugas yang telah di bentuk oleh Gubernur Papua Barat dan bergerak sesuai arahan dan perintah dari ketua umum satgas covid yaitu Gubernur Papua Barat, Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan ketua pelaksana harian Kepala BPBD sehingga tidak jalan sendiri-sendiri namun tetap dalam koridor.

Covid-19 sangat menjadi program prioritas karena wabah ini membuat banyak hal serta kegiatan tidak bisa dikerjakan secara normal sehingga mendapat perhatian serius yang

Otto Parorrongan, SKM, M.Mkes
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
DOK. DINKES PB

ditangani oleh pemerintah di seluruh dunia tanpa terkecuali sehingga penyebaran covid-19 bisa dihentikan penularannya.

Strategi yang dilakukan contohnya melakukan deteksi dini covid 19 pada pintu bandara, pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Petugas di Dinas Kesehatan selalu dilibatkan untuk melakukan test PCR atau swab sebelum melaksanakan kegiatan. Melakukan program Vaksinasi massal dan vaksinasi rutin yang pada puskesmas-puskesmas yang hampir dilakukan setiap hari diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Penurunan tingkat penularan covid 19 drastis karena banyak masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi. Vaksinasi bukan hal yang baru serta sistem pembuatan vaksin covid-19 sama seperti vaksin yang lain dan mempunyai mekanisme yang sama hanya saja banyak isu dan informasi hoax yang menghubungkan vaksinasi dengan agama, suku dan lainnya.

“Saya menyampaikan kepada semua masyarakat supaya jangan ragu untuk divaksin, serta percaya kepada berita yang tidak ada kebenarannya. Karena vaksin sudah terbukti membentuk kekebalan tubuh dan mencegah berbagai penyakit dan bukan hanya covid-19 saja. Jika ada efek samping, wajar saja karena setiap ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh pasti ada reaksi tubuh terhadap benda asing tersebut” tegas Parorongan.

Untuk membentuk kekebalan kelompok dibutuhkan paling kurang 70% dari total komunitas atau total populasi. Total populasi di Provinsi Papua Barat adalah 1,2 juta jiwa sehingga sekitar 797.402 jiwa yang harus divaksinasi. Saat ini baru 29,9% yang telah divaksin untuk dosis satu. Terkait vaksinasi tahap tiga sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan dosis booster lengkap sudah dilakukan sejak awal bulan Agustus 2021, namun belum semua tenaga kesehatan melakukan vaksinasi tahap ini karena kondisi tubuh yang kurang sehat atau masih dalam keadaan terpapar covid-19 sehingga butuh waktu untuk melakukan vaksinasi.

Penulis : Lince Baransano
Editor : Alberth Yomo



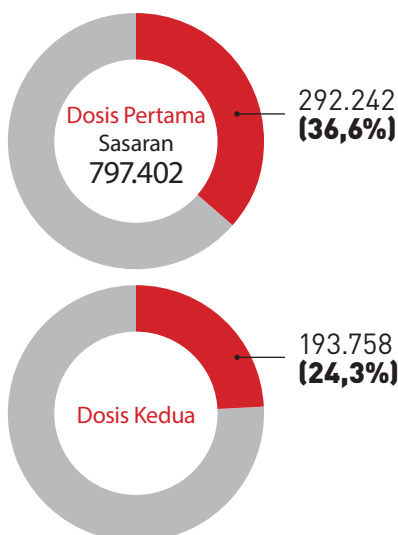
Gubernur Papua Barat ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di lingkungan kantor Provinsi Papua Barat. DOK. DINKES PB

VISI

- Menjadi Institusi Terdepan Dalam “Mewujudkan Papua Barat Yang Sehat, Berkualitas, Mandiri dan Berkeadilan”

Capaian Vaksinasi Covid-19 Provinsi Papua Barat hingga saat ini

UPDATE 10 NOVEMBER 2021



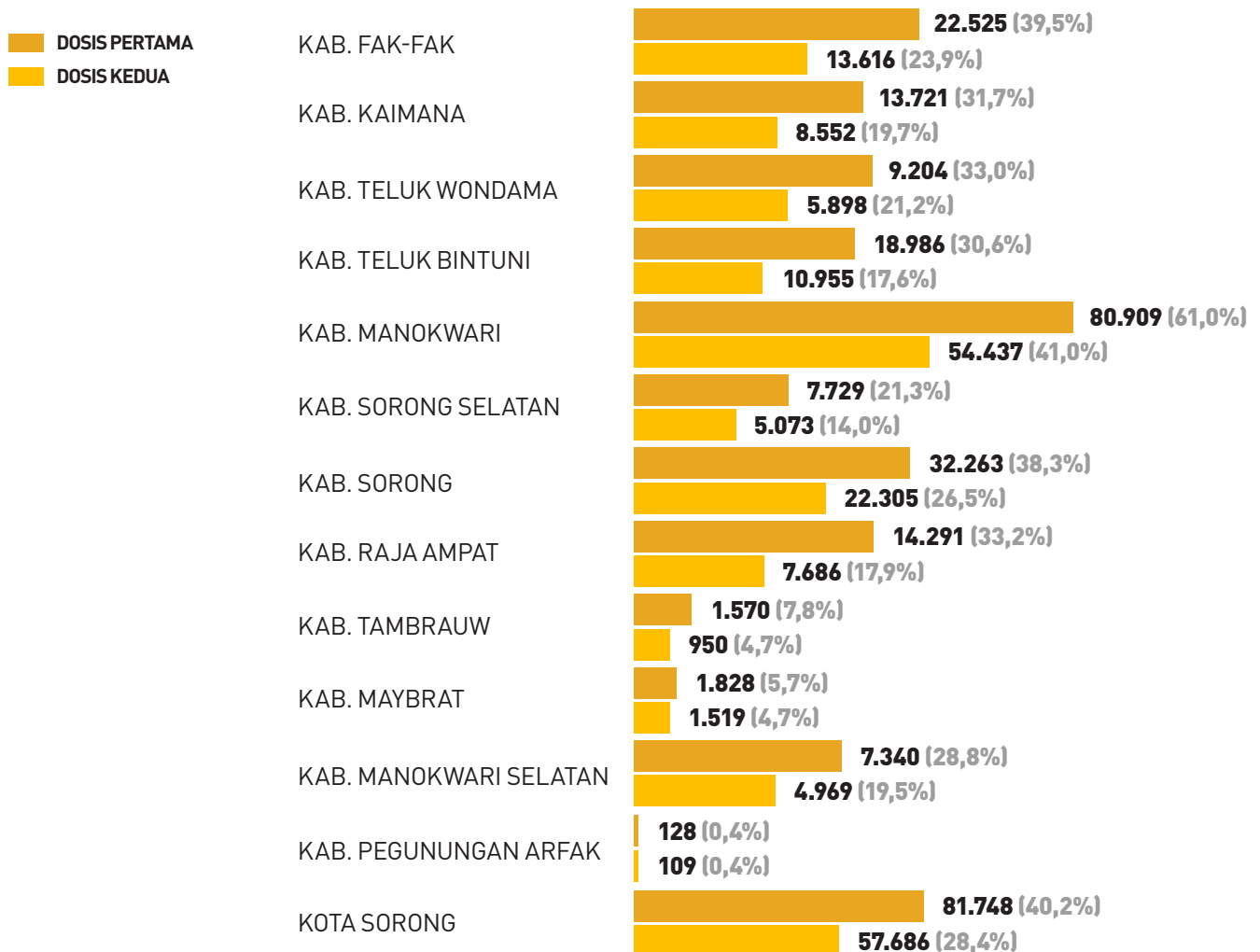
MISI

- Menyediakan dukungan kebijakan dan Tata Kelola Administrasi yang Prima, Serta Memaksimalkan dukungan-dukungan Kebijakan Sistem Manajemen dan Tugas Teknis lainnya.
- Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.
- Menjamin Ketersediaan, Mutu dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan.
- Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar dan Terjangkau.
- Melindungi Masyarakat dari Penyakit dan Mengurangi Resiko terjadinya Penyakit, Kecelakaan dan dampak Bencana.
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk Swasta dan Dunia Usaha.



Kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Vaksinasi Tingkat Provinsi Papua Barat.
DOK. DINKES PB

CAPAIAN SASARAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT (10 NOVEMBER 2021)

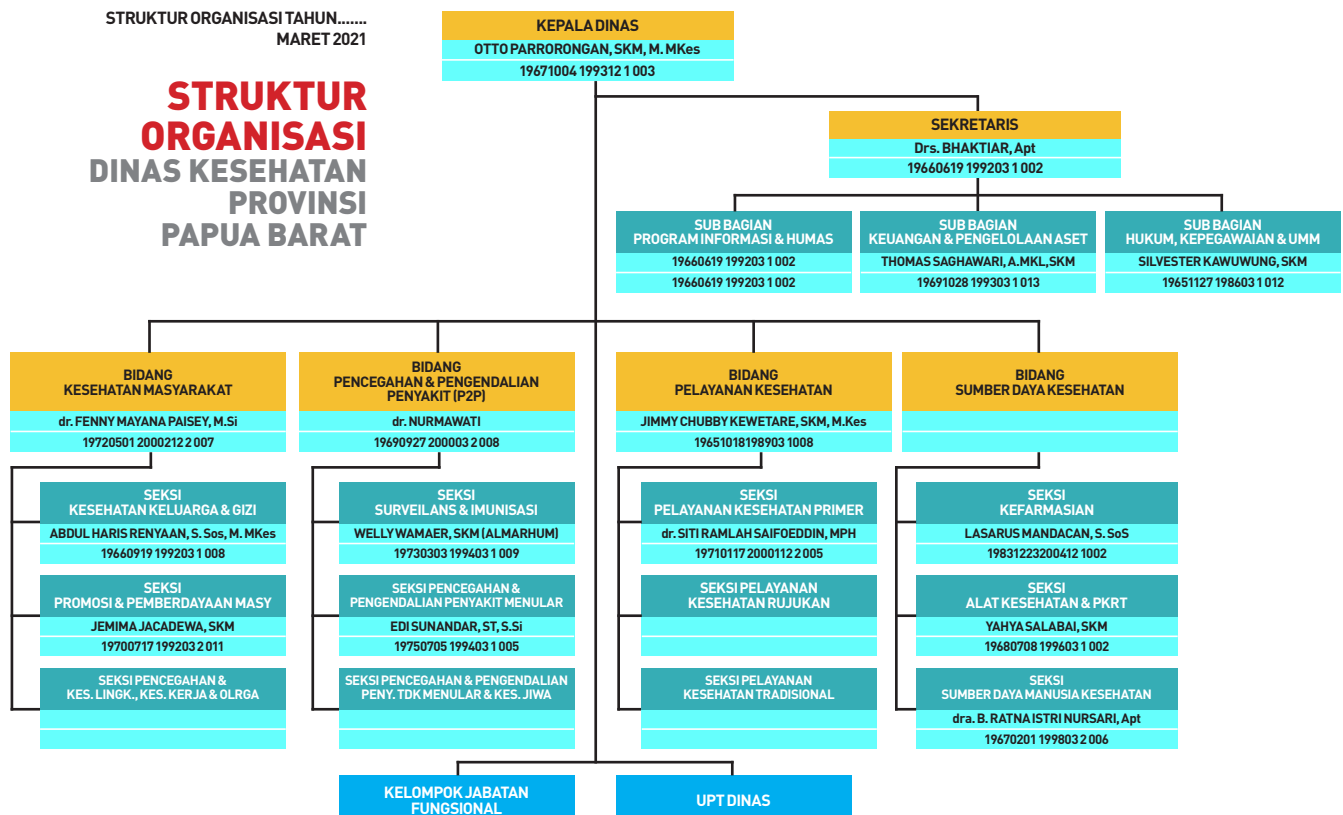




Kegiatan Vaksin Masal pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) dilangka STT Erikson-Tritt Manokwari pada 13 November 2021.
DOK. DINKES PB

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN.....
MARET 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT





*"Anggrek Biru, anggrek endemik di kepulauan Raja Ampat
-dok.Maurits Kafi-*